



Buletin Indonesia Inklusi Edisi 3

Buletin Indonesia Inklusi Edisi 3

Perkumpulan Pamflet Generasi
Linking and Learning Indonesia



Jakarta
Perkumpulan Pamflet Generasi

Buletin Indonesia Inklusi

Seluruh teks © 2023 **Buletin Indonesia Inklusi** berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Pemimpin Redaksi

Erlangga Saputra

Fasilitator Kelas Menulis

Luviana Ariyanti dan Anita Dhewy (Konde.co)

Penulis

Adamar Ghofari Ananda, Agus Wahyudi, Ahmad Fauzi, Alifa Aulia Shalsabila, Ariani Purnandari, Artika Kristanti, Chrisant Raisha, Citra Ayu Kurniawati, Citra Kader, Dede Tata, Dianita, Dinah Rida, Edhoy, Eliyati, Emsyarfi, Erlis Talan, Helen Intania Surayda, Kania Bening Rahmayna, Mama Atha, Margaretha Kasa Kedang, Namira Fathya, Nurul Aeni, Nyur Yawati, Oni Tukan, Osi Naya Fia, Panjul Anggrea, Pselia Remasti Nati, Piu, Rifky A. Irmanda, Rizki Estrada, Roni Saputra, Roni Seran, Saputri Firman, Sasha Trisha, Siti Barokhatin Ni'mah, Siti Chofivah, Syifa'iyah, Tati Sulastri, Viona Tukan, Witi Muntari, Wiwin Rizky Dwi Saputra, Yoris Riberu, Yulia Aron, Yulius Regang, Yusnidar

Penyunting

Muhammad Raka Ibrahim

Tata Letak Isi

Umi Kaltsum

Illustrator

Mohammad Nur Fiqri

Perancang Sampul

Mohammad Nur Fiqri

Diterbitkan oleh:

Perkumpulan Pamflet Generasi

Komplek Buncit Indah
Jalan Mimosa IV Blok E No 17, Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia
www.pamflet.or.id
E-mail: pamfletindonesia@gmail.com

I DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	vi
Dari Jalan Kaki hingga Dapur: Orang Muda Merebut Ruang untuk Dekolonisasi	1
RMI (Dinah Rida), SimpaSio (Oni Tukan, Viona Tukan, Margaretha Kasa Kedang, Yoris Riberu), Kolektif Videoge (Citra Kader, Saputri Firman), Lakoat.Kujawas (Erlis Talan, Paselia Remasti Nati)	
Kisahku di Kampung Duri	7
Mama Atha (Sanggar Seroja)	
Disabilitas Memberdayakan <i>Disabilitas, Why Not?</i>	11
Siti Barokhatin Ni'mah (Difabel Blora Mustika)	
Menggapai Sentosa: Gerakan Berliku Perempuan Pembela HAM (PPHAM)	17
Helen Intania Surayda, Sammi Institute (Konsorsium IProtectNow)	
Mengenalkan Pentingnya Aksesibilitas Dan Perjuangan Menuju Sinema Inklusif	22
Ahmad Fauzi (Minikino)	
Tarik-Ulur Memperjuangkan Hak-Hak Disabilitas di DKI Jakarta	29
Rifky A. Irmanda (Perhimpunan Jiwa Sehat)	
Membikin Abadi yang Kelak Retak: Kisah Pemuda dan Lansia Dari Tanah Karawang	34
Tati Sulastri & Nurul Aeni (Konsorsium PPSW Pasoendan Digdaya & Pusat Sumber Daya Komunitas/PSDK)	
Ibu, Pendukung Utama dalam Perjuanganku	41
Adamar Ghofari Ananda, JTID (Konsorsium Brave)	



Kisah Seorang Pemuda yang Mengalami Kusta Roni Saputra (PerMaTa Gowa)	47
Sehari di Kantor Polisi: Mendampingi Korban KBGO Piu & Sasha Trisha (LBH APIK Jakarta)	53
Lika-Liku Orang Muda Mendampingi Lansia Penyintas Osi Naya Fia (Indonesia untuk Kemanusiaan/IKa), Ariani Purnandari (Sekber'65), Yulius Regang (PBH-Nusra) Konsorsium Better Together	57
Kembali Pada Leluhur: Mengenal Desa yang Mendukung Penghayat Marapu Roni Seran (Konsorsium SID-Marungga)	63
Lewat Foto, Kawan Tuli dapat "Berbicara" Namira Fathya, Kota Kita Konsorsium Kreasi (Gerkatin Solo, Kota Kita, dan Ruang Atas)	68
"Hanya Ada Laki-Laki & Perempuan, Tidak Ada Lagi yang Lain!": Cerita Waria Maumere Yulia Aron (Komunitas KAHE)	73
Menggapai Mimpi yang Tertunda: Kisah Disabilitas Kembali Bekerja Agus Wahyudi & Dianita (Sehati Sukoharjo)	79
Kisah Cika: Ditolak & dibedakan Karena Tomboy Edhoy (Organisasi Perempuan Mahardhika)	83
Payung Dara, Potret Perempuan Muda Indonesia Kania Bening Rahmayna (Yayasan Kembang Gula)	87
Hidup Tanpa Terang: Kisah Pemuda Disabilitas Belajar Politik Alifa Aulia Shalsabila (Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia) & Rizki Estrada (Perkumpulan Inisiatif)	91

Tak Sekadar Liputan, Jurnalis Adalah Pembela HAM	96
Nyur Yawati & Chrisant Raisha (Yayasan IPAS Indonesia)	
Peraturan Rumit, Berekspresi Pun Sulit	100
Dede Tata (YIFoS Indonesia)	
Potret Perjalanan Orang Tua dengan Anak Disabilitas	104
Siti Chofivah (SAPDA)	
Bersolidaritas dengan Lansia: Kisah Dari Gunungkidul	108
Wiwin Rizky Dwi Saputra (ERAT Indonesia)	
Terbang Melampaui Mimpi, Adit Drummer Sindroma Down	111
Artika Kristanti dan Emsyarfi (Yapesdi [Yayasan Peduli Sindroma Down])	
Mendampingi Kasus Kekerasan Seksual Setelah UU TPKS	116
Witi Muntari, Citra Ayu Kurniawati, Panjul, Yusnidar, Eliyati, Syifaiah (LRC-KJHAM)	
PENUTUP REDAKSI	120
TENTANG LINKING AND LEARNING	121



I KATA PENGANTAR

Salam Solidaritas dan Salam Inklusi.

Setelah mendapatkan respon yang baik dan positif dari mitra penerima hibah Voice di Indonesia tentang Buletin Indonesia Inklusi edisi 1 dan edisi 2, senang sekali akhirnya Buletin Indonesia Inklusi edisi 3 kini hadir kembali. Melalui *Linking and Learning* (Terhubung dan Belajar), kami mendukung mitra penerima hibah Voice di Indonesia untuk terus berinovasi, mencoba hal/ide baru, dengan menggunakan metode yang kreatif. Dalam proses membuat Buletin Indonesia Inklusi edisi 3 ini, mitra penerima hibah Voice di Indonesia aktif mengikuti Kelas Menulis, proses tukar gagasan, serta penyuntingan hingga hasil akhirnya menjadi cerita yang relevan dengan situasi di sekitar kita.

Berbeda dari dua edisi sebelumnya, di edisi kali ini ada keterlibatan teman-teman mitra penerima hibah Voice di Indonesia yang baru bergabung di Voice Indonesia sehingga artikel-artikel dalam edisi Buletin kali ini juga semakin beragam. Ada keberagaman sudut pandang yang diharapkan dapat memperkaya perspektif pembaca dalam memandang isu kelompok marjinal dan inklusivitas.

Buletin ini juga bisa dianggap sebagai salah satu wadah mendengarkan suara-suara yang seringkali terabaikan, memberikan tempat bagi individu maupun kelompok yang beragam latar belakang untuk berbagi cerita, pandangan, mendukung satu sama lain dan merayakan keberagaman yang ada di sekitar kita. Buletin Indonesia Inklusi ini juga menjadi sarana bagi kolaborasi yang nyata bersama dengan teman-teman Indonesia Inklusi.

Tim Voice Indonesia mengucapkan terimakasih kepada Pamflet selaku fasilitator *Linking Learning* dan juga mitra penerima hibah Voice di Indonesia yang terlibat dalam penulisan Buletin Indonesia Inklusi edisi 3 ini. Kita semua memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki tempat yang layak dan setara dalam masyarakat. Kami percaya bahwa kekuatan perubahan terletak dalam kebersamaan kita. Selamat membaca.

Voice Indonesia





BULETIN INDONESIA
INKLUSI EDISI 3

An illustration of a hand holding a plate of food. The hand is yellow with a blue and white striped sleeve. The plate is white and contains various colorful food items: a hard-boiled egg, a piece of meat, a piece of bread, a piece of vegetable, a piece of fruit, and a piece of leafy green. The background is a vibrant pink with abstract teal and yellow shapes. In the top right corner, there is a small circular inset showing a plate of food. In the bottom right corner, there are some small green plants and yellow stars.

DARI JALAN KAKI HINGGA DAPUR: ORANG MUDA MEREBut RUANG UNTUK DEKOLONISASI

RMI (Dinah Rida), SimpaSio (Oni
Tukan, Viona Tukan, Margaretha
Kasa Kedang, Yoris Riberu),
Kolektif Videoge (Citra Kader,
Saputri Firman), Lakoat.Kujawas
(Erlis Talan, Paselia Remasti Nati)



Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena identitasnya yang khas. Mulai dari label bahwa mereka jauh dari “kemajuan”, sampai persoalan ruang hidup. Stereotip yang dilekatkan secara tidak adil tersebut kerap kali memicu krisis identitas, yang kemudian memperbesar keengganan orang muda untuk bangga menjadi bagian dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Namun orang muda dari tiga komunitas asal Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Konsorsium Kampung Katong menolak begitu saja tunduk pada label-label tersebut. Berangkat dari kepedulian dan rasa memiliki terhadap kampung halamannya, mereka memulai kerja-kerja kolaboratif dalam mendokumentasikan pengetahuan lokal yang mulai hilang tergerus zaman dan menemukan kembali identitas yang membentuk mereka.

SimpaSio Institute dengan mengumpulkan arsip-arsip sejarah-budaya Melayu Larantuka, Kolektif Videoge melakukan reproduksi pengetahuan lokal tentang resep-resep pesisir di Labuan Bajo, dan Lakoat.Kujawas mendokumentasikan resep Cina Mollo yang ada di sekitar kampungnya.

Perlahan orang muda merebut ruang, merespon persoalan yang ada di hadapan mereka dengan topik dan metode-metode yang

kontekstual di wilayahnya masing-masing. Semua dilakukan dalam semangat dekolonisasi—yakni proses melepaskan diri dari berbagai pengaruh kolonialisme dengan memposisikan realita lokal sebagai pedoman hidup.

Memaknai Ulang Cerita Sendiri

Di Larantuka, SimpaSio mengobservasi bahwa generasi muda minim pemahaman dan kesadaran tentang sejarah dan budaya daerahnya sendiri. Persoalan ini disebabkan oleh keterbatasan pendokumentasian, sehingga ada satu rantai informasi yang terputus. Untuk saat ini saja, sudah cukup sulit untuk menemukan arsip-arsip fisik tentang sejarah dan budaya Larantuka, jika tidak melalui wawancara dengan para pelaku budaya, budayawan, sejarawan, dan keturunan Raja Larantuka.

SimpaSio khawatir jika hal ini dibiarkan, maka di masa depan, sejarah dan budaya Larantuka hanya menjadi cerita turun temurun yang dapat ditambah-kurangkan.

Menyadari kenyataan ini, orang muda Larantuka yang bergabung dalam SimpaSio Institute berupaya mendokumentasikan sejarah dan budaya Melayu Larantuka. Menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, program Lingkar Belajar berupaya menggali dan mendokumentasikan sejarah dan kebudayaan masyarakat Nagi Larantuka seperti tenun ikat





Waibalun, serta khazanah pengobatan dan makanan tradisional yang juga melingkupi makna dan filosofi di baliknya.

Hasil dari program Lingkar Belajar ini didokumentasikan dalam bentuk resep pengobatan dan resep makanan tradisional Nagi Larantuka, juga gambar dan video yang diarsipkan secara sederhana melalui *google drive* untuk dikelola data dan informasinya lebih lanjut.

SimpaSio melihat bahwa hasil temuan dari Lingkar Belajar ini perlu dibagikan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, SimpaSio mengadakan Pameran Rupa Nagi untuk menampilkan berbagai hasil temuan dari program Lingkar Belajar. Selanjutnya, SimpaSio mengadakan Larantuka Walking Tour untuk memberikan edukasi sejarah kepada masyarakat umum khususnya anak dan remaja, tentang sejarah kota Larantuka dengan menggunakan konsep wisata.

Konsep ini dipilih karena lokasi sejarah dan budaya di Larantuka yang mudah dijangkau. Selain itu, konsep ini mampu

memberikan *vibes* dan euforia yang menyenangkan, unik, dan edukatif. Masyarakat umum, anak, dan remaja dapat bermain peran menjadi pemandu wisata



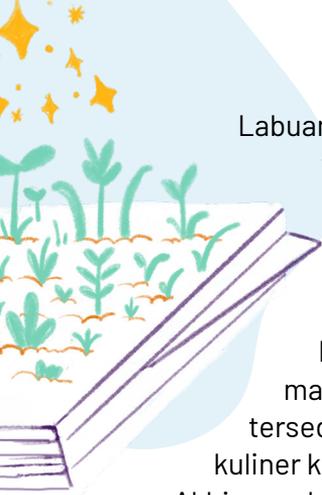
dan wisatawan di dalam Larantuka Walking Tour.

Proses yang dilalui dengan niat yang baik ini dimaknai SimpaSio sebagai proses belajar seumur hidup yang berdampak bagi masyarakat luas. Orang muda yang tergabung di dalam Tim Kreatif SimpaSio juga memperoleh ruang berekspresi melalui kegiatan kami. SimpaSio juga merasa bersyukur karena mendapatkan dukungan dari program Kampung Katong, sehingga Tim Kreatif SimpaSio mendapatkan pengalaman terkait pengelolaan dan manajemen organisasi, manajemen administrasi, dan cara mengorganisir program agar dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh SimpaSio ini, orang muda Larantuka semakin dekat dengan sejarah dan budaya daerahnya. Kesejarahan dan kebudayaan yang mereka peroleh dari kegiatan ini dapat semakin menegaskan identitas daerah mereka dan menjadi cerminan untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Mengabadikan Cerita Lewat Makanan: Mengarsipkan Makanan Khas Labuan Bajo

Namun selain narasi besar tentang sejarah suatu masyarakat, dan keseniannya, kadang hilangnya informasi tentang identitas budaya ini terlihat dari khazanah kulinernya. Saat masih duduk di bangku sekolah, kawan-kawan Videoge kerap ditanyakan: apa makanan khas Labuan Bajo? Celakanya, pertanyaan ini seringkali sulit dijawab.



Labuan Bajo memang tempat persinggahan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah dan membawa khazanah kulinernya masing-masing. Namun, tidak tersedia arsip mengenai kuliner kampung halaman.

Akhirnya, datangnya ragam kuliner dari luar Labuan Bajo tanpa disadari semakin menggeser keberadaan kuliner lokal di daerah pariwisata ini.

Di Labuan Bajo berbicara soal pangan bisa dikatakan agak sulit karena sayuran dan umbi-umbian masih didatangkan dari luar kota Labuan Bajo. Komoditas atau pangan yang dijual di pasar juga tidak begitu beragam, barangkali hal itu disebabkan oleh kurangnya minat bertani atau banyaknya lahan yang sudah beralih fungsi.

Hal inilah yang mendorong Kolektif Videoge mendokumentasikan mendokumentasikan resep warga pesisir Labuan Bajo, yang kemudian diproduksi menjadi buku resep berjudul *Resep Tetangga*. Buku ini dibuat untuk mengenal identitas kuliner di Labuan Bajo dan juga semacam pemantik bagi kami untuk mengembangkan serangkaian program yang kami namai Dapur Pecah. Tidak hanya menjadi nama sebuah program, tetapi juga menjadi unit usaha dan wadah kolektif untuk belajar berbagai kreasi menu yang tidak meninggalkan resep asli, dengan disertai beberapa narasi di baliknya.

Setelah melakukan riset mengenai kuliner, kami akhirnya mendapatkan

satu pengetahuan baru bahwa budaya berpengaruh sangat besar terhadap makanan. Dalam mengumpulkan data, kami juga mengetahui bahwa keberagaman merupakan identitas kami di pesisir Labuan Bajo karena terdiri dari beberapa suku seperti suku Bajo, Manggarai, Bugis, dan Bima.

Setelah mempelajari beberapa resep, proses selanjutnya kami mulai dengan melakukan Telusur Musim, semacam melakukan riset kecil-kecilan tentang kondisi alam dan musim apa saja yang sedang dirayakan warga di bulan dan waktu mendatang. Adapun telusur musim yang sedang dikerjakan saat ini adalah mengenai musim asam yang ada di Labuan Bajo. Melalui Telusur Musim dan uji coba produksi Telusur Rasa, Videoge menghasilkan produk kreatif dengan cerita warga di balik makanan yang bernilai ekonomi.

Proses riset juga membangun komunikasi yang begitu dekat dengan warga lain. Kawan Kolektif Videoge mengamati



musim dengan berjalan kaki melewati hutan kota, pemukiman warga, gang sempit, hingga melakukan perhitungan sepanjang apa musim asam akan dirayakan warga pesisir di Labuan Bajo.

Mengabadikan Cerita Lewat Makanan: Mengarsipkan Makanan Khas Mollo

Kerja-kerja serupa juga dilakukan oleh Komunitas Lakoat. Kujawas di Mollo. Selain melakukan pendokumentasian sejarah kampung, motif tenun, asal usul marga, dan rumah tradisional, mereka mulai mengangkat narasi tentang pangan lokal.

Hari ini, di piring sebagian besar orang Mollo tidak lagi terhidang ubi, jagung, atau kacang-kacangan hasil dari kebun dan hutan. Semua itu sudah tergantikan dengan makanan dan *snack* cepat saji yang diimpor dari luar dan menggunakan bahan-bahan kimia yang berdampak buruk pada tubuh.

Lakoat.Kujawas melakukan kegiatan riset keliling kampung, mencari narasi dan resep-resep pangan lokal untuk kembali mengisi piring makan dengan pangan lokal yang kaya akan gizi dan narasi. Dalam kegiatan riset ini, mereka dibagi dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari remaja, dewasa, dan manula. Semua tim bergerak secara paralel. Setelah melakukan riset, tim membuat kegiatan berkelanjutan, mencari bahan-bahannya di kebun atau hutan lalu bereksperimen dengan resep-resep makanan lokal yang sudah ada.

Dalam kegiatan riset mereka, anak-anak dan orang tua bisa ikut terlibat untuk kembali mengenal apa itu pangan lokal yang sangat dihargai dan dihormati oleh orang tua dulu karena dianggap memiliki arwah. Para generasi muda menyaksikan secara langsung bagaimana rekan mereka yang sudah lebih tua melakukan ritual adat sebagai bentuk menghargai alam.

Pangan lokal memang cerminan identitas suatu daerah. Jika pangan lokal itu hilang berarti kita juga kehilangan identitas. Lakoat.Kujawas berusaha mempertahankan dan melestarikan itu semua dengan membangun ruang penyimpanan benih, menyajikan hasil-hasil eksperimen makanan, dan juga tempat melakukan workshop memasak yang kami sebut dengan nama Food Lab Ume Fatumfaun.

Makanan dari hasil eksperimen dan inovasi bahan pangan lokal itu yang dihidangkan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh

An illustration of a hand holding a plate of food. The hand is yellow with a blue and white striped sleeve. The plate is white and contains various colorful food items: purple flowers, orange slices, green and orange vegetables, purple berries, a brown textured item, a blue leafy vegetable, yellow beans, and a yellow egg. The background is a teal and blue abstract design.

Lakoat.Kujawas. Tujuannya untuk mengenalkan kepada banyak orang bahwa makanan berbahan pangan lokal itu tidak mahal dan kaya akan gizi yang baik untuk tubuh. Dari hasil kerja bersama inilah hidangan lawas seperti *laku tobe*, *bose*, *lu'at* dan masih banyak lagi dihidangkan kembali. Tim-tim kecil ini juga berinovasi menciptakan resep makanan berbahan pangan lokal seperti balado ubi dan sop ubi.

Sebagai pengenalan, kami hidangkan panganan-panganan lokal dalam kegiatan yang melibatkan anak-anak. Mengenalkan kepada mereka, membuat lidah mereka akrab kembali dengan makanan orang tua dulu. Menghidangkan piring-piring berisi makanan dari olahan ubi, kacang, jagung dari kebun yang enak sambil bernarasi tentang apa yang ada di piring mereka.

Berjalan kaki keliling kota, mendokumentasikan ikat tenun, dan mencari tahu resep-resep para leluhur mungkin sekilas tidak terdengar seperti kegiatan yang besar dan monumental. Namun, ini adalah cara-cara kecil untuk mulai memaknai sejarah kami dari sudut pandang kami sendiri, bukan dari lensa luar yang boleh jadi penuh bias.

Bukan hal mudah dalam melakukan proses pelepasan diri dari pengaruh-pengaruh kolonialisme dan stereotip yang dilekatkan, apalagi orang muda masih menghadapi ruang partisipasi yang terbatas. Akan tetapi melalui proses yang sudah dilakukan selama hampir dua tahun ini bersama konsorsium Kampung Katong, orang muda sudah memperlihatkan bagaimana mereka dapat berdaya, merespon persoalan sosial-lingkungan mereka melalui penguatan identitas kelokalan yang sudah melekat dalam diri.

Dengan memupuk semangat, ruang yang "direbut" dapat menjadi motor perjuangan, bukan hanya bagi individu orang muda itu sendiri, tapi juga bagi komunitas dan lingkungan di sekitarnya.



KISAHKU DI KAMPUNG DURI

Mama Atha
Sanggar Seroja



Kampung Duri – inilah nama wilayah di mana aku tinggal, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan hingga kini. Wilayah terpadat kedua di Asia.

Orang tuaku dulu sering bercerita kalau kampung ini banyak dihuni oleh kaum pendatang. Sekarang, banyak rekan-rekan waria yang bermukim di sana. Banyak dari mereka yang mencari penghasilan dari mengamen. Sebagian bekerja sebagai pekerja seks, ada pula yang bekerja di salon kecantikan. Salah satunya adalah aku.

Sejak tahun 1970-an, Kampung Duri memang sudah dihuni oleh banyak waria. Bahkan dekat rumahku dulu, aku ingat ada satu kontrakan yang berisi waria dari berbagai daerah. Salah satu gang bahkan sampai disebut Gang Bencong karena jumlah penduduk waria yang padat.

Sejak aku kecil di masa-masa itu, memang aku sudah seperti perempuan. Aku senang sekali memakai pakaian perempuan, bermain dengan mainan perempuan, dan ikut Mak-ku belanja ke pasar. Aku ingat, kalau main rumah-

rumahan pun aku selalu menjadi sosok Ibu. Aku juga sering membantu Mak masak di warung setiap pulang sekolah. Warung Mak terletak di tengah-tengah

Pasar Pos Duri – sekarang pun pasar itu masih ada meskipun sudah beberapa kali direnovasi. Saat itu aku senang sekali. Kalau aku membantu di warung Mak-ku, banyak sekali yang ingin dilayani olehku. Kata mereka aku lucu dan cakep!

Sekarang umurku sudah 55 Tahun. Karena dari kecil aku sudah seperti perempuan, orang yang tinggal dekat dengan rumahku sudah mengerti karakter dan tingkah laku aku. Seiring berjalannya waktu, aku pun tumbuh menjadi seorang waria. Beruntungnya aku tinggal di wilayah Kampung Duri, karena warga sekitar sudah menerima keberadaan kami dan kami juga bisa menyatu dengan warga sekitar.

Kawan-kawan waria pun punya ruang untuk berkarya dan mengasah kreativitasnya. Sebelumnya, banyak waria terkumpul dalam kelompok kesenian bernama Teater Manekin. Pada 20 Oktober 2016, kelompok ini berkembang menjadi Sanggar Seroja – nama yang diambil dari nama bunga yang hidup di air keruh. Seperti bunga seroja, meskipun hidup di air kubangan, kami akan selalu mekar dan terlihat indah.

Kami ingin Sanggar Seroja menjadi wadah untuk kelompok transgender berkesenian, membangun penerimaan diri, menciptakan ruang diskusi,

bersolidaritas serta menghasilkan karya untuk kampanye dan menyuarakan keberagaman agar bisa mewujudkan nilai-nilai kesetaraan di masyarakat.

Keteguhan kami diuji ketika pandemi datang. Banyak sekali kawan transpuan atau waria yang susah mencari uang, terutama yang jalan mengamen. Akhirnya, Sanggar Seroja membuka donasi untuk membantu teman-teman yang terdampak pandemi. Dengan bantuan Queer Language Club (QLC), Sanggar Seroja pun bisa memberi bantuan berupa makanan buat teman-teman di Kampung Duri dan sekitarnya.

Awalnya Sanggar Seroja memberi bantuan berupa nasi bungkus. Aku dengan dibantu beberapa teman dan saudara-saudara bertugas memasak di dapur umum untuk waria. Setiap hari, aku masak sebanyak 140 bungkus nasi kotak. Nuke dan Indri, anggota lain Sanggar Seroja, bertugas membagikan nasi di wilayah Kampung Duri dan Kali Anyar. Kegiatan ini berlangsung sejak awal pandemi hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Setelah PSBB, kami memberikan bantuan berupa sembako dan uang jajan. Kami pun mengadakan Dana Bergulir untuk memodali teman-teman Seroja mendirikan usaha kuliner. Seiring berjalannya waktu, kami mengelola tujuh bisnis kuliner kecil-kecilan – salah satunya milikku sendiri, Bolu Mama Pandan. Sanggar Seroja juga masih tetap mengadakan pementasan teater meskipun hanya lewat virtual.

Karena kami sedang aktif di isu lingkungan hidup, kami juga membuat kostum untuk superhero-superhero unik dari bahan daur ulang. Ada kostum Trans Super Hero, ada kostum Asih yang merupakan pahlawan di bidang kesehatan, kostum Dana

yang pahlawan keuangan, Feilan yang pahlawan kebersihan, dan Tara sang pahlawan advokasi. Dengan kostum-kostum itu, kawan-kawan Sanggar Seroja sering mengadakan





pementasan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup serta aksi-aksi termasuk untuk isu perubahan iklim.

Di tahun 2023 ini, kami akan mengadakan pementasan dengan naskah khayalan sendiri. Pada pementasan ini, kami mengangkat kisah keluarga Betawi yang mempunyai lima orang anak – semuanya waria. Sang Bapak sangat menentang keadaan ini, bahkan anaknya sampai diusir, tapi kelima anaknya berhasil menjadi orang-orang yang sukses dan terkenal. Lakon ini akan dimainkan oleh rekan-rekan Sanggar Seroja, beserta seorang laki-laki yang menjadi karakter Babeh.

Bagiku, Kampung Duri adalah tempat yang sangat indah dan berarti. Meskipun

banyak yang bilang kampung ini kumuh dan padat, aku bahagia menjalani kehidupanku di sana. Apalagi di kampungku banyak sekali teman-teman waria dan pendatang yang saling berbaur. Keberadaan kami dan Sanggar Seroja pun sangat diterima oleh warga, bahkan pihak RT dan ormas setempat pun selalu mendukung kegiatan kami. Anak-anak kecil di Kampung Duri sudah tidak merasa aneh melihat kami yang waria, dan setiap Sanggar Seroja melakukan latihan di tengah pasar atau parkir pasar, anak-anak sekitar akan ramai menonton kami. Bahkan kadang mereka minta diajak ikut latihan dengan kami.

Aku sangat bahagia menjalani kehidupanku saat ini. Apalagi, sekarang aku diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat dan membesarkan seorang anak. Anakku memanggilku Mama, dan mulai dari situ banyak orang memanggilku dengan sebutan Mama Atha. Panggilan itu semakin memperkuat diriku sebagai seorang Ibu, meskipun aku tidak merasakan hamil dan melahirkan, aku bisa menjadi sosok yang baik untuk teman-temanku dan untuk anakku, Incess Saljuku.



Kuharap aku juga bisa menjadi Mama buat semua orang dan Mama untuk Sanggar Seroja. (*)

DISABILITAS MEMBERDAYAKAN DISABILITAS, **WHY NOT?**

Siti Barokhatin Ni'mah
Difabel Blora Mustika



Pagi itu, Wiji, begitulah perempuan ini akrab disapa, sedang *matuni* tanaman kacang tanah di ladang. Biasanya dalam kegiatan *matun* ini, yang dilakukan adalah mencabut rumput dan mengambil hewan-hewan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman. Wiji yang saat itu berusia 22 tahun sedang giat-giatnya merawat tanaman dengan harapan hasil yang didapat bisa maksimal. Sampai akhirnya ketika sudah di rumah, ia merasakan nyeri yang luar biasa pada tengkuk kirinya.

Karena nyeri yang tak kunjung reda, tetangga datang dan membantu untuk kerokan. Kurang dari satu jam berselang, kaki kiri Wiji tidak bisa bergerak dan tak lama menyusul kaki sebelah kanan. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit. Ia masih ingat betul, Dokter Setyoko yang menanganinya mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan pada sumsum tulang ekor dan tidak bisa sembuh total.

Wiji yang saat itu kaget sudah yakin bahwa dia sebelumnya tidak terjatuh atau terbentur benda keras. Namun dokter mengatakan bahwa hal ini bisa disebabkan benturan di masa lampau. Setelah mendengar penjelasan dokter, Wiji langsung terhenyak. Dulu, ia memang pernah terjatuh dan bagian tulang ekornya yang saat ini didiagnosa mengalami kerusakan tertimpa satu sak rumput.

Ia mengatakan bahwa keluarga dan tetangga pada heran dan tidak mengerti. "Kok bisa ya, pagi masih ke ladang tahu-tahu pulangnye gak bisa jalan dan lumpuh?" tanya mereka.

Sama dengan para keluarga dan tetangga, Wiji merenung dengan perasaan yang masih bertanya-tanya dan tidak percaya.

Banyak ikhtiar yang dilakukan keluarga agar Wiji bisa kembali seperti sediakala. Mereka bahkan berkonsultasi pada orang pintar, yang menjawab bahwa ini akibat kesalahan leluhur yang kini ditanggung oleh Wiji. Orang lain yang ditanyai mengatakan Wiji diganggu makhluk halus karena melewati tempat yang ada "penunggu"-nya tanpa permisi.

Dengan tekad yang kuat, di bulan ketiga setelah pulang dari rumah sakit ia mulai bisa duduk tanpa ditahan dari belakang. Kemudian tak lama dari itu, Wiji akhirnya dapat berdiri dan berjalan meskipun menggunakan tongkat.



Sampai dua tahun berlalu, ia bangkit bersamaan dengan suaminya yang pergi meninggalkannya.

Semenjak ditinggal suami, Wiji mencoba berjualan makanan ringan di rumah, mulai dari kerupuk sambel sampai dengan permen gulali. Bahkan ia mengatakan kalau dari permen gulali ia tidak langsung mendapatkan uang, namun berupa jagung karena dibeli dengan sistem barter. Setelah mendapat jagung, ia kumpulkan dulu sampai jumlahnya lumayan baru kemudian dijual.

Karena melihat penghasilan dari jualan makanan ringan kurang, sejak tahun 2004 Wiji mulai terjun di dunia penjahitan. Ia mengatakan bahwa semasa gadis ia pernah mengikuti kursus menjahit. Berbekal uang tiga ratus ribu rupiah dari pemerintah ia membeli mesin jahit bekas. Awal-awal mulai menerima permak kemudian sedikit-sedikit mulai bisa membuat baju dan berjalan terus sampai sekarang.

“Perasaan *down* itu ada, tapi saya sadar bahwa ada anak yang harus diperjuangkan, jadi saya harus bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri,” kata Wiji. “Maka dari itu, saya ingin sekali orang-orang yang memiliki

kekurangan seperti saya, supaya memiliki pemikiran jangan *stuck* di tempat, ayo kita belajar bareng-bareng, kita bisa menghasilkan uang. Ayo kita semangat untuk diri kita

sendiri, apalagi yang punya anak. Kalau diri sendiri tidak semangat bagaimana anak-anakmu, karena mereka butuh dukungan kita.”

Memberdayakan Sesuai Kemampuan

Organisasi kami, Difabel Blora Mustika, saat ini sedang berjuang di bidang pemberdayaan perempuan disabilitas dan OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dengan dukungan Voice, kami membentuk PERDIFA (Perkumpulan Perempuan Difabel) di enam kecamatan, yakni PERDIFA Jepon, PERDIFA Kunduran, PERDIFA Banjarejo, PERDIFA Ngawen, PERDIFA Tunjungan, dan PERDIFA Bogorejo.

Awal mula, kami melakukan pendataan kepada 70 perempuan disabilitas di masing-masing kecamatan dan memilah mana saja yang bisa diajak berkegiatan. Dari 70 orang yang kami data di Kecamatan Tunjungan, 13 diantaranya bisa diajak berkegiatan dan bersedia untuk mengikuti program pemberdayaan. Salah satu yang memiliki keinginan dan semangat yang menonjol adalah Wiji, seorang perempuan dengan disabilitas daksa. Beliau ketika pendataan juga turut membantu mengenalkan tim pada





disabilitas lain yang ada di sekitar rumah. Ia memiliki tekad kuat agar teman-teman yang lain mandiri dan memiliki penghasilan sendiri.

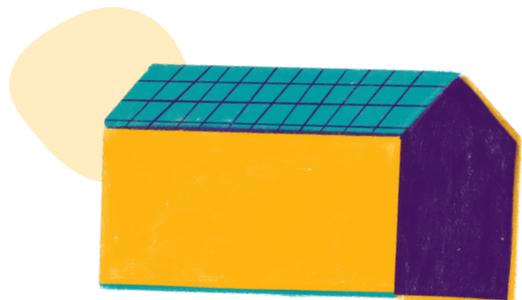
Wiji termotivasi karena melihat di sekelilingnya banyak perempuan disabilitas yang kurang beruntung. "Saya terketuk, melihat beliau-beliau ini sehari-hari hanya diam di rumah tanpa mengerjakan sesuatu. Selain itu saya juga melihat diri saya sebelum memiliki pekerjaan," ucap Wiji. "Dengan kemampuan saya, saya ingin melatih teman-teman yang lainnya agar bisa mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang agar setidaknya bisa menghidupi dirinya sendiri."

Wiji diangkat sebagai ketua PERDIFA Tunjungan. Ia menawarkan sisa kain jahitannya untuk diolah menjadi produk, dan mulai membagi-bagi tugas sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anggota. Yang disabilitas daksa, membantu memotong bahan dan menjahit yang ringan-ringan. Yang tuna netra, mengukur dan mengelompokkan kain yang berukuran sama. Sedangkan yang disabilitas mental membantu sesuai dengan kemampuan.

Kegiatan PERDIFA Tunjungan salah satunya adalah pertemuan rutin setiap hari Sabtu. Pertemuan rutin yang diikuti enam sampai sepuluh anggota ini diisi dengan kegiatan arisan atau berlatih membuat produk, tergantung kemauan bersama. Sebagian besar anggota sebelum mengikuti kegiatan hanya diam di rumah, cenderung minder, dan belum memiliki keterampilan. Setelah bergabung dengan PERDIFA, mereka mulai belajar, stigma diri berkurang, berani tampil dan berbicara di depan publik dan memiliki kemampuan membuat produk.

Wiji mengatakan, "Sebenarnya saya juga jika ada yang non-disabilitas mau belajar silahkan. Untuk produk yang sudah dihasilkan adalah tas laptop, tas selempang, ikat rambut, keset, dan bros. Sekarang yang bisa jahit lurus-lurus sudah bisa jahit spreng, sarung bantal dan guling. Sudah ada dua pedagang yang mau mengambil barang kita."

Target ke depannya, Wiji ingin perempuan disabilitas lain yang sedang belajar mampu mengerjakan produk di rumah sendiri dan bisa menjualkan sendiri produknya. Setidaknya bisa menghasilkan uang walaupun mengerjakan di rumah.



“Untuk PERDIFA saya ingin menambah anggota yang mau belajar keterampilan. Tidak hanya menjahit, kami ingin ada program pemberdayaan atau pelatihan khusus dari pemerintah untuk kami berkaitan dengan keterampilan agar kami bisa mandiri, entah itu border, merajut, menyulam dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Kisah luar biasa seperti bu Wiji dan teman-teman PERDIFA di Tunjungan juga berulang di kelima kecamatan lainnya. Mereka sepakat mendorong kemandirian ekonomi bagi perempuan disabilitas dan OYPMK, tapi menyesuaikan dengan kemampuan dan potensi alam sekitar. Di Jepon, misalnya, PERDIFA fokus menginisiasi usaha kerajinan anyaman bambu, di Kunduran mereka mendirikan usaha jamur tiram, di Banjarejo olahan makanan ringan, di Ngawen usaha sirup jahe emprit, dan di Bogorejo mendirikan usaha minuman instan.

Semoga pendampingan di enam kecamatan ini akan membawa perubahan baik bagi perempuan disabilitas dan OYPMK di Kabupaten Blora. Kami percaya hal-hal besar dimulai dari perubahan-perubahan kecil. (*)





MENGGAPAI SENTOSA: GERAKAN BERLIKU PEREMPUAN PEMBELA HAM (PPHAM)

Helen Intania Surayda, Sammi Institute
Konsorsium IProtectNow



Tidak pernah kuduga bahwa lilin yang kupasang di kue ulang tahun ke-empat puluh Yu Awi merupakan penanda usianya yang terakhir. Sekian tahun, perempuan tangguh ini menahan sakit, menjalankan tugasnya sebagai seorang *advokat* pendamping korban kekerasan. Aku tak pernah tahu luka dalam tubuhnya selalu dibalut dengan atasan longgar dilapisi jaket tebal. Beberapa kali Yu Awi tak nampak di kegiatan dan mendapat kabar dia sakit, kupikir hanya sakit biasa, tifus, penyakit langganan para pendamping isu HAM.

Kondisinya menurun drastis. Dia sakit kanker payudara stadium IV. Ternyata ketika beberapa waktu lalu Yu Awi pernah memesan obat herbal langgananku, ia sedang berupaya untuk sembuh. Ia yakin obat itu akan mengatasi kondisinya. Keteguhannya terapi herbal dibanding bertemu dokter memang selaras dengan wataknya yang keras. Kami sampai harus merayunya untuk mengakses layanan medis.

Namun terlambat! Payudaranya harus segera diangkat agar tidak semakin menggerogoti paru-parunya. Perempuan tomboy keras kepala ini terlalu lama mengabaikan kondisi kesehatannya. Sebagai *advokat*, ia memilih jalur nirlaba sebagai pekerja sosial dibandingkan pasang tarif seperti rekan-rekan seprofesinya. Pekerjaannya belum menganggarkan pegawainya punya jaminan perlindungan kesehatan. Walhasil, keluarga Yu Awi kelabakan mengupayakan pengobatannya.

Bahkan pasangan Yu Awi tidak menerima upah bulanan yang pasti. Mereka sama-sama di jalur isu HAM – pasangannya hanya berdagang buku-buku tentang gerakan. Praktis sumber dana utama keluarga beranak satu itu adalah Yu Awi.

Kami tergerak untuk segera memproses jaminan kesehatannya agar segera mendapatkan perawatan intensif. Sembari menunggu urusan akses ke layanan medis selesai, kami berinisiatif mengajak rekan-rekan yang bergerak di isu HAM untuk menggalang donasi. Donasi digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan rekan kami – dari biaya perawatan medis, biaya operasional, hingga kebutuhan *urgent* lainnya.

Tuhan berkehendak lain. Perempuan tulang punggung keluarga ini telah berjuang maksimal. Prosedur penanganan medis baru dijalankan beberapa tahap, tubuhnya tak cukup kuat berjibaku melawan sel ganas. Semesta memanggilnya untuk menyatu dan pulang.

Sayangnya, Yu Awi bukan satu-satunya perempuan pendamping korban kekerasan yang mengalami hal serupa. Masih banyak perempuan pendamping lain yang bernasib sama, kurang beruntung dalam hal kesehatan bahkan mungkin lebih buruk dengan tambahan persoalan lain. Sebagian menghadapi keluarga yang





menuntut gaji tinggi, menerima tekanan dan kekerasan dari keluarga sendiri dan keluarga pendamping, ancaman kekerasan dari pelaku, dan rentan keselamatan dirinya selama pendampingan.

Inilah salah satu alasan dibentuknya Perisai HAM, wadah bagi para pendamping yang bergerak di isu penegakan dan pemajuan HAM, yang biasa kita sebut PPHAM. Para PPHAM adalah individu yang berjuang untuk penegakan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Hidupnya lebih didedikasikan untuk sesama manusia, namun seringkali mereka melupakan bahkan tidak memenuhi hak-hak pribadinya. PPHAM juga rentan akan kekerasan, ketidakadilan, dan ketidaknyamanan lainnya yang akhirnya memunculkan kesadaran bahwa sebagai PPHAM, mereka juga harus memperjuangkan kesentosaannya.

Kesentosaan, sebuah kata yang asing bagi para PPHAM. Hampir 24 jam aktivitasnya hanya untuk kerja-kerja pendampingan. Dari alat komunikasi yang selalu *stand-by*, waktu yang tiba-tiba harus direnggut karena panggilan darurat, tenaga yang *full* stamina bak kutu loncat yang harus pindah lokasi bergantian, bahkan pikiran yang terkuras untuk mencari strategi yang cocok demi kepentingan terbaik pasien dampungannya.

Pasien? Iya. Yu Awi bukan cuma memberi dampingan hukum. Orang seperti ini juga mendampingi hingga tahap pemulihan, baik pemulihan fisik, psikis maupun sosial.

Tidak banyak PPHAM yang bekerja di bawah naungan instansi yang stabil secara operasional kelembagaan. Bahkan mayoritas berada di lembaga yang tidak selalu stabil pendanaan. Tidak sedikit yang bekerja secara individu karena kepeduliannya pada persoalan perempuan.

Burn out di tengah-tengah penanganan kasus sering terjadi, dan penguatan kesehatan mental kadang dilakukan saat para pendamping saling bertemu. Itu pun dengan cara-cara informal: entah nonton bioskop bersama, silaturahmi, masak bersama, dan aktivitas ringan lainnya yang mampu sesaat melepaskan penat.

Perisai HAM menjadi wadah bagi PPHAM untuk melakukan advokasi bagi hak-haknya sendiri. Mulai dari advokasi di lembaganya, hingga di level pemerintah maupun instansi lainnya. Jaminan perlindungan sosial menjadi kebutuhan dasar bagi mereka. PPHAM sehat tentunya akan memaksimalkan potensi sumber dayanya untuk pemenuhan



dan perjuangan HAM. PPHAM terlindungi tentunya akan memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketentraman dalam beraktivitas.

Keselamatan, kenyamanan dan ketentraman inilah yang kita sebut dengan kesentosaan.

Sejauh ini, Perisai HAM memulai langkahnya dengan melakukan audiensi ke perangkat daerah yang membidani urusan perempuan. Sosialisasi juga dilakukan ke Badan Pemberi Jaminan Perlindungan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hingga pendekatan ke perusahaan yang sevisi agar dapat mendukung PPHAM lewat dana tanggung jawab sosialnya.

Meski baru seumur jagung, kampanye ini perlahan mulai berbuah hasil. Lembaga layanan dan organisasi yang kami dekati mulai berangsur-angsur menyediakan setidaknya anggaran jaminan perlindungan sosial, baik ditanggung sepenuhnya ataupun dengan skema *cost sharing*.

Langkah besar yang kami sasar adalah memastikan adanya perlindungan hukum bagi hak-hak para PPHAM. Di konteks Jawa Tengah, wilayah kerja kami, upaya advokasi kami didukung oleh kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah no. 24 tahun 2022. Pada Pasal 12 di aturan tersebut, pemerintah daerah “berkewajiban melindungi hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia perempuan dan anak



korban atau pendamping perempuan dan anak korban.” Selain memastikan hak-hak mendasar seperti perlindungan keamanan dari ancaman dan kekerasan, hak ini juga mencakup hak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

Berpijak dari peraturan gubernur tersebut, gerakan Perisai HAM Jawa Tengah semakin memiliki *spirit* juang yang tinggi dan menimbulkan rasa saling mendukung antar PPHAM agar dapat menggapai kesentosaan. Baik berupa keamanan dari ancaman dan kekerasan, jaminan perlindungan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, hingga layanan lainnya seperti layanan psikologis untuk menjaga kewarasan mental PPHAM.

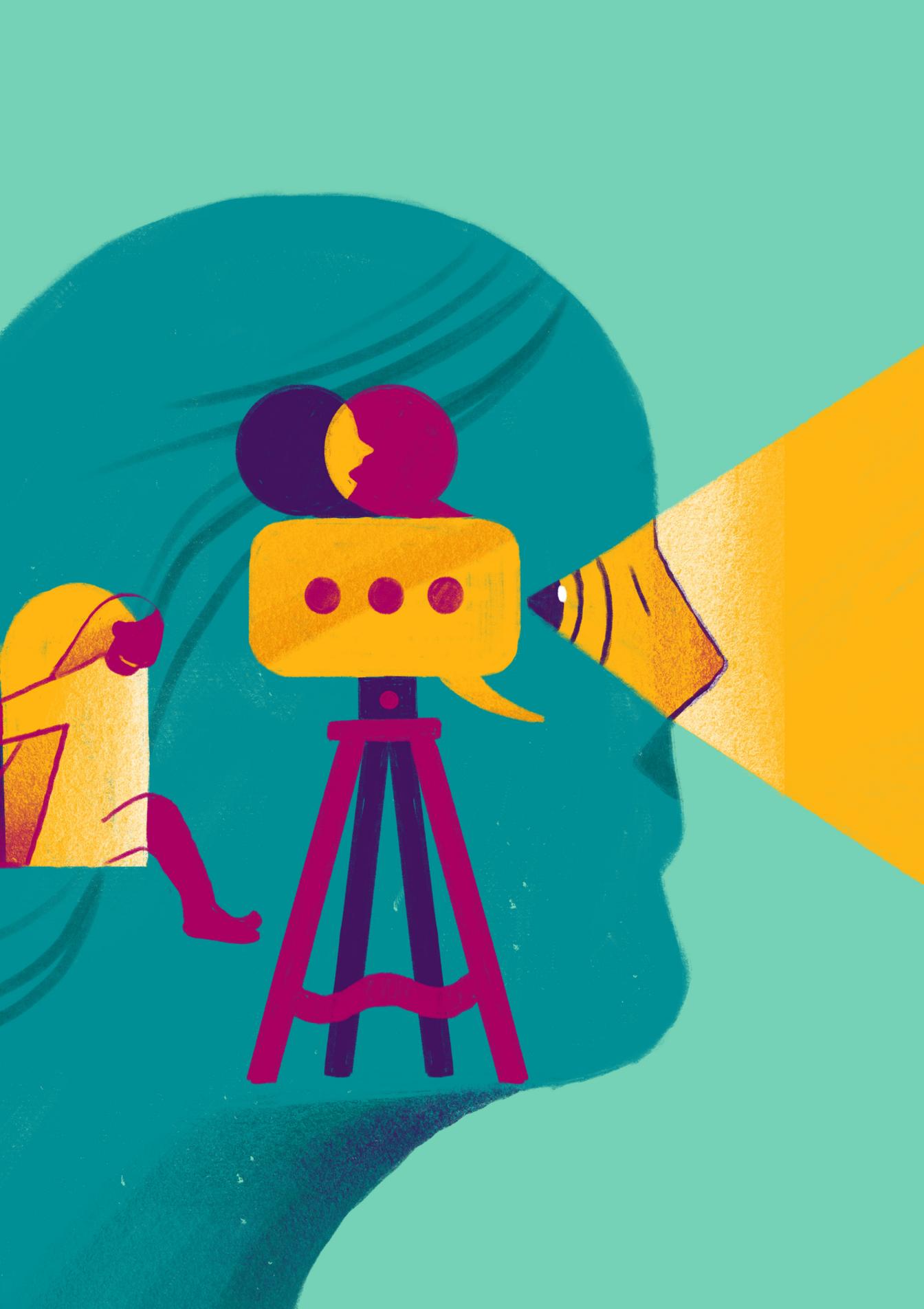
Langkah panjang namun tidak mustahil untuk dilaksanakan. Atas nama pemenuhan dan perjuangan hak asasi, kini saatnya memperdulikan diri sendiri dan semakin *self love* untuk bisa memberikan sisi terbaik dari sumber daya yang dimiliki. Mimpi perjuangan yang tinggi, dimulai dari kita sendiri dan sekarang, bukan nanti. (*)



MENGENALKAN PENTINGNYA AKSESIBILITAS DAN PERJUANGAN MENUJU SINEMA INKLUSIF

Ahmad Fauzi
Minikino





Sejak kecil, Elin sudah menonton film lewat televisi dan DVD, tapi ia hanya menikmati visual dan ekspresinya. Baru pada 2016, setelah ia beranjak remaja, ia pergi ke bioskop untuk menonton film luar negeri – dan hanya film luar negeri.

Ada alasan bagus kenapa Elin hanya mau menonton film luar negeri. Ia seorang Tuli, dan film Indonesia belum tentu ada takarir (*subtitle*)-nya.

Menonton film memang dipandang sekadar sebagai hiburan, sehingga kita lupa ada perjuangan di baliknya. Ada asumsi yang salah tentang komunitas Tuli dan tunanetra bahwa mereka tidak suka atau bahkan “tidak bisa” menonton film. Padahal nyatanya, mereka juga penonton film, mulai dari di TV, *smartphone*, dan juga ke bioskop. Oleh karenanya ruang menonton yang inklusif harus terus diupayakan.

Kenyataannya, di industri film Indonesia kebutuhan atas takarir hanya dipahami sebatas untuk penerjemahan saja.

Belum banyak yang menyadari kalau takarir juga bagian dari upaya untuk membuat film menjadi lebih inklusif dan aksesibel. Aktivisme atau advokasi untuk menghadirkan takarir untuk orang Tuli atau *closed caption* (CC) terus digalakan di dalam tubuh komunitas Tuli itu sendiri.

Hal yang membedakan takarir pada umumnya dengan CC adalah, selain menyampaikan informasi dialog seperti takarir pada umumnya, teks CC juga memberikan informasi bunyi-bunyian (*audio*). Semisal “suara hujan”, “suara mobil datang”, atau “suara teriak dari jauh” yang memberi konteks penting dalam cerita filmnya.

Ketika saya berkenalan dengan Elin di Yayasan Kino Media (Minikino), Elin bercerita lebih jauh tentang suka-duka teman-teman Tuli memperjuangkan hak atas CC. Elin misalnya bercerita kalau teman-teman Tuli di Jakarta mengadvokasi film Indonesia supaya ada CC-nya. Pada 2018, misalnya, komunitas Tuli secara khusus meminta CC untuk film *Dilan* dan *Dua Garis Biru*. Terkini, komunitas Tuli di Jakarta meminta [Rumah Produksi Falcon](#) menyediakan takarir untuk film *Miracle in Cell No. 7* (2022).

Selain orang Tuli, orang tunanetra juga butuh jembatan untuk memahami film melalui *Audio Description* (AD). AD adalah narasi audio yang mendeskripsikan adegan juga informasi film dan video yang relevan. AD mengasumsikan bahwa penonton tidak dapat melihat elemen visual utama, sehingga



biasanya AD dibuat langsung bersama pembuat film dan diskusi langsung bersama orang tunanetra langsung agar narasinya tepat dan tidak melenceng.

AD juga menyesuaikan dengan realita teman-teman tunanetra. Misalnya, dalam AD teman-teman tunanetra tidak butuh deskripsi warna dan juga deskripsi yang terlalu padat. Bila apa yang terlihat di gambar ada "seorang perempuan menggunakan baju hijau duduk di pinggir pantai", dalam AD bisa dipersingkat: "seorang perempuan duduk di pinggir pantai," karena deskripsi warna tidak terlalu penting bagi orang tunanetra.

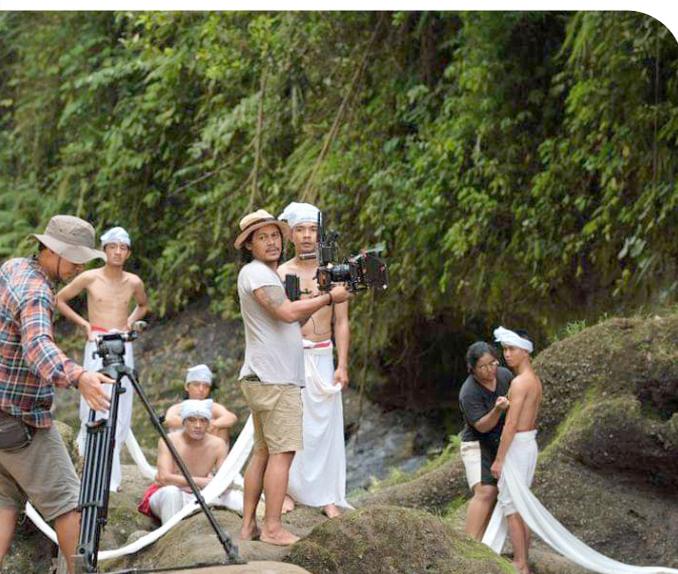


AD dianggap lebih baik daripada metode yang lebih lazim, yakni bioskop bisik. Dalam metode tersebut, seorang relawan akan membisikkan adegan-adegan dalam film kepada penonton yang tunanetra. Tapi, metode ini punya berbagai kekurangan. Selain memerlukan relawan dengan jumlah memadai, deskripsi adegan belum tentu sesuai dengan maksud pembuat film, sehingga dikhawatirkan maksud dari filmnya malah melenceng. Penyampaian antara satu relawan dengan yang lain juga bisa saja berbeda dan mengubah nuansa film. Dengan AD, pengalaman menonton film bisa makin menyenangkan tanpa mengubah kualitas film yang dibuat oleh pembuatnya.

Sebagai festival film pendek internasional, kesadaran-kesadaran ini mendorong Minikino untuk terus berupaya membangun ruang menonton yang lebih inklusif.

Setiap tahunnya, kami menerima ratusan film pendek dari berbagai negara. Tidak lupa di mana bumi dipijak, agar bisa dinikmati oleh seluruh penonton Indonesia, Minikino selalu membuat takarir Bahasa Indonesia. Karena dengan begitu, pertukaran pengetahuan dan budaya dapat terjadi ketika takarir ada untuk menjembatani.

Sejak tahun 2019, Minikino juga secara aktif membuat CC untuk beberapa pemutaran khusus agar orang Tuli dapat ikut menonton film. Dan sejak tahun 2020, Minikino telah berkolaborasi dengan beberapa produksi film pendek fiksi dan dokumenter Indonesia, untuk menerbitkan kembali film dengan AD yang memberi akses bagi tunanetra.



Artivisme dari film pendek *Where the Wild Frangipanis*

Dalam proses produksinya, Minikino selalu melibatkan teman Tuli dan tunanetra untuk membantu dan memberi masukan. Salah satunya adalah pembubuhan AD dalam film pendek *Where the Wild Frangipanis Grow* (2023) karya Ida Bagus Nirartha Bas Diwangkara, yang terwujud berkat dukungan dari Voice Global Indonesia dalam program *artivisme*.

Pada 4 Mei 2023, Minikino mengajak Iwan Cahyadi dan Jerry Juliawan dari komunitas Teratai untuk memberi masukan terhadap AD yang dibubuhkan di film. Komunitas Teratai adalah komunitas tunanetra yang aktif untuk mendukung orang-orang di komunitasnya agar bisa berkarya dan swasembada.

Saat *Where the Wild Frangipanis Grow* yang sudah disematkan AD dipertontonkan pada Iwan dan Jerry, mereka memberi masukan agar suara di AD jangan terlalu padat mendeskripsikan apa yang terlihat. Misalnya Iwan memberi masukan, "saya mau dengerin suara *back sound* kayak air mengalir, supaya kita bisa berimajinasi, 'Oh sedang di sungai.'" Lalu Jerry menambahkan, "Mungkin nggak semua harus dijelaskan yang ada di layar itu. Biar diberikan celah untuk imajinasi."

Membubuhkan AD dan juga CC pada film pendek *Where the Wild*

Frangipanis Grow menjadi penting karena isu yang diangkat dalam film tersebut adalah isu kekerasan seksual yang bisa menimpa siapa saja. Ketika saya berbincang dengan Nirartha, film pendek *Where the Wild Frangipanis Grow* sendiri berangkat dari kegelisahan Nirartha sebagai sutradara karena dua alasan. Pertama, Nirartha sebagai orang yang lahir dari keluarga pendeta sering merasa resah, kenapa segala ajaran yang baik agar menjadi orang suci, kerap kali bertolak belakang dengan apa yang dia hadapi. Kedua, kegelisahan itu kian menjadi-jadi ketika banyak berita yang mengangkat isu *sulinggih* (pendeta) melakukan kekerasan seksual kepada umatnya.

Nirartha sendiri sadar jika film ini bisa dijadikan alat edukasi bahwa kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapapun dan oleh siapapun, termasuk kawan-kawan disabilitas. Menurutnya "bahkan misalnya kalau korbannya laki-laki, itu biasanya sangat malu untuk cerita hal ini. Karena ada *toxic masculinity*." Baginya kekerasan seksual tidak mengenal gender, tidak mengenal Tuli, atau tunanetra, semuanya

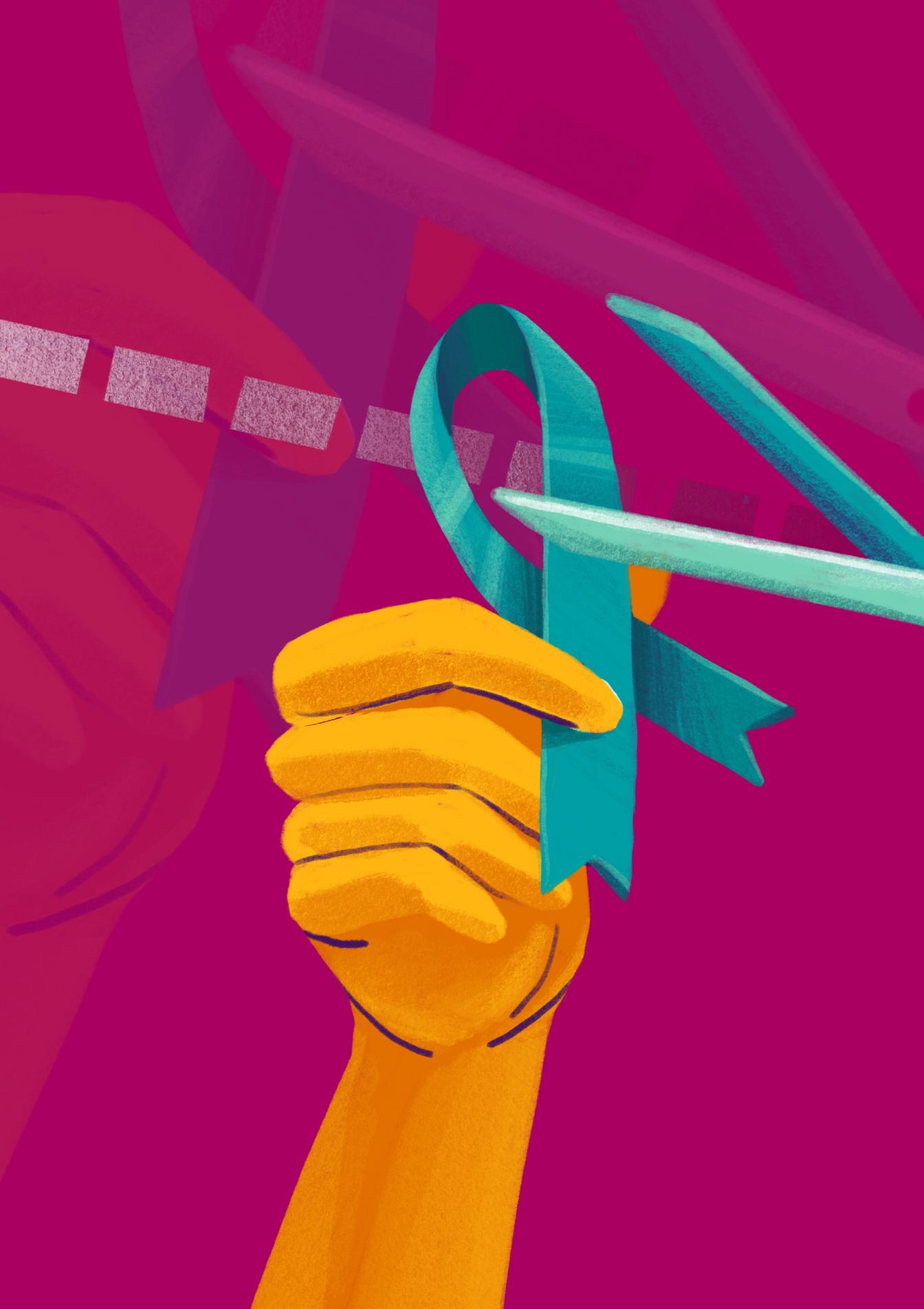


tentang kuasa dan semua bisa kena. Sehingga Nirartha dan Minikino, menganggap penting untuk menemani film ini dengan AD dan CC.

Untuk itu, film pendek *Where the Wild Frangipanis Grow* akan melakukan *roadshow* ke beberapa wilayah di Bali dan juga di luar Bali. *Roadshow* ini menjadi ajang pertemuan reflektif sekaligus upaya untuk terus terhubung dan belajar. Saat *roadshow* di Bali, tim kerja akan ditemani Juru Bahasa Isyarat Denpasar. Sehingga penonton Tuli dan tunanetra yang juga ikut diundang dalam pemutaran, bisa ikut terlibat dalam diskusi tentang isu kekerasan seksual juga selain sekedar menonton.

“Setiap wilayah atau kota memiliki keunikannya masing-masing, sehingga meski isu kekerasan seksual itu universal, tapi dia sangat kontekstual sesuai karakter budayanya,” ucap Nirartha. “Karena itulah kita butuh pertukaran informasi.”

Akses akan informasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual memang semestinya adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Meskipun pada kenyataannya pengetahuan ini menjadi privilese beberapa orang saja yang memiliki akses terhadapnya. Perjuangan atas aksesibilitas seperti pembubuhan takarir, CC, AD yang dilakukan oleh Minikino pada film-film pendek, merupakan langkah kecil untuk membuka jalan agar percakapan-percakapan ini bisa dijalani setiap orang. (*)



TARIK-ULUR MEMPERJUANGKAN HAK-HAK DISABILITAS DI DKI JAKARTA

| Rifky A. Irmanda
Perhimpunan Jiwa Sehat



Sejak berdiri tahun 2008, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS) adalah organisasi pertama yang diinisiasi dan dijalankan oleh penyandang disabilitas dengan tujuan mengadvokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental di Indonesia.

Perjuangan kami tentu tidak berdasarkan angan-angan semata. Hak penyandang disabilitas sudah diatur dalam konvensi internasional melalui CRPD (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Untuk itulah salah satu cabang PJS di Jakarta melakukan koordinasi dengan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Jakarta untuk menyusun DIM (Daftar Investasi Masalah) Raperda Disabilitas DKI Jakarta. Hasil dari penyusunan DIM tersebut akan menjadi sebuah usulan yang akan disampaikan kepada Pemda DKI, yang sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait hak-hak disabilitas.

Pada mulanya, proses urun rembuk ini berjalan lancar. Berbagai poin berbeda disampaikan oleh kelompok-kelompok disabilitas berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Sebagian mengusulkan ada aturan terkait perlindungan sosial, ada pula yang ingin Perda membahas biaya kehidupan tambahan bagi penyandang disabilitas.

Hasil dari penyusunan DIM tersebut rencananya akan menjadi usulan yang disampaikan pada Pemda DKI Jakarta. Harapannya adalah Perda DKI Jakarta akan menjadi Perda disabilitas terbaik dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Namun, jalan kami tidak semulus rencana semula. Pada Agustus 2022, PJS Pusat dan DKI Jakarta mendapat bocoran bahwa Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) Disabilitas mengalami banyak perubahan setelah melewati proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak hanya berubah drastis, versi baru Perda mengebiri hak-hak penyandang disabilitas yang telah dipetakan melalui proses fasilitasi.

Ketika kami menelisik lebih detail perubahan yang dilakukan oleh Kemendagri, kami langsung terhenyak. Pemerintah pusat menghapuskan begitu saja pasal-pasal esensial yang telah diperjuangkan oleh kelompok disabilitas berdasar pada alasan normatif, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas DKI Jakarta.

Kemendagri, misalnya, menghapuskan pemberian konsesi bagi kelompok disabilitas untuk bidang pajak kendaraan bermotor dan kredit perumahan rakyat – sesuatu yang seharusnya adalah bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah juga menghapuskan pasal

tentang Dewan Disabilitas Jakarta (DDJ), dengan alasan DDJ mengambil tugas dan fungsi Komisi Nasional Disabilitas.

Padahal, DDJ sebagai lembaga non-struktural yang independen memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi implementasi Raperda DKI ini. DDJ dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu melakukan pengawasan dan perumusan kebijakan yang bersifat multisektor, dan seharusnya atas prinsip otonomi daerah menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Yang lebih mengherankan lagi, pada Perda DKI Jakarta yang berlaku sebelumnya sudah ada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) yang sama konsepnya dengan DDJ.

Kemendagri juga memangkas bantuan bagi penyandang disabilitas. Beasiswa pendidikan bagi penyandang disabilitas hanya dibatasi pada penyandang disabilitas yang berprestasi dan secara ekonomi tak mampu, bukan terbuka untuk umum. Dalam hal ini, Kemendagri menafikan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas – terlepas latar belakangnya – masih belum mendapatkan akses terhadap pendidikan. Berdasarkan data BPS Tahun 2020, 29.35% Penyandang Disabilitas tidak tamat pendidikan dasar dan hanya 3.38% yang menamatkan pendidikan tinggi.

Pasal-pasal lain yang kunci juga dipotong oleh Kemendagri. Kuota minimal tenaga kerja disabilitas yang tadinya disepakati ada di angka tiga persen dipotong jadi dua persen. Kuota pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda bagi UMKM milik Penyandang Disabilitas yang tadinya lima persen dihilangkan. Layanan rehabilitasi harian yang tadinya diwajibkan ada di setiap kecamatan juga berubah jadi



pada setiap Kabupaten. Jaminan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pun seolah tidak menjadi kewajiban lagi bagi pemberi kerja.

Akhirnya tanggal 31 Agustus 2022, PJS Jakarta ikut serta berkoordinasi untuk mengeluarkan siaran pers Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) DKI Jakarta dan Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang diserahkan kepada Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta. Pada September 2022, PJS Jakarta pernyataan pers terkait Raperda DKI Jakarta yang diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta.

PJS Pusat dan PJS Jakarta lanjut melakukan aksi dan audiensi ke Kemendagri. Dalam kegiatan aksi dan audiensi ini, PJS Jakarta mengorganisir OPD lain seperti Pertuni, PETKI, Gerkatin dan PPDFI. Sebanyak 70 orang yang terdiri dari disabilitas psikososial, disabilitas fisik dan sensorik turun ke jalan untuk menuntut pemerintah mengembalikan Raperda yang sudah sesuai kesepakatan semula. Aksi ini pun diliput oleh media nasional seperti Tempo dan CNN Indonesia.

Sayang, hasilnya tidak sesuai harapan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah diakomodasi dalam draft Raperda DKI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI) justru dengan mudah menerima

dan menyetujui saran fasilitasi dari Kemendagri. Koalisi OPD DKI Jakarta tidak lagi mendapatkan informasi dan ruang untuk terkait dengan fasilitasi Kemendagri terhadap DKI tentang Hal ini menyebabkan Raperda versi kedua jadi melenceng dari semangat awal dan kering makna.

Mau tidak mau, kami menyampaikan pernyataan keras. Koalisi OPD DKI Jakarta menyatakan bahwa Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta telah mengabaikan dan mengkhianati aspirasi penyandang disabilitas secara substantif, sistematis, dan prosedural.

Kami pun kompak menolak saran fasilitasi dari Kemendagri atas Raperda DKI tentang Disabilitas, dan mendesak mereka untuk menarik hasil fasilitasi yang sudah diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta, memperbaiki substansi Raperda DKI dengan mengembalikan pasal-pasal esensial yang menjadi aspirasi penyandang disabilitas, dan melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam proses fasilitasi ke depannya.

Memperjuangkan hak-hak disabilitas memang bukan perkara mudah. Bahkan ketika sudah ada titik cerah, ada saja yang memaksa kami untuk mundur tiga langkah. Namun, bukan berarti perjuangan kami sia-sia, dan jelas bukan berarti perjuangan kami akan berhenti. (*)



bicara
hasil
dari

Raperda
Disabilitas.



Membikin Abadi yang Kelak Retak: Kisah Pemuda dan Lansia Dari Tanah Karawang

Tati Sulastri & Nurul Aeni

Konsorsium PPSW Pasoendan Digdaya & Pusat Sumber Daya Komunitas/PSDK



Sore itu aku menerawang jauh ke masa silamku, 20 tahun lalu. Di rumah, aku tinggal bersama ibu dengan kakek yang sudah berusia senja. Ketika melihat ibu mengurus kakek di rumah, aku memandang sebelah mata. Aku tak mau membantu saat ibuku kesusahan menggantikan popok kakek atau memindahkan kakek dari posisi tidur menjadi bangun. “Bukankah itu sudah seharusnya urusan anak-anaknya kakek?” gumamku.

Melihat kakek yang sudah renta, dengan kulit keriput, rambut putih dan rontok serta gigi ompong, aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak pernah menemani kakekku berbincang, karena bagiku pertanyaan yang beliau lontarkan sangat menyebalkan dan menggangu yang sedang menikmati nonton TV.

Mengingat masa-masa egois itu, aku menghela napas panjang. Tak terasa, butiran air mata menetes di pipiku.

Tahun-tahun berlalu setelah kakek meninggal. Pada 2019, setelah mundur dari salah satu perusahaan garmen, aku bergabung dengan organisasi perempuan bernama Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Pasoendan Digdaya. Aku diterima sebagai staf lapangan, dan mulai mengerjakan program pemberdayaan untuk perempuan pekerja garmen.

Namun pada Agustus 2021, PPSW memintaku mengerjakan sesuatu yang berbeda – Anggaran Desa Bagi Lansia Sehat Sejahtera dan Terampil (ANDIL SAHATE), sebuah program di Karawang, Jawa Barat, yang akan mengharuskanku berinteraksi dengan banyak lansia. Di tempat yang asing bagiku itu, aku akan mendampingi kelompok lansia lokal melakukan proses advokasi anggaran desa untuk memenuhi hak seperti layanan kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

Dari beberapa daerah dampingan, aku terpilih menjadi pendamping di desa



Curug dan Karanganyar, Kecamatan Klari. Daerah yang tengah mengalami pertumbuhan pembangunan dari kawasan pertanian ke kawasan industri, di mana alih fungsi lahan yang masif berdampak pada pendapatan lansia yang sangat mengandalkan pertanian. Aku dan tim mulai terjun ke lapang, melakukan survei terhadap 200 orang lansia, untuk memetakan kondisi lansia di sana sebagai rujukan program ke depannya.

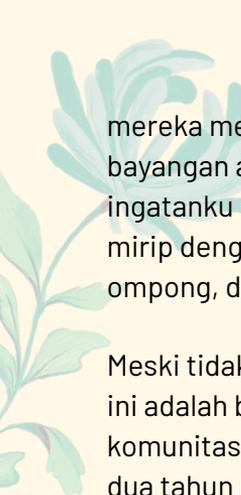
Ketika melihat persoalan mereka lebih dekat, ada rasa bergejolak yang aku rasakan. Mereka bercerita persoalan hidup mereka, bagaimana mereka kesepian saat keluarganya pergi untuk bekerja. Ada yang susah mendapat penghasilan di masa tua padahal mereka masih punya kebutuhan, ada yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang jaraknya jauh padahal mereka kerap sakit-sakitan.

Setelah kami menerima begitu banyak data mentah, aku dan tim mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah desa

setempat. Namun kagetnya, mereka menganggap semua ini wajar. "Sudah jadi lansia, memang kenapa harus dipermasalahan?" seloroh salah seorang aparat desa yang kami datangi. "Toh, sebentar lagi mereka akan meninggal."

Kurangnya kepedulian keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa ini semakin menegaskan pentingnya menciptakan wadah bagi lansia untuk mendapat pengetahuan, menambah kepercayaan diri, dan menyampaikan aspirasinya. Bahkan kelompok ini harus punya anggota beragam – tidak hanya lansia, tapi juga anak muda dan perwakilan keluarga.

Pada suatu pagi, para lansia yang berada di dusun diajak ke rumah salah satu penduduk oleh salah seorang aparat desa yang simpatik. Kuperhatikan sebelum memulai acara, mereka duduk dengan menyelonjorkan kakinya karena sakit. Ada yang hanya diam sepanjang acara, ada yang malu-malu bertanya kenapa mereka dikumpulkan, dan ada juga yang berharap



mereka mendapat bantuan. Tiba-tiba bayangan almarhum kakekku mampir ke ingatanku saat aku melihat sosok yang mirip dengan beliau: kulit keriput, gigi ompong, dan badan membungkuk.

Meski tidak mudah, pertemuan pertama ini adalah bakal dari terbentuknya komunitas Nyekar Desa. Selama dua tahun berikutnya, aku tinggal di Sekretariat PPSW Pasoendan Digdaya di desa Karanganyar, dekat dengan tempat tinggal para lansia yang kudampingi. Setelah melakukan pertemuan kelompok, berkunjung ke rumahnya, dan berkenalan dengan keluarga mereka, aku yang tadinya apatis perlahan mulai memandang mereka secara berbeda.

Sebut saja nama beliau Emak Endoy. Usianya menginjak 68 tahun, dan beliau tinggal di dusun Cariu, Karanganyar. Sosoknya ramah, selalu tersenyum simpul, dan saat berbicara terlihat giginya yang hanya tinggal dua. Beliau tinggal di rumah yang banyak retakan di dinding, lantainya pun tidak ada keramik dan di bagian dapur hanya beralaskan tanah. Sebuah sumur timba tua di belakang rumahnya menjadi sumber air untuknya minum, mencuci, dan mandi.

Emak tidak tinggal sendiri. Beliau tinggal bersama dengan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas mental. Beban emak di masa tua bertambah dengan mengurus anaknya yang sakit. Beliau terus bekerja hampir

sepuluh jam sehari untuk menghidupi dirinya dan putrinya. Lokasi pekerjaannya harus ditempuh 30 menit berjalan kaki, atau jika emak beruntung ada yang menawari memboncengkan. Beliau bekerja di perusahaan limbah plastik air mineral dengan upah Rp30 ribu per hari dengan 6 hari kerja dalam sepekan tanpa jaminan keselamatan kerja.

Emak bercerita betapa beliau merasa lelah, tapi bersyukur bisa bertemu dengan para lansia di Nyekar Desa untuk belajar hal baru, tertawa bersama, dan bercerita apapun yang dihadapi. Sebab di rumah, beliau merasa sendiri. "Emak merasa sedih saat anak emak mengamuk tiba-tiba dengan memporak-porandakan isi rumah, mengeluarkan baju, membuat berantakan barang-barang dapur, sampai dengan berteriak-teriak memaki tetangga dan bahkan emak menjadi sasaran caci maki anaknya sendiri." Kisah emak dengan suara lirih. "Di sini, emak punya keluarga baru!"

Cerita serupa dialami Emak Lasem, seorang lansia soliter di dusun Krajan, desa Curug, yang tinggal di rumah panggung di pinggir sawah. Rumah beliau hanya berisi satu ruangan yang berisi tumpukan barang, sehingga emak sulit bergerak bahkan hanya untuk menyelonjorkan kaki. Terlebih saat malam hari, kadang emak tidur dalam keadaan gelap gulita manakala lampu penerangan



yang didapatinya dari tetangga mengalami kerusakan.

Di usianya yang menjelang 65 tahun, emak menjalani hidup yang tidak mudah. Beliau masih bekerja sebagai buruh tani, dan sudah lama ditinggal oleh suaminya. Karena tidak memiliki keturunan, beliau harus menjalani masa tua dengan kesepian. "Emak hidup sendirian neng, tidak punya siapa-siapa," ucapnya sambil menghela napas. "Andai saja ada bantuan buat Emak."

Saat berjabat tangan dengan beliau, dapat kurasakan permukaan tangan kasar yang menggambarkan pekerjaan berat yang masih Emak jalani. Perubahan besar yang terjadi di Curug pun mulai berdampak padanya. Karena ada alih fungsi lahan besar-besaran dari yang sebelumnya lahan tani menjadi lahan industri, pekerjaan bertani pun tidak beliau dapatkan setiap hari. Bagi Emak, rasa sepi yang melekat pada dirinya seolah hilang sejenak manakala beliau berkumpul dengan lansia-lansia lain di pertemuan Nyekar Desa.

Dengan anggota sekitar 20 orang lansia di setiap dusun, Nyekar Desa bertemu sebulan sekali di balai desa. Pertemuannya tidak lama – hanya memakan waktu paling lama dua jam saja. Tapi rentang waktu itu saja sudah butuh pengorbanan. Tidak mudah memang bagi



para lansia untuk bertahan selama dua jam dengan menahan kantuk, pusing, panas pada punggung, dan harus membuka telinga lebar-lebar.

Lucunya, sering kulihat Emak-Emak yang sudah mengalami penurunan pendengaran ikut tertawa saat teman-temannya bercanda. Bukan karena ikut terhibur, tapi karena menurutnya tawa teman-temannya lucu!

Tradisi kami adalah melakukan senam lansia, lengkap dengan tari-tarian seru, sebelum pertemuan dimulai. Selain untuk membangun suasana, gerakan senam diharap bisa menyehatkan tubuh para lansia. Selepas senam, kami memulai pembelajaran kelompok. Materi yang kami pelajari bersama di antaranya adalah motivasi berkelompok, kesadaran isu gender, pentingnya menyampaikan pendapat, hak-hak dasar lansia, menjaga kesehatan dan kebugaran, kearifan lokal, dan lainnya.

Favorit mereka adalah di sesi tentang kearifan lokal. Para lansia terlihat lebih bergairah dengan mendongeng tentang desa-desa mereka di masa lalu. Ada Emak yang menyanyikan lagu daerah seperti "Tokecang" dan "Cing Cangkeling", dan ada kelompok yang ramai-ramai memeragakan permainan jadul bernama *kaulinan barudak lembur* atau biasa juga dikenal sebagai permainan bernama *Oray-orayan*.



Pada permainan ini, para lansia berdiri dengan saling memegang pundak teman di depannya, membuat barisan panjang seperti ular, dan melewati terowongan yang dibuat oleh sepasang temannya yang lain. Semua orang akan bernyanyi, dan saat nyanyian berhenti, terowongan itu akan berusaha menangkap si ular. Permainan ini sukses bikin para lansia terpingkal-pingkal!

Syukurnya, pemerintah desa pun melunak. Lansia mulai berangsur-angsur diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi di forum musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Perubahan besar juga terlihat di kehidupan pribadi para lansia. Tak sedikit anggota Nyekar Desa yang mengaku mengurangi minum kopi dan merokok dan melakukan gerak senam mandiri di rumah. Satu kelompok lain dengan bangga bercerita bahwa mereka baru saja memulai tabungan bersama.

Terpenting, mereka bisa menerima diri sebagai lansia. Menjadi lansia dengan segala keterbatasan dan tantangannya memang tidak mudah. Tidak satu-dua orang saja di kelompok kami yang mengaku bahwa menjadi pesakitan dan menua terasa seperti kutukan.

Aku sampai teringat ucapan seorang lansia yang awalnya ogah-ogahan ikut Nyekar Desa. "Emak ingin segera mati saja," ucap beliau saat kami bertanya tentang hidupnya. "Teman-teman emak sudah tidak ada semua. Emak sudah terlalu lama di dunia."

Pengalaman mendampingi kelompok lansia di Karawang telah mengubah pandangan dan sikapku terhadap mereka. Kesadaran yang hakiki bahwa usia lanjut bukanlah suatu kelemahan, melainkan masa yang sarat dengan pengalaman dan kebijaksanaan.

Meski kehidupan lansia seperti Emak Endoy dan Emak Lasem begitu berat, tetap ada kebahagiaan yang terpancar saat mereka bercerita. Ada yang bercerita tentang pernikahan mereka yang langgeng, cucu mereka yang menggemaskan, hingga pencapaian anak-anak mereka. Dari cerita mereka, aku belajar bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam setiap tahap kehidupan, meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat.

Para lansia di Karawang juga membuka mataku tentang kebijaksanaan yang mereka miliki. Dalam kata-kata mereka, terkandung hikmah berharga tentang bagaimana menghargai waktu, membangun hubungan yang kuat dengan sesama, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Mereka memberikan inspirasi dengan sikap positif dan ketabahan yang mereka tunjukkan dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup.

Mendampingi kelompok lansia bukan hanya tentang memberikan bantuan praktis, tapi juga soal memberikan perhatian, empati, dan penghormatan yang tulus. Mereka bukan hanya objek kegiatan sosial. Mereka manusia yang memiliki kebutuhan emosional dan sosial yang sama pentingnya seperti kita semua.

Sebelum setiap pertemuan Nyekar Desa, aku selalu bertekad bahwa di hari itu, aku harus bisa membuat para lansia tertawa bahagia saat berkumpul. Aku sendiri tidak menyangka bisa begitu menikmati proses ini. Andai saat ini almarhum Kakek masih ada. Mungkin kini, sikapku akan jauh lebih baik padanya. (*)



IBU, PENDUKUNG UTAMA DALAM PERJUANGANKU

Adamar Ghofari Ananda, JTID
Konsorsium Brave





Saya dan Ibu punya hubungan yang baik, namun ada satu hal yang belum kami bicarakan secara terbuka: pekerjaan saya sebagai seorang aktivis transgender. Saya adalah seorang transgender pria, namun hal ini pun belum sepenuhnya saya sampaikan kepada Ibu. Kami belum pernah bisa sungguh-sungguh menyampaikan perasaan satu sama lain dan saling bicara tentang identitas dan peran saya sebagai transgender dan aktivis.

Pada suatu pagi yang cerah, keluarga saya bersiap menghadiri acara Family Support yang diadakan oleh Jaringan Transgender Indonesia (JTID), sebuah organisasi yang berfokus pada pemenuhan dan perjuangan hak-hak transgender di Indonesia. Kegiatan ini memberikan harapan baru bagi kami berdua.

Sejak lama, saya merindukan momen di mana keluarga kami bisa duduk bersama dan benar-benar mendengarkan satu sama lain. Kegiatan ini menjadi momen berarti bagi kami berarti bagi kami untuk membuka diri, saling mendengarkan, dan berbagi pengalaman. Saya ingin Ibu memahami lebih baik mengenai pekerjaan saya sebagai aktivis transgender, melihat bagaimana pekerjaan saya mempengaruhi hidup saya, dan mengetahui betapa pentingnya dukungan keluarga dalam memberikan

kekuatan dan semangat dalam perjuangan ini.

Terlebih dari itu, saya berharap menemukan ruang untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang perasaan dan harapan kami masing-masing. Saya berharap bisa menjelaskan lebih rinci tentang apa yang saya alami sebagai seorang transgender pria. Namun di sisi lain, saya juga ingin mendengarkan perspektif Ibu dan memahami perasaan dan harapannya sebagai seorang Ibu yang mencintai saya.

Dengan memperdalam pemahaman dan komunikasi di antara kami, saya yakin hubungan kami akan menjadi lebih kuat dan harmonis.

Kami tiba di lokasi acara di Yogyakarta, yang terletak di tengah alam yang menyejukkan. Saya bisa merasakan getaran kehangatan dan kepedulian saat tim JTID menyambut kami dengan senyuman. Mereka dengan penuh kasih menjelaskan agenda acara selama empat hari yang akan datang. Ini termasuk sesi curhat harian dengan keluarga terdekat.

Hari pertama dimulai dengan perkenalan dan interaksi dengan keluarga lain yang menghadiri acara ini. Kami ditempatkan dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga untuk memperkenalkan diri dan berbagi

kekhawatiran, harapan, dan cerita kami. Saya merasa nyaman dan aman di tengah kelompok ini, karena kami semua memiliki pengalaman yang mirip dan saling memahami.

Hari kedua dimulai dengan sesi curhat pertama dengan keluarga saya. Di dalam ruangan yang nyaman, kami duduk bersama, siap untuk berbagi pikiran dan perasaan kami. Saya mulai berbicara tentang perjalanan hidup saya sebagai seorang individu transgender, tentang perjuangan dan kesulitan yang pernah saya alami, serta harapan dan impian saya ke depannya.

Selama saya berbicara, Ibu saya dan para keluarga yang lain mendengarkan dengan hati yang terbuka. Mereka menganggukkan kepala, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, dan mengungkapkan dukungan mereka. Ada momen yang penuh emosi ketika Ibu saya mengulurkan tangan untuk memegang tangan saya, mengatakan bahwa dia mencintai saya apa adanya. Itu adalah momen yang sangat berharga bagi saya, yang menghapus keraguan dan kekhawatiran dalam hati.

“Saya cuma punya Adam, bagaimanapun dia saya tetap menyayanginya, saya tahu Adam menjadi seorang transgender pria karena dia ingin melindungi saya, Adam anak yang kuat,” ujar Ibu di depan peserta kegiatan lainnya, yang membuat saya meneteskan air mata bahagia.

Hari-hari berikutnya terisi dengan sesi curhat tambahan, diskusi kelompok, dan lokakarya yang dipandu oleh para ahli dalam bidang transgender dan psikologi keluarga. Kami belajar tentang kesalahpahaman umum tentang transgender, tentang pentingnya mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing, dan bagaimana membangun dukungan yang kuat di dalam keluarga.



Akhirnya hari keempat tiba, yang diisi dengan suasana yang penuh harap dan damai. Kami duduk bersama-sama, melihat satu sama lain dengan mata penuh pengertian dan kasih sayang. Saat itu, saya merasa begitu terhubung dengan keluarga saya. Mereka menerima dan mencintai saya apa adanya, dan saya mengerti tantangan dan perasaan mereka sebagai keluarga.

Melalui kegiatan Family Support yang diadakan oleh JTID, saya merasakan perubahan yang besar dalam hubungan saya dengan Ibu saya.

Sebelumnya, Ibu saya sering kali khawatir dengan pekerjaan saya sebagai aktivis transgender. Dia merasa cemas tentang masa depan saya dan takut bahwa saya terlibat dengan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat umum.

Namun, melalui sesi curhat dan komunikasi yang mendalam selama kegiatan ini, saya dapat membuka hati dan berbagi dengan Ibu saya tentang tujuan dan arti pekerjaan saya sebagai aktivis transgender. Saya menjelaskan dengan jujur bagaimana pekerjaan



▲ Foto saya bersama Ibunda tercinta selepas kegiatan Family Support

ini memberikan saya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak transgender dan masyarakat yang lebih inklusif.

Melihat ketulusan dan semangat saya, Ibu saya mulai mengerti dan melihat nilai dalam apa yang saya lakukan. Dia menyaksikan komunitas yang terlibat dalam acara ini, orang-orang yang peduli dan berdedikasi untuk membawa perubahan positif. Melalui diskusi dan pendampingan yang diberikan oleh tim JTID, Ibu saya menerima bahwa pekerjaan saya memiliki tujuan yang mulia.

Kegiatan ini membantu memperbaiki komunikasi antara Ibu dan saya. Kami



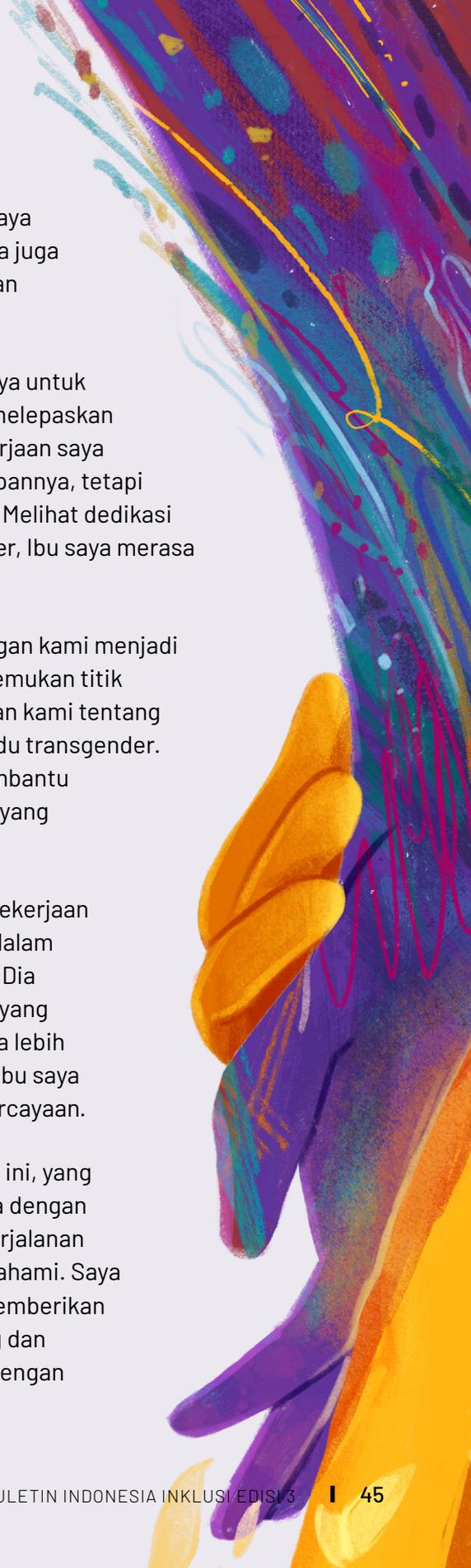
memiliki kesempatan untuk saling mendengarkan tanpa prasangka dan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Saya berbagi pengalaman pribadi saya dan Ibu saya juga menceritakan perasaannya, kekhawatiran, dan harapannya terkait perjalanan hidup saya.

Saat Ibu saya melihat ketulusan dan tekad saya untuk membuat perubahan yang positif, dia mulai melepaskan kekhawatirannya. Dia menyadari bahwa pekerjaan saya bukanlah pekerjaan yang tidak jelas masa depannya, tetapi merupakan panggilan yang berarti bagi saya. Melihat dedikasi saya dalam membantu komunitas transgender, Ibu saya merasa bangga dan mendukung saya sepenuhnya.

Ketika acara Family Support berakhir, hubungan kami menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Kami telah menemukan titik persamaan dan pemahaman dalam pandangan kami tentang kehidupan dan pekerjaan saya sebagai individu transgender. Komunikasi yang terjalin dalam acara ini membantu menghapus kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin ada sebelumnya.

Sekarang, Ibu saya tidak hanya mendukung pekerjaan saya, tetapi juga menjadi pendukung utama dalam perjuangan saya untuk hak-hak transgender. Dia memberikan dukungan moral dan emosional yang sangat berarti bagi saya. Kami berdua merasa lebih dekat sebagai Ibu dan anak, dan rasa cemas Ibu saya telah berubah menjadi kebanggaan dan kepercayaan.

Saya bersyukur atas kegiatan Family Support ini, yang telah membantu memperkuat hubungan saya dengan Ibu saya. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan kami untuk saling menerima dan saling memahami. Saya berharap bahwa pengalaman ini juga akan memberikan inspirasi bagi keluarga lain untuk mendukung dan memahami anak-anak transgender mereka dengan lebih baik. (*)







**KISAH
SEORANG
PEMUDA
YANG
MENGALAMI
KUSTA**

Roni Saputra
PerMaTa Gowa



Pada tahun 2015, saya ditemani kakak mengunjungi klinik spesialis kulit dan kelamin untuk menanyakan bercak ganjil pada kulit saya. Tapi dokter di klinik tersebut mengaku tidak tahu kenapa ada bercak di tangan kanan saya. Beberapa hari mencari jawaban, hasilnya masih nihil. Karena sudah kebingungan, dokternya meminta saya periksa ke Puskesmas. Di sanalah saya tahu bahwa saya mengalami penyakit kusta.

Pihak Puskesmas langsung menghubungkan saya dengan pak Hasrul, seorang petugas kusta. Setelah beliau memberitahu saya dan melakukan sedikit pemeriksaan pada bercak di tubuh saya, saat itu juga beliau memberikan obat. Setelah beberapa hari, muncul bisul-bisul merah yang sangat perih di sekujur tubuh saya. Bahkan terkadang saya tidak bisa tidur karena bisul terasa sangat perih saat menyentuh kain. Setelah sekitar tiga bulan berobat, pergelangan tangan kanan saya mulai sakit, kaku, dan sulit digerakkan.

Selama itu pula saya mengalami hambatan di sekolah. Waktu itu saya mengambil kelas teknik gambar bangunan, tapi untuk menggenggam pensil saja sulit. Tangan saya kaku, terasa diiris silet, ditambah ejekan-ejekan teman sekelas saya yang penasaran apa yang terjadi pada saya.

Ada yang mengejek saya sebagai *kandala*, kata yang berarti “si tangan bengkok”, sambil tertawa-tawa karena tangan saya sulit digerakkan dan agak bengkok. Teman sekelas lain mengatakan saya mengalami penyakit aneh dengan raut wajah yang tampak mengerikan. Bahkan saya dengar ada yang menyebar cerita bahwa saya “sudah mau mati karena sudah berbau tanah.”

Setelah beberapa bulan hidup begini, saya dihubungi lagi oleh pak Hasrul dari Puskesmas. Katanya, ada yang ingin bertemu dengan saya di Puskesmas. Sesampainya di sana, saya dikenalkan



pada dua orang anggota PerMaTa, kak Yuliati (Ketua PerMaTa Gowa) dan Rahmawati (Anggota PerMaTa Gowa). Setelah saling tegur sapa, mereka memeriksa bercak pada tangan dan kaki saya yang mulai menghitam dan menanyakan bagian mana saja yang mulai mengalami mati rasa.

Beberapa minggu kemudian kami bertemu lagi, kali ini untuk belajar cara perawatan diri pasca mengalami kusta. Di sana saya bertemu dengan banyak Orang Yang Menyalami Kusta (OYPMK), mulai dari lansia sampai anak-anak, dan dikenalkan dengan lebih banyak lagi anggota organisasi PerMaTa.

Setelah menghadiri pertemuan tersebut, saya mulai penasaran akan penyakit kusta yang pengobatannya satu Poliklinik dengan tuberkulosis. Saya menemukan gambar jari OYPMK yang sudah tinggal setengah bahkan ada yang sudah tidak ada. Setelah melihat gambar itu,



saya mulai takut karena jari tangan saya sudah mulai bengkok. Saya berpikir, jangan sampai jari saya juga di kemudian hari juga memendek bahkan habis. Akhirnya

karena saking takutnya, saya berhenti mencari info tentang kusta. Saya menolak untuk percaya bahwa saya mengalami penyakit tersebut.

Masa pengobatan saya lalui dengan rasa sakit yang kian bertambah dari hari ke hari. Saya mulai jengkel dengan obat kusta yang bukannya bikin membaik, malah nampak semakin parah. Masa-masa SMK-ku yang awalnya damai saya lalui dengan rasa sakit sampai saya lulus akhir tahun 2016. Pengobatanku juga telah selesai, tapi reaksi obat masih saya rasakan beberapa hari setelah putus obat, jadi saya masih mengonsumsi obat lain yang disebut *prednisone*.

Saya mengambil keputusan nekat. Saban hari, saya membiarkan diri saya merasakan sakit yang luar biasa agar tidak bergantung terus menerus pada obat tersebut. Hingga pada akhirnya, saya sudah terbiasa tanpa obat itu dan tidak merasakan sakit lagi.

Hari-hari saya habiskan di rumah menonton, membaca, mencari info-





info lowongan pekerjaan. Tapi semua pekerjaan untuk lulusan SMA sepertiku memerlukan tenaga besar, sedangkan dengan tangan bengkok seperti ini mustahil untuk mengangkat beban berat lagi. Tapi saya tidak pesimis – saya percaya di balik kekurangan ada kelebihan. Saya hadapi semua itu dengan sabar dan shalat, walau kadang saya menangis karena tak kuasa dengan keadaan. Ditambah lagi, ayah saya sulit berjalan karena beliau mengalami kecelakaan motor. Beliaulah yang kerap mengantar saya ke Puskesmas untuk mengambil obat sampai selesai pengobatan.

Saya mulai lega ketika beliau sudah mulai bisa berjalan seperti dulu dan kondisi beliau semakin membaik. Tapi setelah beliau sudah sepenuhnya membaik, pada Desember 2017 Bapak malah pergi untuk selama-lamanya. Kehilangan itu membuatku hampir tak sanggup hidup lagi. Saban malam, saya menutup mata dan berharap semua ini hanya mimpi

burukku. Ketika pagi datang, saya takut membuka mata.

Tiga bulan setelah kehilangan Bapak, saya dihubungi lagi oleh kak Rahmawaty dari PerMaTa. Rupanya sekarang ia ketua PerMaTa Gowa yang baru. Kak Rahmawati mengajak saya untuk ikut dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas anak muda OYPMK di Malino, dengan dukungan Voice.

Dalam kegiatan itu, saya merasa senang bisa dilibatkan dan mengenal anak muda penderita kusta lainnya. Setelah mendengar berbagai pengalaman pahit dan perlakuan tidak pantas yang mereka alami di lingkungan masing-masing (bahkan ada yang sampai mengucilkan diri), saya semakin paham dan merasakan penderitaan dan rasa sakit yang dialami orang yang mengalami kusta. Sejak saat itu, perlahan-lahan saya semakin aktif dan terlibat di PerMaTa.

Di PerMaTa, saya dipercayakan untuk membantu dan memotivasi OYPMK yang lain karena saya juga pernah mengalami kusta. Saya mulai berubah karena bertekad membantu OYPMK. Saya mampu berbicara di depan orang



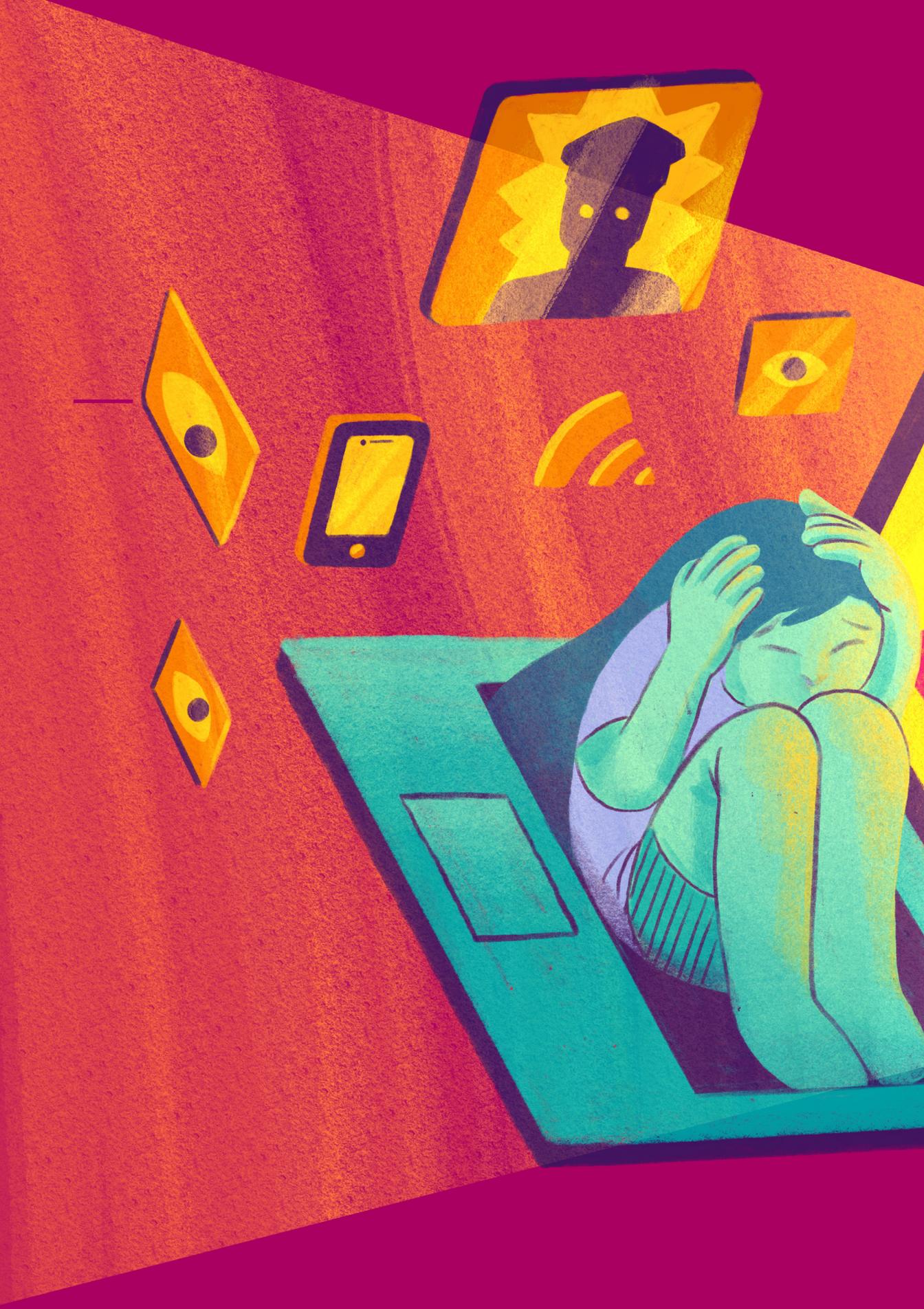
banyak dalam proyek bernama Pakarena, dan sudah diberikan kepercayaan menjadi fasilitator untuk anak muda OYPMK yang sudah kami data untuk menjadi sasaran penguatan kapasitas. Mereka rencananya akan membantu lansia penderita kusta yang membutuhkan bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, saya dipercayakan mendampingi anak muda membantu lansia OYPMK dalam pengurusan surat-surat resmi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain sebagainya. Setelah Pakarena selesai, saya kembali dilibatkan dalam pencarian anak muda OYPMK baru yang tergabung dalam proyek Pakarena jilid 2. Dalam edisi kedua, kami memberikan metode pelatihan yang sama dengan saya sebagai salah satu fasilitator.

Awalnya saya hanya menyendiri, kerap menyulitkan dan menyiksa diri sendiri, dan tak punya niatan untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Namun sejak mengenal dan bergabung di PerMaTa, rasa percaya diri saya tumbuh sedikit demi sedikit. Saya mulai beradaptasi kembali dengan orang lain, terutama di antara teman-teman di PerMata. Keterlibatan saya di berbagai kegiatan Voice mengubah kesedihan saya menjadi kebahagiaan, kesendirian menjadi keramaian, dan kebosanan menjadi hiburan.

Proses berbagi suka-duka dengan teman-teman PerMaTa juga menjadikan kami ibarat saudara yang disatukan oleh keadaan. Saya menjadi pribadi yang baru. Bahkan yang paling menonjol bagi saya pribadi, saya bisa berbicara di depan banyak orang saat mewakili PerMata untuk pertemuan organisasi di Kupang tahun 2021 lalu.

Duh, jangankan bicara depan orang banyak. Gara-gara PerMata, saya berangkat ke luar pulau naik pesawat. Tak pernah terbesit di benakku bahwa suatu hari nanti, saya bakal naik pesawat untuk angkat bicara tentang keadaan teman-teman kusta! (*)



SEHARI DI KANTOR POLISI: MENDAMPINGI KORBAN KBGO

Piu & Sasha Trisha
LBH APIK Jakarta

"Terima kasih telah menghubungi LBH APIK Jakarta, silahkan isi data diri di bawah ini"

Begitulah pesan otomatis yang muncul ketika seorang korban mengirimkan pesan kepada *hotline* LBH APIK Jakarta. Aster, salah satu pengacara publik, kemudian membaca cepat isi pesan singkat itu. Perhatiannya langsung tertuju ke bagian kronologi kasus. Rupanya, laporan yang masuk kali ini adalah kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) – nama untuk jenis kekerasan seksual yang dilakukan melalui *platform* digital dan elektronik.

Chat kali ini adalah kasus yang termasuk paling umum terjadi. Aster menerima aduan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Ini sudah aduan ke-10 yang ia terima di minggu ini.

KBGO merupakan fenomena baru yang tambah ramai di kala pandemi COVID-19. Menurut Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta (2021), KBGO menjadi jenis kasus yang paling sering dilaporkan dalam satu tahun terakhir. Lewat kajiannya, LBH APIK Jakarta pun mengidentifikasi sembilan jenis kekerasan seksual berbasis online yang kerap menimpa perempuan.

Kajian berdasarkan pengalaman dampingan ini menjadi bahan advokasi ketika LBH APIK Jakarta turut serta dalam perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Walhasil, pada Pasal 14 UU TPKS, terdapat pasal yang mencakup persoalan kekerasan seksual berbasis elektronik.





Berbekal pegangan perlindungan hukum baru ini, Aster semangat mengajak Ruby, relawan LBH APIK Jakarta, ke kantor polisi untuk membuat berita acara investigasi.

Sesampainya di kantor polisi, mereka melihat

korban turun dari mobil yang berbeda dan berjalan menghampiri mereka. Ketiganya masuk untuk menjalani pemeriksaan. Di lokasi yang penuh dengan anggota polisi yang berlalu lalang, Aster dan Ruby mendampingi korban dan mencermati setiap pertanyaan yang dilontarkan polisi kepada korban, memastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang kemudian menyudutkan korban.

Salah satu polisi menyadari bahwa Aster melapor dengan UU TPKS, lalu berkomentar. "Oh, ini undang-undang yang baru itu ya, mbak?"

"Betul, pak!" jawab Aster.

Polisi itu tampak heran. Ia tidak paham kenapa Aster mengadukan kasus korban dengan Pasal 14 UU TPKS. "Padahal, mbak bisa saja pakai UU ITE, dan jerat pidananya lebih besar!"

Aster tersenyum kecut. Dengan sabar, ia mencoba menjelaskan bahwa UU TPKS undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Di sana tidak hanya diatur tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan,

melainkan juga bagaimana penanganan, perlindungan, dan pemulihan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual. Aster bersikukuh bahwa hal tersebut juga perlu diperjuangkan, bukan hanya berapa tahun masa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

Korban mungkin belum terlalu paham dengan apa isi UU TPKS yang sering dibicarakan Aster sedari konsultasi awal berlangsung. Namun, yang korban pahami ialah apa yang dialaminya bukanlah permasalahan transaksi elektronik, sehingga tidak seharusnya diatur oleh UU ITE. Bagi korban, apa yang menyimpannya adalah pelukaan terhadap ketubuhannya. Dia hanya setuju ketika melakukan aktivitas seksual, tetapi dia tidak pernah setuju atas perekaman yang dilakukan oleh pasangannya diam-diam.

Aster sebagai pendamping korban kekerasan seksual sejak tujuh tahun lalu mengetahui betul jika proses peradilan pidana bukan proses yang mudah dilalui korban. Hal tersebut juga yang diberitahukan Aster pada korban saat konsultasi awal, ketika korban masih bingung dengan segala macam hal yang dialaminya. Proses berliku inilah yang menjadi alasan banyak korban memilih tidak melanjutkan penanganan kasusnya. Belum lagi jika korban



didiagnosa mengalami gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Kasus KBGO kali ini pun berakhir dengan permintaan pencabutan laporan oleh korban. Korban bukannya tidak ingin mendapatkan keadilan atas kasusnya. Di dalam lubuk hatinya masih tersisa amarah yang teramat sangat kepada pelaku. Namun, korban merasa proses pemeriksaan di kepolisian menambah buruk kondisi gangguan psikisnya. Meskipun Aster dan Ruby telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, korban merasa ia tidak sanggup menjalani pemeriksaan yang melibatkan banyak polisi laki-laki.



Setelah diskusi yang panjang dan informasi yang diberikan oleh pendamping, korban memilih untuk fokus memulihkan dirinya sendiri.

Ini hanya satu dari banyak kasus di mana korban merasa proses peradilan bukan ruang yang ramah bagi perempuan. Pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana ini menjadi catatan penting bagi lembaga layanan. Meskipun UU TPKS sudah ada sebagai pegangan kuat, bukan berarti kenyataan di lapangan serta-merta berubah. Kasus korban dampingan Aster adalah potret kelam implementasi UU TPKS dan semangat-semangat progresifnya.

Pahitnya, kasus ini kerap berulang. Meskipun UU TPKS telah diterbitkan dan kemudian telah menjadi angin segar bagi perlindungan korban kekerasan seksual, namun pada faktanya, penanganan kasus kekerasan seksual masih terhambat di lingkup perspektif aparat penegak hukum. Bagaimanapun aparat penegak hukum lah yang akan menjadi implementor dari UU TPKS. Mereka yang akan menentukan apakah UU TPKS ini justru akan memberikan keadilan bagi korban atau sama saja ketika UU TPKS belum disahkan.



Satu hal yang perlu kita ingat, perjuangan panjang untuk keadilan korban bukan hanya dapat dilakukan oleh pendamping korban di lembaga-lembaga penyedia layanan. Akademisi dan juga Lembaga HAM Nasional seperti Komnas Perempuan juga memegang peranan penting dalam upaya mendekatkan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Akademisi hukum khususnya, dapat berkontribusi dalam memetakan pasal-pasal apa saja yang berpotensi multitafsir ketika digunakan untuk penanganan kasus kekerasan seksual di lapangan. Pemetaan ini berguna untuk selanjutnya menentukan bagaimana seharusnya pasal-pasal tersebut dibaca dan diartikan agar berpihak kepada korban.

Di dalam melakukan penafsiran pasal-pasal UU TPKS yang berpihak kepada korban, akademisi hukum tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya mereka perlu melibatkan pihak-pihak seperti pendamping korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum, serta para aktivis yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Untuk menghindari bias atas dasar geografis, maka akademisi telah mempertimbangkan adanya perwakilan dari masing-masing wilayah Indonesia; barat, tengah, serta timur.

Hasil penafsiran pasal demi pasal UU TPKS yang berpihak kepada korban kemudian akan menjadi salah satu materi dalam modul pelatihan penanganan kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum. Modul pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini disusun oleh Komnas Perempuan. Inisiasi pembuatan modul pelatihan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan mandat UU TPKS, di mana aparat penegak hukum wajib untuk memiliki kapasitas dan keterampilan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Pada akhirnya, modul ini akan menyajikan contoh-contoh kasus dengan kompleksitas tinggi yang tentunya berasal dari kasus-kasus nyata pendampingan yang dilakukan lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami betapa rumitnya kasus nyata dan bisa berpihak kepada korban.

Salah satu kasus yang dipilih, boleh jadi, adalah kasus korban KBGO yang mengadakan nasibnya pada Ruby dan Aster, berbulan-bulan lalu. (*)



LIKA-LIKU ORANG MUDA MENDAMPINGI LANSIA PENYINTAS

Indonesia untuk Kemanusiaan/IKa (Osi Naya Fia),
Sekber'65 (Ariani Purnandari), PBH-Nusra (Yulius Regang)

Konsorsium Better Together



Dua dunia yang seolah berbeda jauh dapat mengalami isu yang hampir sama. Inilah yang dialami Sundari dan Tito, dua orang relawan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang diutus ke lapangan di dua wilayah yang berjauhan. Tito dikirim menuju Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur, sementara Sundari diminta *blusukan* ke Solo, Jawa Tengah. Keduanya bermodalkan isu yang sama: suka-duka mendampingi lansia penyintas Peristiwa 1965.

Kunjungan ini adalah pertama kalinya Tito menjejakkan kaki di Kabupaten Sikka, tepatnya di kantor mitra IKa yakni PBH Nusra. Berbeda dengan rekannya, Sundari sudah beberapa kali mengunjungi kota Solo. Namun ini pertama kalinya ia mampir ke kantor Sekber '65, mitra IKa di Sikka. Setibanya di kantor Sekber, Sundari mendapati pemandangan tak biasa: tidak ada perkumpulan lansia. Hanya ada enam orang relawan, yang satu persatu mengupas tantangan di daerah tersebut.

Orang muda, kisah mereka, gampang saja ditemui di Solo. Namun yang sulit adalah mencari orang muda yang punya empati dan mau menjadi relawan membantu lansia. Regenerasi relawan pun cenderung sulit. "Sebenarnya beban regenerasi ini sudah dialami sejak dulu, ketika kami mulai melakukan kerja-kerja kemanusiaan," curhat salah satu pengurus di Solo.

Pola yang sama terus berulang. Mereka akan menerima relawan, biasanya mahasiswa yang sedang magang. Mahasiswa itu lantas mendapat

pengenalan dan pembekalan awal, tapi setelah selesai magang ia tidak akan lanjut lagi membantu lansia. Dari pusparagam relawan yang berasal dari cucu korban, masyarakat sekitar, hingga anak sekolah, yang bertahan hingga kini hanya hitungan jari.



Regenerasi macet juga diobservasi oleh TIto di Sikka. Setelah bertemu kak Frans dari PBH Nusra, Tito mendapat cerita yang pilu dari pendampingan mereka di lapangan. Sebetulnya PBH Nusra tidak kekurangan kegiatan, namun pendampingan yang dilakukan relawan muda tidak serta merta dapat dilakukan dengan konsisten. Relawan bisa tiba-tiba beralasan tidak berminat lagi berorganisasi dan kurang terasah rasa empatinya. Rata-rata hanya berkumpul ketika ada event yang agak besar, atau ketika mendapat uang transportasi dari program.

Bedanya, di Solo masih ada sosok-sosok tertentu yang nekat. Saat sedang nongkrong di kantor Sekber '65, Sundari menyadari kehadiran sesosok anak muda yang sepertinya sepantaran dengannya. Karena penasaran, Sundari



mengajak perempuan itu berkenalan. Namanya Purwandari, dan ia adalah salah satu relawan muda yang paling gigih membantu Sekber '65 dalam melakukan pendampingan.

“Entah apapun agamanya, berapa pun umurnya, kita semua sama-sama manusia,” ucap Purwandari, meniru semboyan yang pernah ia pelajari dari komunitas ini. Sejak Maret 2021, ia bergabung dengan komunitas Sekber '65. Awalnya ia hanya meneliti untuk kebutuhan tugas kuliah, tapi lama-lama ia tertarik untuk terjun melakukan pendampingan di Rumah Sakit. Lambat laun, ia mempelajari isu lansia penyintas '65 lebih jauh: tentang buku hijau, status korban, hingga proses yang dilakukan agar para penyintas mendapatkan buku hijau dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Purwandari termasuk antusias mengenali kehidupan para lansia yang hidup sebatang kara. Tidak sekali dua kail, ia izin ke komunitas untuk tinggal bersama salah satu penyintas selama seminggu lebih. Salah satu *mbah* yang ia dampingi harus menimba air dari sumur di luar rumah untuk minum maupun mencuci pakaian. Karena iba, Purwandari menggalang donasi publik untuk

membuat sumur bor bagi kebutuhan sehari-hari si *mbah*. Tak butuh waktu lama, ikhtiar itu terwujud.

Kepada Sundari, Purwandari mengeluh bahwa jumlah relawan yang mau mendampingi lansia berobat ke rumah

sakit sangatlah kurang. Pada kloter pertama, misalnya, ada 47 orang lansia dari Klaten dan Karanganyar yang ingin berobat. Mereka disusul 18 orang di kloter kedua dan 30 orang di kloter ketiga. Jumlah relawan yang mendampingi mereka? Lima orang saja.

Purwandari bukannya tidak mencoba menebar jala. Pernah suatu waktu Purwandari mengajak teman kampusnya datang ke Solo untuk mengikuti pendampingan. Namun, kawannya hanya mampu bertahan satu minggu dengan alasan capek mendampingi berobat. Itu pertama dan terakhir kali Purwandari mengajak temannya melakukan pendampingan bersamanya.

Keesokan hari setelah bertemu Purwandari, Sundari diajak mendampingi seorang lansia penyintas '65 yang akan menjalani operasi. Sundari menyaksikan sendiri bagaimana repotnya Purwandari mendampingi sang lansia berobat menggunakan Buku Hijau yang berguna untuk mengakses pengobatan gratis. Bersama sang lansia, Purwandari harus jalan keliling ke masing-masing poli yang dituju untuk setiap penyakit sang lansia.

Rasa kewalahan dan tidak berdaya juga dialami oleh kawan-kawan di Sikka. Program pendampingan terhadap lansia penyintas Peristiwa 1965 mulai dilakukan oleh PBH Nusra pada Oktober 2021. Fokus mereka ada pada tiga desa yang dihuni cukup



banyak penyintas: Ian Tena, Tua Bao, dan Natarmage. Ketika mereka mulai memetakan situasi, kenyataannya sangat mengkhawatirkan.

Lolongan itu masih terekam jelas dalam benak relawan PBH Nusra yang turun ke lapangan, salah satunya kak Frans. Seorang lansia yang mereka temui dengan lugas dan apa adanya melontarkan kata-kata mengejutkan: “*Ami, rehi ba’a* (kami sudah tidak berdaya lagi).” Pada saat itulah, ungkap Frans, timnya paham bahwa lansia-lansia ini tidak pernah terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Hak-hak mereka sebagai warga negara tidak diacuhkan, dan mereka bergantung sepenuhnya pada kebaikan pihak lain.



Kondisi mengesankan ini bukan kenyataan sesaat, melainkan seperti tradisi baru yang sudah berurat akar pada diri lansia-lansia ini. Apalagi penghidupan mereka tidak pasti. Semua lansia penyintas dampingan PBH Nusra berprofesi sebagai petani. Mereka bergantung sepenuhnya pada usaha, kerja keras, dan kebaikan alam. Jika alam tidak bersahabat, hidup mereka terancam.

Salah satu program unggulan pemerintah untuk lansia – di antaranya lansia penyintas – adalah layanan Posyandu Lansia. Namun di Sikka, mereka mengalami tantangan ekstra dibandng di Solo. Akses tempat yang sangat jauh membuat lansia kesulitan dalam memeriksakan kesehatannya.

Banyak lansia yang kurang mendapat perhatian baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.



Mereka tinggal di kebun-kebun, rumah mereka jauh dari sumber air, dan minim penerangan. Hak-hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya tidak menjadi keutamaan.

Aktivitas mengunjungi, menuntun, mengarahkan dan mendampingi lansia saat kegiatan posyandu dan perawatan di Puskesmas atau rumah sakit telah menjadi agenda bulanan CO (*coordinator organizer*) dan relawan muda di tiga desa dampingan. Namun, helaan napas panjang kak Frans seolah cukup untuk mengungkapkan kenyataan sesungguhnya. Relawan di Sikka juga tak konsisten, dan di sana tidak ada sosok seperti Purwandari yang seolah sendirian melawan arus. Hingga kini, relawan muda belum bisa menjadi sandaran dalam membantu lansia penyintas '65.

Setelah kunjungan pada kedua daerah tersebut berakhir, Sundari dan Tito

berefleksi lebih jauh tentang lika-liku regenerasi yang dialami kedua organisasi dampingan mereka. Semakin hari, umur para relawan bertambah dan kehidupan serta tempat tinggal mereka berubah. Menjadi relawan belum tentu selaras dengan masa depan mereka.

Salah satu solusi yang terpikir adalah mendorong kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan relawan yang membantu komunitas di daerah Solo dan Sikka, serta mau memahami isu yang terjadi di sana. Di Sikka, paling tidak gagasan ini mulai mengkrystal dengan terbentuknya Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA Lansia) yang menjadi bantuan sosial bagi lansia.

Namun, jalan masih panjang dan waktu kita untuk mendampingi para lansia ini semakin menipis. (*)





KEMBALI PADA LELUHUR: MENGENAL DESA YANG MENDUKUNG PENGHAYAT MARAPU

Roni Seran
Konsorsium SID-Marungga



Siang itu langit sangat cerah walaupun terlihat awan masih menggantung di beberapa bagian cakrawala. Bulan Maret merupakan masa akhir dari musim hujan di pulau Sumba, namun, padang sabana masih menyuguhkan pemandangan yang segar berupa hamparan rumput hijau seperti permadani. Hari itu, saya telah membuat janji dengan Umbu Tamu, kepala desa Tamburi, untuk berbincang tentang akses sosial dan pendidikan bagi penghayat Marapu di desanya. Meskipun baru berusia 33 tahun, kepala desa muda bernama lengkap Lidu Lakinggela ini sangat serius memperhatikan kehidupan penghayat Marapu di desanya.

Desa Tamburi merupakan sebuah desa kecil di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, yang terletak sekitar 76 KM dari ibu kota kabupaten, Kota Waingapu. Desa ini terkenal karena masyarakatnya yang masih memegang teguh Marapu, kepercayaan tradisional di Sumba. Di

sana, sebagian besar penduduk adalah penghayat Marapu, mencapai 70% dari jumlah penduduk desa tersebut. Mereka

menjalankan ritual-ritual dan warisan budaya seperti tenun ikat dengan motif-motif asli Sumba Timur, serta pembuatan alat musik tradisional Sumba Timur seperti jungga humba dan gunggi.

Marapu merupakan kepercayaan atau agama asli orang Sumba yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum agama Abrahamik masuk ke Indonesia. Penghayat Marapu meyakini bahwa Marapu adalah nenek moyang mereka yang dianggap sebagai jalan, perantara doa, atau Roh yang menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta. Penghayat Marapu menjalankan ibadah yang dikenal dengan istilah Hamayang (sembahyang) di beberapa tempat.

Misalnya, Hamayang di padang untuk memohon kepada Sang Pencipta agar ternak mereka berkembang biak dengan baik; Hamayang di kebun agar tanaman atau hasil panen mereka baik dan berlimpah; dan Hamayang di mata air untuk menjaga agar ketersediaan air tetap lestari. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka melakukan Hamayang di rumah adat masing-masing *kabihu* atau klan yang berhubungan dengan acara kelahiran anak, perkawinan, atau kematian. Penghayat Marapu percaya akan trigonologi atau hubungan tiga elemen, yaitu Manusia dengan Sang Pencipta, Manusia dengan Alam, dan Manusia dengan sesamanya. Mereka menganggap penting menjaga



keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penghayat Marapu, etika kehidupan, larangan-larangan, dan kewajiban adat merupakan hal utama yang harus dijalankan dalam kehidupan mereka.

Sebelum pengakuan resmi terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayat kepercayaan seperti Marapu di pulau Sumba mengalami diskriminasi. Mereka dianggap kafir, penyembah berhala, atau warga kelas dua, dan belum mendapatkan hak-hak seperti layanan sosial dan pendidikan.

Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai pengakuan negara terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah Marapu. Putusan ini memberikan ruang yang lebih baik bagi penghayat Marapu untuk mendapatkan layanan sosial dan pendidikan. Meskipun demikian, pada tahap ini, masih terdapat penghayat Marapu yang kurang percaya diri atau pesimis karena mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan mereka diakui oleh negara.

Sejak tahun 2021, desa Tamburi merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah pengembangan program Lii Marapu yang dikerjakan oleh Sumba Integrated Development dan Yayasan Marungga. Program yang didanai oleh VOICE Global ini, bekerja pada bidang peningkatan akses sosial dan pendidikan bagi penghayat Marapu. Masyarakat desa, khususnya penghayat Marapu di sana, sangat mendukung program tersebut karena berhubungan erat dengan perlindungan dan pelestarian adat sekaligus kepercayaan asli orang Sumba. Demikian juga, pemerintah desa Tamburi sebagai pemerintahan terkecil di negara ini, turut ambil bagian atas pengakuan negara akan penghayat Marapu yang berada di desanya.

Sebelum program Lii Marapu dilaksanakan, belum ada sekolah adat di desa ini, dan anggaran untuk mendukung kegiatan terkait kepercayaan Marapu



sangat minim. Keterlibatan penganut Marapu dalam perencanaan desa juga minim karena tidak adanya Badan Pengurus Marapu di desa. Selain itu, akses ke layanan sosial seperti dokumen kependudukan dan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkeyakinan Marapu tidak tersedia di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Desa ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Umbu Tamu, yang terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2020, merespons secara positif terhadap kegiatan proyek dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung kepercayaan, budaya, dan tradisi Marapu di desa ini. Dia aktif berpartisipasi dalam kegiatan proyek, seperti diskusi dengan tim proyek dan pemimpin adat desa, pemilihan dan pelantikan Badan Pengurus Marapu di desa, serta pelatihan advokasi dan perencanaan di Desa Tamburi. Selain itu, dia bekerja sama dengan BPM Kabupaten dan tim Lii Marapu untuk memantau dan membimbing kegiatan sekolah adat di desanya.

Mendapatkan dukungan anggaran untuk mendukung penghayat Marapu bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak upaya yang dilakukan, seperti melakukan lobi intensif antara pemerintah desa dan penghayat Marapu. Penghayat



▲ Kegiatan Sekolah Adat Marapu Desa Tamburi

Marapu sendiri memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga mereka perlu dilatih agar dapat bersuara dengan percaya diri dan mengadvokasi hak-hak mereka dalam forum resmi di desa, seperti musrenbang dusun, musrenbang desa, dan musrenbang kecamatan.

Dari proses tersebut lahirlah kebijakan strategis untuk mendukung penghayat Marapu di Desa Tamburi, seperti Surat Keputusan Kepala Desa yang menetapkan penyelenggaraan Sekolah Adat Marapu. Selain itu, anggaran dana desa juga mendukung kebutuhan transportasi bagi fasilitator Sekolah Adat Marapu di Desa Tamburi. Pada anggaran pembangunan Desa tahun 2023, alokasi anggaran tersebut mencapai Rp12 juta.

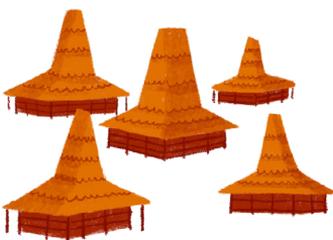


Selain itu, ia juga memberikan dukungan layanan lainnya seperti mendata masyarakat desa Tamburi yang berkepercayaan Marapu guna mengetahui kelengkapan administrasi kependudukan yang mereka miliki, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Identitas kependudukan. Dukungan ini dilakukan guna mengeksikasikan kembali kepercayaan Marapu di desanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 tahun 2016 tentang pengakuan Negara akan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu).

Melalui dukungan program dan kebijakan yang dijalankan oleh kepala Desa Tamburi, saat ini, telah terdapat 62 anak yang rutin mengikuti kegiatan di sekolah adat. Di sekolah adat ini, anak-anak belajar banyak hal tentang budaya Sumba dan kepercayaan Marapu, sesuai dengan buku panduan penyelenggaraan sekolah adat yang telah dikembangkan oleh program Lii Marapu.

“Budaya merupakan kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang,” ucap sang kepala desa di sela-sela pertemuan kami. “Ini seperti fondasi bagi masyarakat kami untuk menjalankan kehidupan sebagai orang Sumba.”

Jauh didalam lubuk hatinya, Umbu Tamu sebagai bagian dari generasi muda berharap, kepercayaan Marapu di desanya dapat tetap terjaga dan tumbuh subur. Selain itu, budaya dan adat istiadat masyarakat Sumba Timur yang diwariskan oleh nenek moyang dapat dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan mereka. (*)



LEWAT FOTO, KAWAN TULI DAPAT "BERBICARA"

Namira Fathya, Kota Kita
Konsorsium Kreasi (GerkatIn Solo,
Kota Kita, dan Ruang Atas)



Pernahkah kamu menjalani satu hari tanpa berkomunikasi dengan orang lain? Mungkin pengalaman pahit ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi teman-teman tuli di Indonesia. Umumnya, tuli di Indonesia berkomunikasi menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) – bahasa yang tidak sepenuhnya sama dengan bahasa verbal yang biasa dipakai teman-teman dengar. Walhasil, teman tuli banyak mengalami hambatan, diskriminasi, dan kesulitan menerima informasi di ruang publik. Apalagi, untuk menyuarkan pendapat dan keresahan mereka.

Kondisi ini membuat banyak organisasi dan komunitas Tuli di Indonesia mendorong agar penggunaan Bisindo diperluas, terutama di ruang publik. Hingga kini, Bisindo belum diakui dan dijadikan bahasa pengantar resmi bagi siswa tuli. Guru-guru bahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) belum dibekali kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tuli.

Contohnya, masih banyak guru yang berbicara terlalu cepat dan tidak menggunakan papan tulis ketika mengajar. Siswa tuli harus berusaha ekstra keras untuk memahami pelajaran yang disampaikan secara verbal. Dampaknya, kualitas pendidikan yang diterima tidak merata. Menurut kawan-kawan dari organisasi Gerkatin, bahkan tidak semua orang tuli dapat memahami sepenuhnya informasi teks yang ada di ruang publik.

Di sisi lain, bahasa-bahasa visual secara alamiah lebih mudah dipahami oleh teman-teman Tuli. Dari sinilah potensi bahasa visual untuk menjembatani *gap* informasi antara kawan tuli dan dengar terlihat.



Gayung bersambut, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah kota Solo, Jawa Tengah, sedang memberi banyak dukungan bagi inisiatif seniman mengisi ruang publik dalam bentuk mural. Apabila mural-mural ini turut menjadi medium advokasi bagi teman-teman tuli, dua “kutub” ini bisa mulai berkomunikasi secara lebih lancar.

Oleh karena itu, kami membentuk konsorsium yang terdiri dari Kota Kita, Gerkatin Solo, dan Ruang Atas untuk menyusun program Kreativitas dalam Partisipasi untuk Solo Kota Inklusi (KREASI). Masing-masing organisasi bergerak di bidang yang berbeda – Kota



Kita ahli
menyusun
metode
partisipatif
dalam
pembangunan
kota, Gerkatin
Solo berpengalaman

sebagai ruang kontribusi
dan advokasi teman-teman
Tuli di Surakarta, serta Ruang Atas
memfasilitasi kegiatan kesenian.

Tiga sudut pandang yang berbeda menjadi bekal bagi konsorsium KREASI untuk menyelenggarakan rangkaian aktivitas berbasis seni partisipatif bagi anak muda Tuli di Solo untuk dapat menyampaikan aspirasi kolektif mereka, yang akan dituangkan dalam bentuk mural pada 3 titik ruang publik di Kota Solo.

Memotret Keseharian melalui Photovoice

Hanya saja, sebelum aspirasi kawan-kawan tuli dapat dituangkan dalam bentuk mural, ada satu PR yang besar: mereka harus terbiasa dan berani angkat bicara.

Kenyataannya, seumur hidup dengan komunikasi terbatas membuat teman-teman tuli seringkali lebih minder dan tidak biasa berbicara kritis. Harus ada sesuatu yang memantik mereka untuk lebih ekspresif, dan pilihannya adalah dengan mengadakan lokakarya fotografi sebagai ajang bersuara – atau photovoice.

Mengapa fotografi? Pertama, cara ini memberikan ruang bagi teman-teman

tuli untuk berkomunikasi lewat medium visual yang lebih alamiah dan nyaman bagi mereka. Selain itu, photovoice hanya butuh modal kamera ponsel yang sederhana, sehingga terjangkau bagi setiap peserta. Terakhir, photovoice dianggap sebagai cara yang ampuh untuk menangkap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, yang mungkin sekilas terkesan remeh temeh, namun penting dibahas untuk menggali tantangan yang dihadapi kelompok minoritas.

Lokakarya photovoice berlangsung pada Februari hingga Maret 2023. Ada dua hal yang menjadi perhatian khusus kami dalam tahap persiapan.

Hal pertama adalah pertanyaan (*prompt*) yang akan diberikan kepada peserta. *Prompt* yang diajukan harus disusun dengan sederhana agar mudah dipahami oleh peserta, tetapi tetap bisa menangkap aspirasi partisipan secara menyeluruh. Selain itu, pertanyaan juga harus disesuaikan agar mudah dipahami oleh peserta. Kedua adalah teknis fasilitasi. Segala bentuk fasilitasi dengan kelompok minoritas harus disesuaikan dengan kenyamanan peserta. Dalam lokakarya photovoice bersama teman-teman Tuli, misalnya, kami memastikan posisi duduk yang nyaman bagi teman-teman untuk bercerita tanpa terganggu.

Lokakarya Photovoice diadakan dalam tiga sesi. Sesi pertama menjadi sesi yang penting, karena sesi ini secara khusus diadakan untuk memperkenalkan dan mempraktikkan metode photovoice yang akan digunakan dalam sesi-sesi

selanjutnya. Kami mengawali sesi ini dengan materi fotografi dasar, meliputi pencahayaan, komposisi, dan tips mengambil foto yang baik menggunakan kamera ponsel.



Selanjutnya, kami memberikan satu *prompt*: “Apa yang kamu sukai dari Kota Solo?” untuk dijawab oleh partisipan. Kami memberikan waktu 30 menit kepada partisipan untuk memotret jawaban dari *prompt* melalui foto di sekitar lokasi lokakarya. Setelah itu, partisipan akan diajak untuk berdiskusi tentang foto yang telah diambil. Di akhir sesi kami memberikan tugas berupa pertanyaan yang dijawab melalui foto dan akan dibahas dalam sesi berikutnya. Dengan mempraktekkan metode yang akan digunakan, peserta bisa langsung bertanya dan mengklarifikasi kebingungan yang dihadapi.

Dalam dua sesi berikutnya, melalui foto-foto yang telah diambil, peserta diajak bercerita tentang kebutuhan, tantangan, dan aspirasi mereka. **Cerita-cerita yang didiskusikan dalam Lokakarya Photovoice kemudian dikumpulkan dan dirangkum menjadi cerita kolektif. Nantinya, cerita kolektif inilah yang menjadi modal mereka dalam berkolaborasi membuat karya mural.**

Merefleksikan Gerakan Inklusivitas, Seni, dan Ruang Publik

Pada bulan Mei 2023, kami mengadakan pameran untuk menunjukkan karya-karya foto dan cerita-cerita partisipan yang yang diambil selama kegiatan lokakarya. Pameran yang diadakan selama satu minggu di Kota Solo ini diawali dengan *walking tour*, di mana tiga perwakilan partisipan



diajak untuk menceritakan hasil foto dan proses kreatifnya kepada pengunjung. Lalu untuk mengakhiri acara, kami mengadakan diskusi publik yang mengundang tiga pembicara dari masing-masing organisasi di konsorsium. Dalam diskusi ini, kami ingin berefleksi tentang bagaimana komunitas seni dapat membantu membantu gerakan inklusivitas di ruang publik.

Aprilian Bima, seorang aktivis Tuli, menyampaikan bahwa informasi adalah hak yang harus didapatkan oleh semua orang. Oleh karena itu, penting untuk menjembatani hambatan komunikasi yang dihadapi oleh teman-teman Tuli dan HoH. Komunitas seni juga dapat turut andil dalam advokasi isu inklusivitas. Menurut Chairol Imam dari Ruang Atas, hal ini dapat dilakukan dalam proses pembuatan karya dan menikmati karya.

Dalam proses pembuatan karya seni, seniman non-disabilitas dapat mulai belajar langsung dari komunitas maupun seniman disabilitas tentang isu inklusivitas dan berkolaborasi untuk mengangkat tema-tema inklusivitas dalam pembuatan karya. Kedua, dalam segi menikmati karya, seniman dapat memberi akses bagi teman-teman tuli untuk bisa turut menikmati karya seni audio dan audiovisual, contohnya dengan menghadirkan juru bahasa isyarat di konser musik dan menampilkan takarir (*subtitle*) untuk film-film Indonesia yang tayang di bioskop.

Untuk menutup diskusi, Kirana Putri dari Kota Kita membagikan tiga cara

untuk menilai kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pertama adalah dari kebijakan kota yang sudah mengakomodasi kebutuhan disabilitas. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat dari proses penyusunan peraturan di tingkat kota, apakah sudah melibatkan kelompok disabilitas atau belum. Kedua adalah dari masyarakatnya. Sebuah kota belum bisa dikatakan inklusif jika masih ada stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Terakhir adalah infrastruktur-kota yang inklusif adalah kota yang menyediakan infrastruktur fisik-misalnya *guiding block*, informasi visual, maupun informasi *braille*-di ruang-ruang publik.

Selepas diskusi, kami membuka sesi bebas agar para pengunjung bisa saling berkenalan satu sama lain. Banyak pengunjung yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan teman tuli bertanya kepada partisipan tentang foto-fotonya. Di sudut lain, terlihat banyak pengunjung antusias belajar Bahasa Isyarat bersama teman-teman tuli. Siapa sangka, ternyata inisiatif Lokakarya dan Pameran Photovoice ternyata bisa menjadi titik awal pertukaran ide dan pengetahuan antara teman tuli dan dengar. Membangun ruang kota yang lebih inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya teman-teman tuli. Oleh karena itu, penting untuk membuka lebih banyak ruang bagi teman-teman tuli untuk bercerita. (*)



"HANYA ADA LAKI-LAKI & PEREMPUAN, TIDAK ADA LAGI YANG LAIN!": CERITA WARIA MAUMERE

Yulia Aron
Komunitas KAHE



Pada 10 Februari 2023 lalu, saya dan teman-teman dari Komunitas KAHE mendapat kesempatan berharga. Kami berkunjung ke rumah Mami Vera, ketua PERWAKAS (Persatuan Waria Kabupaten Sikka) untuk berbagi cerita tentang kehidupan para waria di Maumere, Kabupaten Sikka.

Awalnya, saya sedikit canggung. Ada perasaan sungkan untuk bergaul dan berkenalan lebih dekat dengan teman-teman waria. Namun, acara yang berlangsung malam hari di teras halaman belakang rumah Mami Vera ini diselingi senda gurau. Cerita personal dan komunal ini serentak menghangatkan suasana, beriringan dengan gerimis yang perlahan berhenti.

Kunjungan ini adalah bagian dari kegiatan *Cerita-Cerita Keberagaman dari Maumere* – ruang temu yang diinisiasi Komunitas KAHE untuk mempertemukan warga, khususnya orang muda, dari berbagai konteks dan latar belakang untuk saling mengenal, berbagi cerita, dan memaknai keberagaman di Maumere. Pada program ini Komunitas KAHE bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswi dari IFTK Ledalero, BEM IFTK Ledalero, Campus Ministry IFTK Ledalero, PERWAKAS dan komunitas anak muda lain yang ada di Maumere.

Kunjungan ke rumah Mami Vera dan bertukar cerita bersama PERWAKAS adalah salah satu upaya untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan aktivitas para waria yang ada di Maumere. PERWAKAS adalah rumah bagi waria Maumere yang dibentuk pada tahun 1998 dengan

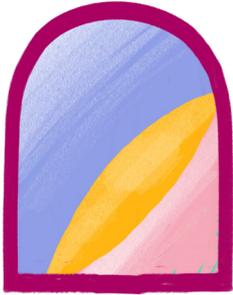
dukungan Bapak Lambert Purek dari Yayasan Cinta Kehidupan. Haji Mona menjadi ketua pertama PERWAKAS. Nama kelompok ini terinspirasi dari kelompok waria kota Surabaya yang pada saat itu bernama PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya).

Berdasarkan cerita-cerita dari para waria yang hadir pada malam itu, terutama Haji Mona dan Mak Wahida, kehidupan waria Maumere yang bergabung dalam PERWAKAS adalah kisah penuh perjuangan. Untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat, para waria harus melalui berbagai stigma dan diskriminasi.

Para waria yang tergabung dalam PERWAKAS tidak berhenti berkarya dan mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan seperti pertandingan bola voli, gerak jalan, membuka dapur umum ketika bencana, dan mengadakan ajang pemilihan Ratu Waria se-Flores Lembata. Buah berbagai usaha yang dilakukan PERWAKAS dapat dinikmati waria Maumere saat ini. Hal ini terbukti melalui penerimaan masyarakat yang



membaik dan berkurangnya diskriminasi serta stigma terhadap waria dan komunitas *queer* pada umumnya.



Hal menarik yang menjadi perhatian utama saya ketika bertemu teman-teman waria adalah soal penampilan, yakni seputar tata rias dan juga gaya berpakaian. Tampil cantik, anggun dan *fashionable* adalah ciri khas yang melekat pada waria. Ma Dewi, salah satu senior di PERWAKAS mengakui hal ini. Saya pertama kali bertemu dengan Ma Dewi di sebuah lokakarya tentang gender dan kesehatan reproduksi. Di lokakarya itu, Ma Dewi berdandan dengan sangat anggun dan cantik. Ia mengenakan gaun biru tua dengan sedikit tambahan warna hitam transparan pada kedua lengannya, *high heels* hitam sembilan cm dan tentu saja dilengkapi dengan lipstik yang merah merona pada bibirnya.

Ma Dewi – atau akrab disapa Ma Dewi Nagin di kalangan waria – adalah salah satu aktor penting dalam gerakan PERWAKAS. Waria kelahiran Maumere tahun 1979 ini menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Jayapura dan Merauke. Pada 1987, Ma Dewi bertransmigrasi ke Merauke bersama kakak perempuannya dan kembali ke Maumere pada 1995. Dalam perjalanan waktu, Ma Dewi mulai sadar akan identitasnya sebagai Waria.

Perjuangannya untuk menjadi waria sepenuhnya menghadapi pelbagai macam tantangan berat, baik dari keluarga maupun masyarakat. Namun Ma Dewi tak mudah menyerah begitu saja. Demi menghindari pukulan kakak laki-laki dan mengejar keinginannya untuk bebas, Ma Dewi akhirnya memilih mencari kos dan bekerja sebagai tukang cuci keliling.

Dari waktu ke waktu, tempat tinggal Ma Dewi ramai oleh waria yang silih berganti datang dan memilih tinggal bersamanya. Sebagai kakak yang

Kegiatan workshop SOGIESC bersama teman-teman yang bergabung dalam Platform cerita keberagaman dari Maumere



bertanggung jawab atas adik-adiknya, Ma Dewi pun mengambil pekerjaan lain yang dapat membiayai kehidupan mereka bersama-sama.

Sehari-hari, Ma Dewi selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dan bercerita bersama teman-teman wariannya. Hingga pada suatu malam, Ma Dewi diminta oleh Dinas Sosial

untuk mengumpulkan teman-temannya untuk mengadakan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka diminta menginisiasi sebuah perkumpulan untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman waria. Bersama Lamber Purek, mereka mendirikan PERWAKAS.

Salah satu bidang usaha yang memberdayakan mereka adalah jasa tata rias dan kecantikan. Di Maumere, waria umumnya memilih salon sebagai usaha yang dianggap dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tak sedikit salon milik waria yang menyediakan layanan jasa tata rias, tata busana, bahkan tata boga. Tak heran bila Ma Dewi membenarkan bahwa di Maumere, waria identik dengan kecantikan.

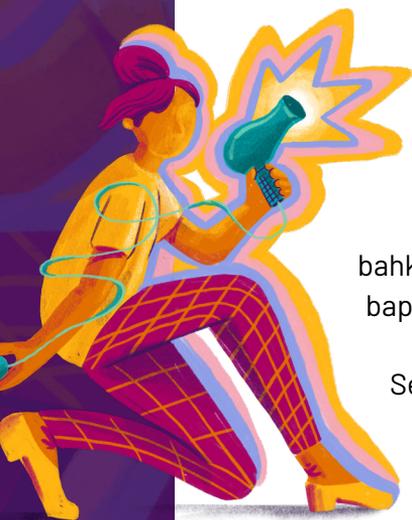
Pelopop peluang ekonomi ini adalah Bunda Lis, salah satu senior PERWAKAS yang sudah berusia 65 tahun. Lis Anriani Alen, begitu nama lengkapnya, adalah pemilik salon waria pertama di Maumere.

Berbeda dengan Ma Dewi yang mengalami penolakan dalam keluarga, Bunda Lis malah sebaliknya. Beliau diterima dengan baik dalam keluarga, terutama oleh kedua orang tua dan saudari-saudarinya. Sejak kecil ia sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman perempuan, bermain, dan bahkan bertingkah layaknya anak perempuan. Hal ini lumrah bagi bapa dan mama, tetapi tidak bagi saudara sulungnya.

Sebagai waria senior, Bunda Lis sudah kenyang makan asam-garam kehidupan. Beliau pernah bekerja di kapal sebagai tukang masak, di mana keterampilannya menggunting rambut dan dandan disadari oleh rekan-rekan kerjanya di laut. Atas saran mereka, beliau nekat merantau ke Surabaya.



▲ Keterangan Foto dari kiri ke kanan : Dewi Nagin, Yance-Tika, Yolanda Adam, Novy, Rini Kartini, Mega, Kanis Suvianita, Haji Mona, Silvy Cipi saat workshop SOGIESC (Foto : Dokumentasi Komunitas KAHE)





Di sana, beliau berkenalan dengan teman-teman waria PERWAKOS, dan mendapat pelajaran lebih tentang keterampilan mengelola salon.

Gayung bersambut – pada 1996, Bunda Lis menerima kabar bahwa kesehatan ibunya menurun drastis. Akhirnya ia pulang dan membuka salon waria pertama di Maumere.

Sebagai seorang perempuan yang lahir dan hidup dalam ajaran budaya patriarki yang mendominasi, berkenalan dan berbagi cerita dengan teman-teman PERWAKAS adalah hal langka dan berharga bagi saya. Semasa kecil, ketika saya melakukan hal yang dianggap “tidak pantas” dilakukan anak perempuan, Mama saya akan menghardik: “Hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi yang lain!”



Pernyataan ini terdengar biasa saja, bahkan saya pun mengamininya hingga masa SMA. Namun setelah bertemu, bercerita dan bahkan menjadi rekan kerja teman-teman dengan ekspresi seksual berbeda, pernyataan Mama yang sudah sekian lama melekat dalam kepala itu perlahan berubah.

Melalui kisah hidup yang dibagikan saat bertemu dan kerja bersama teman-teman PERWAKAS, saya mendapatkan banyak pelajaran baru tentang berbagai bentuk ekspresi gender. Menjadi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hasil konstruksi budaya yang dihidupi masyarakat Maumere. Para waria hanya memilih cara yang berbeda untuk mengekspresikan dirinya secara utuh sebagai seorang manusia. (*)



MENGGAPAI MIMPI YANG TERTUNDA: KISAH DISABILITAS KEMBALI BEKERJA

Agus Wahyudi & Dianita
Sehati Sukoharjo



Listyorini adalah seorang penyandang disabilitas daksa dengan mimpi sederhana: ingin berdaya dan membantu penghasilan ekonomi keluarga.

Namun, situasinya tak mudah. Tangan dan kaki kirinya sudah lama lemah, sehingga ia kesulitan berkontribusi secara ekonomi untuk keluarganya. Padahal, kondisi ekonomi mereka pas-pasan dan ia membesarkan seorang putra yang sudah duduk di bangku Sekolah Dasar. Karena situasi ini, ia sering diremehkan keluarganya dan dianggap tidak berdaya karena kondisi fisiknya tidak seperti yang lain.

Kesehariannya pun begitu-begitu saja. Selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya, Listyorini sibuk mengurus rumah, memasak, dan mengerjakan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Namun karena ekonomi keluarga mereka mentok, hasratnya untuk bekerja dan berdaya semakin bergejolak. Perempuan berusia 38 itu diam-diam menyimpan impian bekerja di pabrik garmen di wilayah asalnya, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Hanya saja, karena hambatan yang ia hadapi, rasanya mustahil untuk bisa menggapai mimpinya. Ia tidak percaya diri dan merasa berbeda, sehingga muncul keraguan untuk melangkah menggapai mimpinya. Hatinya berkecamuk marah dan ingin berlari melawan keadaan. Namun ia tidak tahu ke mana akan melampiaskannya. Hingga suatu hari, ia bertemu kawan baru yang menawarkan jalan berbeda.

Namanya adalah Simun. Ia pegiat isu-isu disabilitas yang juga bekerja sebagai pendamping di Unit Layanan Disabilitas

(ULD) Ketenagakerjaan di Wonogiri. ULD Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses penyandang disabilitas dan perlindungan pekerja disabilitas. Ketika berkenalan dengan Listyorini dan mendengar curhatnya, Simun menawarkan perempuan itu ikut pelatihan menjahit yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja.

Betapa senang hati Listyorini saat itu, semangatnya pun kembali bangkit. Mimpi yang dulu pupus, kini mulai menemukan seberkas cahaya terang.

Akhirnya, tiba waktunya ibu satu anak ini mengikuti pelatihan menjahit selama lima hari. Selama mengikuti pelatihan ini Listyorini nampak sangat antusias dan bersemangat. Akan tetapi ia masih memikirkan berbagai hambatan yang harus dilalui, terutama sulitnya mendapatkan transportasi dari rumah menuju lokasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Selain itu, keterbatasan fisik Listyorini memaksanya beradaptasi. Saat mengoperasikan mesin jahit kecepatan tinggi, misalnya, kaki kirinya yang lemah tak jarang menginjak pedal dinamo kurang kuat atau malah terlalu kuat sehingga mesin jahit tidak stabil. Kemudian saat melepas dan memasukkan *spool* ke dalam sekoci, ia terpaksa menarik benang menggunakan mulut karena tangan kirinya terhambat. Belum lagi, gedung Balai



Latihan Kerja rupanya belum sepenuhnya bisa diakses disabilitas.

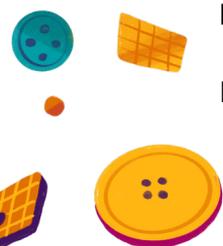
Namun, Listyorini bertahan. Setelah mengikuti pelatihan menjahit dasar selama lima hari, ia mengikuti acara



penutupan yang dihadiri perwakilan beberapa perusahaan yang sedang merekrut calon tenaga kerja disabilitas. Pendamping ULD Ketenagakerjaan menyeleksi peserta yang dinilai benar-benar berminat untuk bekerja di perusahaan, dan akhirnya terpilih empat orang. Salah satunya adalah Listyorini.

Langkah selanjutnya memang tidak mudah. ULD Ketenagakerjaan mendampingi keempat orang tersebut dalam mempersiapkan lamaran kerja dan wawancara kerja. Dalam persiapan berkas tak jarang teman-teman disabilitas mengalami kesulitan, sehingga Simun harus membantu membuat surat lamaran kerja dan memastikan semua persyaratan dilengkapi. Para calon pekerja disabilitas juga rutin berkomunikasi lewat telepon ataupun didampingi langsung bila merasa kesulitan.

Keesokan harinya, mereka melamar ke perusahaan ditemani Simun selaku



pendamping ULD Ketenagakerjaan. Kehadirannya memang dibutuhkan, sebab tidak semua

perusahaan paham bagaimana cara membuka diri bagi pekerja disabilitas. Tidak sekali-dua kali, keempat calon pekerja menghadapi bagian penyeleksi atau HRD yang terang-terangan bertanya: "Dengan kondisi fisik seperti mereka, mau ditempatkan di bagian mana?"



Calon tenaga kerja disabilitas diarahkan untuk bertemu pihak HRD, yang diwakili bapak Bartje. Setelah diseleksi lebih jauh, HRD memutuskan mengambil dua orang tenaga kerja disabilitas yang bisa langsung bekerja setelah interview. Sementara status dua pekerja lain masih menggantung, karena menunggu penempatan yang tepat.

Setelah keputusan ini turun, Listyorini berdebar-debar: akankah dirinya diterima kerja? Karena mengalami kebimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk berdoa agar segala pengharapan yang selama ini diimpikannya akan tercapai. Doanya tidak sia-sia. Ketika pengumuman tiba, Listyorini ternyata diterima bekerja di perusahaan.

Hatinya senang bukan main. Mimpinya bisa terwujud!

Tentu saja jalan berikutnya tidak serta merta mulus. Pada hari pertama masuk kerja, Listyorini masih merasa minder dan kurang percaya diri karena banyak



mata yang memandangnya remeh. Tak sedikit rekan kerjanya yang heran karena kondisinya yang berbeda. Beberapa pekerja di perusahaan itu bahkan berkata, "Kok bisa ya orang seperti ini bekerja di perusahaan?"

Hal ini sempat membuat Listyorini berkecil hati. Akan tetapi, karena semangatnya yang besar untuk mewujudkan mimpinya, ia pun mulai mengabaikan berbagai anggapan orang terhadap dirinya. Ia berkeyakinan harus kuat dan bisa bekerja. "Saya harus bisa menunjukkan pada dunia bahwa disabilitas seperti saya juga bisa bekerja," ucap Listyorini, mengenang masa-masa itu.

Sedikit demi sedikit, lingkungan kerjanya mulai memahami dan menerima kondisi Listyorini. Bahkan tidak sedikit teman kerjanya yang kini mulai membuka diri untuk menerima keberadaan Listyorini di lingkungan kerjanya. Penyebabnya, Listyorini mampu menunjukkan bahwa ia bisa bekerja walau dengan keterbatasan yang dimiliki. Ia membuktikan bahwa ia layak mendapat kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya, baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun mendapatkan berbagai kesempatan lain

seperti layaknya orang tanpa disabilitas.

Kehadiran Listyorini di perusahaan ini seolah membawa perubahan yang begitu besar di tempat kerjanya. Karena Listyorini bekerja dengan rajin ia mendapatkan perhatian khusus dari Supervisor, dan atasannya menyampaikan kepada HRD agar perusahaan memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas seperti Listyorini.

Tak jarang, bapak Bartje selaku HRD melakukan koordinasi dengan Simun selaku pendamping ULD Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan akomodasi layak dan aksesibilitas bagi disabilitas di lingkungan kerja. Simun rajin bertelepon atau datang langsung ke perusahaan untuk memberitahukan tempat mana saja yang perlu diberikan akses.

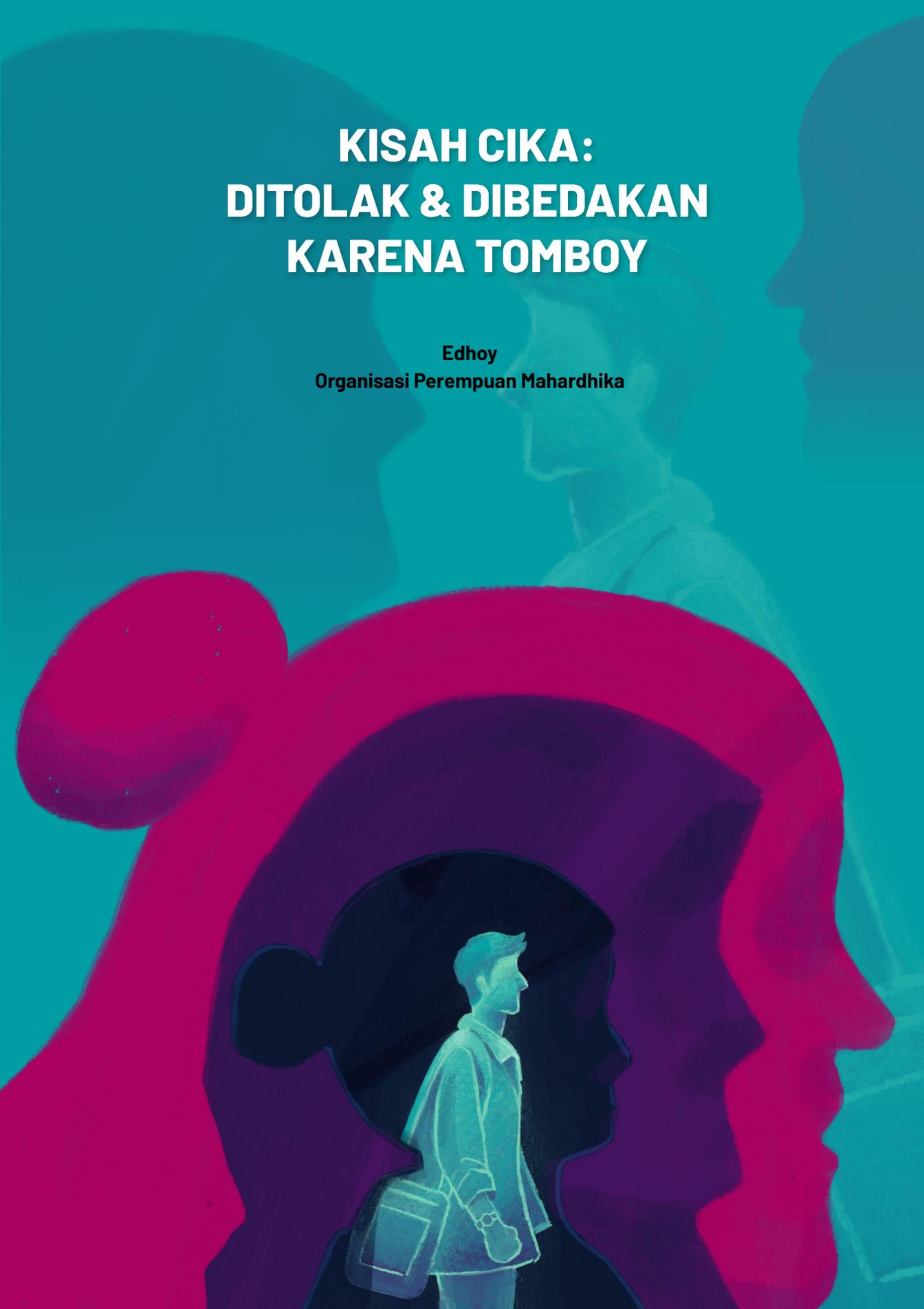
Simun juga memberikan pemahaman kepada perusahaan bahwa menyediakan akomodasi dan akses layak tidak memerlukan biaya yang mahal. Dan saat ini, Kantor HRD yang dulu hanya ada anak tangga sudah disediakan bidang miring (*ramp*) dan pegangan tangan (*hand rail*). Bahkan, di luar Gedung sudah sediakan tempat parkir khusus untuk disabilitas.

Perjuangan Listyorini dan teman-teman disabilitas lainnya membuktikan bahwa mereka layak diberikan kesempatan untuk bersinar. Ketika diberikan kesempatan yang sama dan akomodasi yang layak, ternyata Listyorini tidak kalah dengan yang lain. (*)



KISAH CIKA: DITOLAK & DIBEDAKAN KARENA TOMBOY

Edhoy
Organisasi Perempuan Mahardhika



Malam itu, aku dan Cika akan berkumpul bersama anggota komunitas Pelangi Mahardhika lainnya untuk berdiskusi tentang urusan internal organisasi. Berhubung acaranya masih agak lama, aku mengajak Cika mengobrol dulu di kosanku. Sambil *ngaso*, aku iseng menanyakan nasib lamaran pekerjaannya.

Cika tampak acuh tak acuh. Seminggu lalu, kami berpapasan di depan gerbang kawasan industri KBN Cakung, Jakarta. Perempuan berpenampilan tomboy itu mengaku habis berkeliling mengirim lamaran pekerjaan. Kini, sambil menunggu air minum mendidih, kulihat Cika sibuk dengan ponselnya, menghubungi orang lain dengan raut wajah serius.

“Kamu lagi sibuk ngobrol sama siapa sih, Cik?” tanyaku. “Serius amat romannya.”

Cika menghela napas panjang. “Ini, kak, aku coba *misscall* nomor WA orang yang kerja di PT K,” katanya, menyebut nama salah satu perusahaan garmen di Cakung. “Dia nawarin ke aku, kalau mau besok aku balik lagi ngelamar. Tapi aku harus bawa uang kalau mau diterima. Nanti kalau bawa, katanya langsung dihubungkan ke bagian penerimaan.”

Nadanya masih penuh semangat, tapi aku sungguh gemas mendengar cerita Cika. Dalam situasi keuangannya yang sulit, bahkan untuk makan sehari-hari saja dia irit-irit, mencari pekerjaan pun harus dimintai uang pelicin. Sudah tiga hari ini Cika melamar di PT K, tapi belum

juga diterima. Padahal yang aku dengar, PT itu sedang membuka lowongan besar-besaran. Sebelumnya, Cika juga melamar di PT D yang juga sedang buka lowongan. Di situ pun ia tidak diterima. Padahal Cika sudah punya pengalaman sebagai operator jahit selama 11 tahun di pabrik-pabrik garmen daerah Subang.

Aku pun teringat obrolanku beberapa hari lalu bersama Abel, teman kami di Pelangi Mahardhika. Sama seperti Cika, Abel adalah perempuan berpenampilan tomboy. Bedanya, Abel berhasil tembus kerja di kawasan KBN Cakung. Namun pengalamannya penuh keganjilan.

Abel pernah menceritakan bagaimana dulu lamaran kerjanya sering ditolak dengan alasan sudah tidak ada lowongan. Padahal, di pintu gerbang pabrik masih ditempel lowongan pekerjaan. Entah atas dorongan siapa, Abel kembali lagi ke pabrik-pabrik itu dengan mengenakan kerudung. Barulah ia diterima di salah satu pabrik garmen di kawasan KBN Cakung.

Awalnya, Abel ditempatkan sebagai operator jahit. Karena merasa sudah menjadi bagian dari pekerja, setelah beberapa waktu Abel membuka kembali kerudungnya. Entah kenapa, tak lama kemudian Abel dipindahkan ke bagian suplai bahan yang bekerjasama dengan *line operator* – pekerjaan yang butuh tenaga ekstra karena harus mendorong lori yang penuh dengan tumpukan bahan.

Aku teringat Abel, karena dia pun sempat menitipkan pesan

buat Cika ketika dia mendengar kawan seperjuangannya itu ingin mengadu nasib juga di Cakung. "Bilangin ke Cika, kalau melamar mending pakai kerudung dulu biar diterima," kata Abel. "Aku dulu beberapa hari ngelamar nggak diterima. Begitu pakai kerudung biar nggak kelihatan pendek rambutnya, aku langsung diterima!"

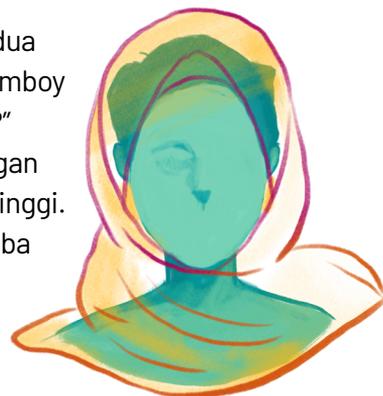
Nasehat Abel ini membuatku risau. Aku sodorkan teh hangat ke Cika yang masih terpaku pada layar ponselnya. "Oh iya, Cik, kemarin waktu kamu melamar ke PT D itu, kamu tahu nggak alasannya kamu nggak diterima?"

"Aku juga kurang paham, kak, tapi katanya aku kurang rapi," kata Cika. "Dalam hati aku kesel sih sama yang *training*-nya. Udah *mah* jutek banget, dia nggak ngajarin dulu sebelumnya, dia juga nggak ngebolehkan kami untuk nanya. Terus di tesnya cuma sekali aja. Waktu itu aku tesnya berdua sama satu orang lagi yang barengan melamar pas hari itu. Dia tomboy juga, tapi rambutnya nggak terlalu *cepat kaya* aku sih," jawab Cika.

"Padahal di kelompok lain ada tiga orang juga yang lagi dites sama pengawas lain," bebarnya. "Kami lihat mereka diajarin dulu, terus dikasih kesempatan sampai tiga kali. Padahal hasil jahitannya juga enggak yang rapi banget, malah ada yang lebih parah dari aku, tapi mereka dikasih kesempatan untuk mengulang." Lanjut Cika.

Kelanjutan ceritanya agak pahit. Semua orang dari kelompok sebelah ini diterima.

"Jadi kalian berdua yang tomboy-tomboy nggak diterima?" tanya saya, dengan nada mulai meninggi. "Kamu nggak coba nanya sama yang ngetes kamu, kok di kelompok yang lain dites jahitnya dikasih kesempatan untuk nyoba lagi, tapi kami enggak?"



"Aku nggak berani kak, orangnya jutek begitu, dia lihat hasil jahitan kita berdua sekilas aja, dan udah deh dia kasihkan lagi lamaran kita terus bilang, 'Maaf ya, kalian belum bisa diterima.' Ya udah, aku langsung keluar aja, kak." Jawab Cika.

"Apa kebetulan kalian dapat *trainer* yang memang orangnya galak, ya?" Kataku, mencoba menghibur Cika.

"Nggak tahulah kak, aku kesel sih padahal dia juga sama-sama masih karyawan," lanjut Cika, bercerocos. "Dan kalau emang dia nggak suka karena penampilan kita tomboy kan itu urusan pribadi, aturan kalau jadi *trainer* nggak boleh kaya gitu ya kak?" Jawab Cika sekaligus bertanya. "Lagian kalau emang karena kita tomboy, kenapa nggak dari awal aja ditolak?"

Cerita Cika belum selesai di sana. "Pas waktu mau di tes jahitnya, kan sekali masuk satu kelompoknya lima orang, kak. Di dalam, udah ada dua orang yang mau ngetes kita," kisah Cika. "Jadi pas kita masuk, tiga yang penampilannya feminim

disuruh duduk ke barisan jahit sebelah kanan, terus kita berdua yang tomboy disuruh duduk ke barisan yang sebelah kiri. Di situlah kita dapet *trainer* yang jutek itu.”

Meski tetap getir, aku sudah tidak heran dengan alasan penolakan kerja seperti yang dialami Cika. Di organisasi buruh Perempuan Mahardhika dan komunitas keragamannya, Pelangi Mahardhika, kami sudah kenyang mendengar kisah-kisah yang terkesan absurd seperti pengalaman Cika dan Abel. Tak sekali dua kali, kami menerima laporan dari buruh yang mendapat perlakuan diskriminatif, pelecehan, hingga kekerasan karena keragaman ekspresi gender dan orientasi seksualnya.

Termasuk, iya, ditolak karena berpenampilan tomboy.

Di perusahaan-perusahaan, memang tidak ada peraturan tertulis yang melarang buruh dengan keragaman ekspresi gender dan orientasi seksual untuk melamar pekerjaan. Tapi pada kenyataannya, di lingkup kerja, ada saja faktor ketidaksukaan dari jajaran pihak perusahaan hingga buruh. Mereka menciptakan kultur

diskriminasi, pelecehan, dan *bullying* yang mempersulit kelompok minoritas mendapat hak pekerjaan yang sama.

Pelangi Mahardhika memang fokus mendorong anggotanya – termasuk saya, Abel, dan Cika – agar mampu mengadvokasi hak-haknya. Selain memberi pendidikan melalui kampanye di media sosial, lokakarya, diskusi, dan aksi, Perempuan Mahardhika juga aktif mengajak serikat buruh dan aliansi jaringan mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi K-ILO 190 dan R-206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Didunia Kerja. Termasuk di dalamnya menghapus kekerasan dan pelecehan terhadap kelompok yang rentan.

Ketika saya dan Cika berangkat menuju pertemuan rutin Perempuan Mahardhika di sekretariat, saya tersadar bahwa perjuangan kami ini bukan sesuatu yang jauh dan asing di luar sana. Anggota kami sendiri bahkan masih menghadapi ancaman atas hak-hak dasarnya. Sesekali, pada pertemuan tersebut, saya melihat Cika mengintip ponselnya, mungkin berharap ada jawaban lebih menggembirakan dari “orang dalam” pabrik yang minta uang pelicin tadi.

Saya tergoda menyampaikan usulan Abel untuk memakai kerudung saja, tapi saya urung. Andai saja kita tinggal di dunia di mana Abel dan Cika tidak perlu keluar uang atau berpura-pura hanya untuk sekedar mencari kerja. (*)





PAYUNG DARA, POTRET PEREMPUAN MUDA INDONESIA

Kania Bening Rahmayna
Yayasan Kembang Gula



Fase pubertas perempuan muda seringkali dianggap sebagai problem sederhana, padahal kenyataannya tidak demikian. Seiring dengan perubahan hormon tubuhnya, perempuan juga mengalami pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi diri dan kepercayaan dirinya.

Namun, di sisi lain, tidak cukup informasi yang didapat perempuan tentang apa yang mereka hadapi. Data dari organisasi PEK-HAM Solo (2021) mencatat bahwa 84% remaja berusia 12-17 tahun di Solo tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Padahal, pendidikan tersebut akan membantu mereka melek terhadap kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan anak dan kekerasan dalam hubungan. Tanpa pendidikan yang memadai, remaja perempuan hanya bisa mengenali isu-isu ini lewat teman sebaya mereka, yang sendirinya tidak punya pemahaman cukup tentang tubuhnya sendiri.

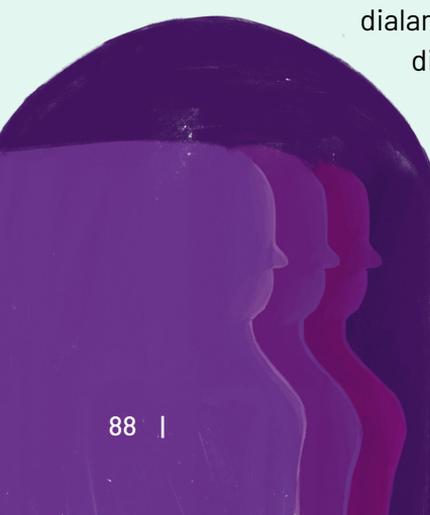
Kondisi ini tambah gawat sebab angka kekerasan seksual yang dialami anak muda di Solo Raya, wilayah kerja kami, terus meningkat secara signifikan. Menurut data Kantor

Urusan Agama Solo, kasus pernikahan anak dan perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan seksual meningkat secara konsisten setiap tahunnya, dengan pelaku utama orang-orang terdekat. Data dari PEK-HAM juga mencatat bahwa dari 80 laporan kasus kekerasan seksual di tahun 2021, 68 di antaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. Rata-rata adalah kasus kekerasan seksual.

Yayasan Kembang Gula, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan advokasi bagi perempuan, menanggapi keadaan ini dengan membuat karya seni film berjudul *Payung Dara*. Kami harap, film ini menjadi upaya kami mensosialisasikan apa yang terjadi pada perempuan ketika mereka mengalami pubertas, dan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah pelecehan seksual khususnya di keluarga.

Payung Dara disutradarai oleh Reni Apriliana, dan diproduksi oleh Yayasan Kembang Gula dengan dukungan Pusat Kajian Perempuan Solo. Dalam film tersebut, seorang remaja berusia 13 tahun bernama Dara mengalami kebingungan ketika payudaranya terlihat lebih besar dari biasa. Saat bersekolah atau ada di luar rumah, ia berusaha menutupi payudaranya agar tidak menonjol, namun tatapan tengil terus menerus dari teman laki-lakinya membuatnya semakin tidak nyaman.

Sayangnya, Dara hanya tinggal dengan neneknya yang mengalami gangguan pendengaran dan pamannya yang punya



banyak kesibukan. Ia tidak bisa berbicara dengan nyaman dan bebas kepada mereka soal apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Sekali-dua kali ia mencoba berkomunikasi, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, ia terpaksa memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri tanpa bantuan sosok orang tua.

Payung Dara mencoba menggambarkan keseharian remaja perempuan yang sedang menghadapi pubertas. Pada salah satu adegan, misalnya, Dara mengobrol dengan teman dekatnya sendiri, lalu disarankan membeli kutang untuk menutupi payudaranya. Interaksinya dengan teman-teman laki-laki dan dunia sekitarnya pun berubah, dan tiba-tiba Dara harus menavigasi dunia yang jauh lebih tidak aman baginya.

Dara adalah gambaran nyata perempuan-perempuan muda yang terpaksa belajar soal kesehatan reproduksi dari teman, guru sekolah yang kebetulan paham dan terbuka (tidak semua sekolah punya ini), dan sisanya harus mengais-ngais informasi dari sumber yang terbatas dan belum tentu kredibel. Karakter Dara pun digambarkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, untuk menunjukkan bahwa persoalan ini bukan isu yang terbatas, melainkan dialami jutaan perempuan muda di luar sana yang harus mencari tahu sendiri mengenai tubuhnya tanpa dukungan negara dan keluarga.



▲ FGD Pasca Produksi

Sebelum film *Payung Dara* syuting, Pusat Kajian Perempuan Solo mengadakan pengumpulan respon singkat dengan mengajak masyarakat dan komunitas setempat. Selain untuk mencari tahu pendapat masyarakat tentang film ini, acara tersebut juga menjadi kesempatan mengkampanyekan pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi bagi perempuan muda, tentu dalam upaya mengurangi angka kekerasan berbasis seksual dan pernikahan anak.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) pra-syuting dilakukan pada Oktober 2022 di Rumah Budaya Kratonan, Surakarta. Peserta setuju bahwa film ini mampu menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Namun peserta ingin adanya penguatan karakter nenek serta latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan budaya di sekeliling Dara.

Uniknya, peserta ingin melihat konflik-konflik yang lebih nyata dan dialami anak remaja. Misalnya, bagaimana Dara mengalami dan menanggapi tindakan

pelecehan seksual, serta bagaimana ia menghindarinya. Konflik dan interaksi di antara teman-teman sekolah Dara juga diminta diperluas untuk memperkuat pentingnya mencerdaskan dan turut mendidik teman-teman sebaya.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Maret 2023, tim *Payung Dara* melakukan FGD lagi dengan mengundang penanggung orang tua, guru, mahasiswa, dan siswa yang separtaran dengan karakter Dara. Kali ini, FGD dilakukan setelah syuting usai.

Uniknya, kedua kelompok yang mengikuti FGD sama-sama menunjukkan stereotip, prasangka, dan rasa tidak nyaman terhadap isu perempuan dan pendidikan seksual komprehensif. Tak sedikit yang merasa film ini “tidak pantas ditontonkan untuk khalayak luas” dan vulgar karena memperlihatkan bra, dinilai terlalu menyudutkan laki-laki

karena menggambarkan lelaki yang menjadi pelaku pelecehan, dan lebih pantas

ditonton hanya untuk perempuan.

Kelompok pertama, contohnya, mengusulkan beberapa adegan disensor dan baju yang digunakan Dara diakali

supaya lebih pantas, dengan alasan menaati budaya Jawa dan doktrin agama. Protes ini utamanya muncul di adegan di mana Dara memperlihatkan bagian payudaranya yang ditutupi “kutang” di depan cermin. Padahal, adegan yang dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari keluarga pemeran tanpa paksaan.

Uniknya, kelompok kedua yang terdiri dari perwakilan orang tua, mahasiswa, dan remaja lebih menunjukkan antusiasmenya terhadap film *Payung Dara*. Mereka cenderung setuju dengan isi film tersebut, dan menyorot betapa pentingnya pendampingan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Film ini pun menyadarkan pentingnya edukasi mengenai pubertas yang disampaikan secara terbuka dan jelas.

Lewat film *Payung Dara*, kami harap kami bisa menyadarkan anak-anak dan remaja perempuan di Indonesia tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Film ini diharapkan dapat memberanikan para remaja putri untuk mengetahui perubahan pada dirinya dengan memiliki kesadaran diri dan pertahanan diri yang lebih.

Selain itu film ini bisa memberi edukasi terhadap masyarakat, karena masyarakat saat ini masih menganggap isu kesehatan reproduksi dan seksualitas tabu dan tidak boleh dibicarakan. Harapannya, lewat film ini masyarakat bisa lebih terbuka berdiskusi, dan masyarakat menyadari bahwa permasalahan ini penting untuk dibicarakan bersama-sama. (*)





HIDUP TANPA TERANG: KISAH PEMUDA DISABILITAS BELAJAR POLITIK

**Alifa Aulia Shalsabila (Yayasan Cahaya
Inklusi Indonesia) & Rizki Estrada
(Perkumpulan Inisiatif)**

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya melihat gelap di tengah cahaya terang, atau merasakan kesunyian di tengah kebisingan? Atau, bisakah kamu membayangkan hidup tanpa bisa melihat terangnya bulan dan silaunya terik matahari?

Menurutmu, apakah seseorang yang hidupnya seperti itu akan diperlakukan sebagai manusia yang utuh oleh orang-orang lainnya?

Jika dulu aku diberi kesempatan untuk terlahir ke bumi bukan sebagai orang buta, mungkin aku akan meminta lahir sama seperti kebanyakan orang. Namun ini sudah kehendak Sang Pencipta. Aku dianugerahi “kekhususan” yang istimewa, untuk dapat aku optimalkan.

Aku lebih suka memakai istilah “khusus” untuk menggambarkan diriku, juga orang dengan hambatan yang beragam sepertiku ini. Diksi ini, rasanya jauh lebih mendudukan orang dengan disabilitas sebagai individu yang dihargai martabatnya sebagai manusia secara utuh, dibandingkan dengan istilah “berbeda” dari kebanyakan orang menilai kami.

Namun, kembali pada pertanyaanku tadi, Bagaimana cara orang dengan disabilitas hidup di tengah masyarakat dengan “kekhususan” yang mereka miliki?

Secara alamiah, aku pun lahir dengan hak hidup yang diatur dalam Undang-Undang. Aku tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia, sama halnya dengan warga negara lain. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini orang dengan kekhususan seperti saya masih terus berjuang untuk mendapatkan hak dasarnya, dan hidup dengan layak sebagai warga negara.

Misalnya, orang dengan disabilitas masih kesulitan mengakses pendidikan. Padahal, pendidikan adalah sarana yang dapat membuat orang dengan disabilitas menjadi mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Bisa kita bayangkan, jika seorang disabilitas tidak diberikan akses terhadap pendidikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya mereka tidak akan bisa belajar hidup mandiri, tidak akan bisa mencari pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya, menjadi jauh dari sejahtera, dan akhirnya berpotensi menjadi masalah untuk negara, bukan?



Selain akses layanan pendidikan, kesulitan berulang juga masih dialami bagi orang dengan disabilitas saat mengakses layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan pekerjaan hanya karena “kekhususan” yang dimilikinya. Lantas mengapa hal itu masih kerap terjadi? Padahal, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial adalah hak paling mendasar yang semestinya diterima setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk warga negara dengan disabilitas.

Tetapi, bagaimana agar negara bisa tahu tentang “kekhususan” yang dimiliki orang dengan disabilitas, dan kenapa isu mereka harus diperhatikan? Salah satu cara yang dapat membuat suara dari orang dengan disabilitas sepertiku dapat didengar oleh penyelenggara negara adalah dengan memberdayakan hak politik kami. Bila kami terwadahi dalam proses demokrasi, ruang akan terbuka bagi orang dengan disabilitas untuk menyampaikan aspirasinya.

Dengan memiliki kesadaran politik yang kritis, kami bisa memilih siapa yang benar-benar mampu mewakili suara kami di lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, kepala desa, bahkan sampai pada kepala negara. Kami juga bisa mempengaruhi komitmen politik para pemimpin pemerintahan, dan mendorong cara atau langkah pelaksanaan kebijakan yang lebih ramah bagi orang dengan disabilitas.



Inilah yang pada akhirnya dapat aku maknai setelah aku mendapatkan kesempatan mengikuti program literasi politik yang diprakarsai oleh Perkumpulan Inisiatif dan Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia (YCAI) dalam tiga tahun belakangan.

Kegiatan yang dikemas amatlah menarik bagiku, karena jarang kutemui sebelumnya. Di antaranya ada sekolah kepemimpinan anak muda disabilitas yang juga aku ikuti, dan juga lewat dari informasi yang disebarluaskan oleh Yayasan Cahaya Inklusi. Melalui informasi tersebut, aku belajar banyak tentang kewarganegaraan dan berefleksi tentang hak memilih dan dipilih sebagai warga negara disabilitas. Salah satu penekanannya adalah gagasan bahwa kedudukan aku dan teman disabilitas lain adalah setara.

Tak terhenti di situ, kegiatan ini berlanjut dengan kamp demokrasi anak muda disabilitas, yang menghubungkan semua ragam disabilitas muda dalam suatu kegiatan alam terbuka. Setelah sesi saling berbagi, kami dikejutkan dengan kesempatan mengungkapkan aspirasi secara langsung di hadapan tiga orang anggota perwakilan rakyat kota Bandung yang hadir.

Terakhir pada serial webinar yang diadakan YCAI pada Mei 2023 tentang disabilitas dan pemilu, saya gemas ketika salah satu narasumber dari Perludem menyampaikan bahwa daftar penduduk potensial pemilih di tahun 2024 didominasi usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan usia 30-34 tahun. Bagaimana gambaran daftar penduduk pemilih di rentang usia 18-19 tahun? Dan apakah aku, dari kelompok muda yang punya kekhususan lainnya, telah terhitung dalam daftar ini?

Kunci jawabannya agak terkuak ketika narasumber kedua dari Komnas HAM angkat bicara. Mereka memaparkan bahwa mereka memantau 17 kelompok rentan dalam pemilu ke depan, di antaranya disabilitas dan pemilih pemula. Menurut hasil pemantauan awal, sosialisasi dan penyebaran informasi kepemiluan belum sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.

Dari gambaran tersebut, aku mulai memahami bahwa informasi yang masih sulit dipahami menjadi tantangan terbesar bagi anak muda dengan disabilitas untuk mampu mendapatkan literasi politik yang memadai. Hak pendidikan politik masih belum dapat menjangkau berbagai ragam disabilitas,

dan belum ramah dalam mengakomodasi “kekhususan” yang dimiliki mereka.

Kita tidak usah bicara hal yang terlalu jauh seperti masih sangat sedikit partai politik yang mau menjaring orang dengan disabilitas sebagai kadernya. Bicara hal yang sederhana saja. Sosialisasi atau kampanye yang dilakukan para calon anggota legislatif untuk menyampaikan visi dan misinya pun tak sampai pada kami pemilih disabilitas, terlebih lagi pemilih muda dengan disabilitas.

Salah satu sebabnya, mereka menggunakan media kampanye yang tidak aksesibel bagi kami. Misalnya, ketika menjelang pemilihan legislatif, caleg sering memasang spanduk di mana-mana atau menyebarkan selebaran berisi foto calon serta tulisan visi-misi mereka. Bagaimana mungkin orang buta seperti aku bisa mengakses itu semua?

Aku sadari, ini juga yang menyebabkan aku sudah dua



kali pemilu tidak pernah ikut menyoblos walaupun sudah punya hak pilih. Karena aku tidak tahu siapa saja caleg yang sedang bertanding dan seperti apa visi-misi mereka. Rasa tidak dilibatkan ini ternyata juga dialami banyak penyandang disabilitas lainnya. Menurut pantauan Perludem, masih sangat banyak warga negara dengan disabilitas yang belum terdata sebagai pemilih.

Tidak heran, pengetahuan dan pemahaman politik disabilitas muda belum memadai. Apakah hal ini menjadi pertimbangan dari para pihak yang terlibat dalam pemilu?

Di usia mudaku yang menginjak 25 tahun, dan sebagai seorang perempuan dengan kekhususan yang kumiliki, aku bersyukur telah mendapatkan kesempatan yang baik dari program VIOLET. Setelah memaknai serangkaian kegiatan yang kuikuti selama ini, cara pandang dan sikapku berubah. Hak politik bagi warga muda disabilitas termasuk hal mendasar dalam pemenuhan hak hidup kami sebagai warga negara.

Selain itu, untuk dapat hidup di tengah masyarakat dengan kekhususan yang melekat dengan kami, maka kami butuh pengakuan tidak semata-mata dari otoritas atau pihak berwenang, melainkan juga orang-orang terdekat. Kami juga butuh dukungan dari masyarakat secara luas yang sadar, kritis, dan memperlakukan warga negara lain secara setara tanpa meminggirkan kemampuan seseorang dengan disabilitas.

Bukankah generasi muda disabilitas juga adalah orang-orang yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa ini? Atau mungkin sebagian besar orang ragu memberikan literasi politik bagi anak muda dengan disabilitas karena menganggap tidak penting dan meragukan kemampuan mereka? Bisa jadi.

Karena pada kenyataannya saat ini, tidak banyak pihak yang tergerak untuk merangkul anak muda dengan disabilitas dalam memberikan literasi politik dalam rangka membangun kesadaran kritis atas hak politiknya selama ini.

Harapanku kedepan, ada cukup banyak inovasi program seperti Perkumpulan Inisiatif dan YCAI, yang memberikan kesempatan dan mengakomodasi lebih banyak anak muda disabilitas tentang haknya sebagai warga negara seutuhnya. Karena pemilu bukan sekadar soal memilih dan dipilih, tetapi juga soal mengawal janji politik dari pemimpin terpilih. (*)

ASI
DISABILITAS

OLITIK KITA SETARA'



TAK SEKADAR LIPUTAN, JURNALIS ADALAH PEMBELA HAM

*"Kenapa sih harus ada kata aborsi?
Bisa kita ubah nggak judulnya?"*

Nyur Yawati & Chrisant Raisha
Yayasan IPAS Indonesia





Ini bukan kali pertama maupun terakhir Susi menggunakan media untuk menyuarakan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan. Bagi Susi, tugas jurnalis tak sekadar meliput, tapi juga melakukan kerja advokasi pembelaan hak asasi manusia. Namun, lagi-lagi, Susi menerima penolakan dari editornya, ketika ia menyodorkan naskah berita tentang hak aborsi aman bagi penyintas perkosaan.

Susi adalah jurnalis asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi kontributor salah satu media nasional yang cukup besar. Beradu argumen dengan editor sudah menjadi makanan Susi sehari-hari. Terutama ketika ia ingin menerbitkan artikel liputan mendalam isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan dan minoritas. Naskah dipotong, judul diganti, isi diubah di sana-sini adalah risiko yang ia terima jika tidak bisa mempertahankan hasil liputannya.

“Saya jelaskan pelan-pelan kepada editor bahwa persoalan aborsi bagi penyintas harus dibahas, ini tidak tabu karena ada regulasinya,” Susi bercerita.

Menyelaraskan pandangan redaksi memang tidak mudah. Namun ia berhasil membujuk editor lain untuk menerbitkan artikel tentang aborsi tanpa mengubah judul dan isi, meski ada pemotongan sebagian pembahasan yang dianggap tidak relevan oleh sang editor. Susi pun menerima. Artikel Susi berhasil terbit meski publikasi dilakukan pada waktu yang tidak populer, pukul 11 malam. Sungguh tim redaksi ingin mencari aman.

Bagaimana sebenarnya kebijakan rata-rata ruang redaksi media dalam memandang isu aborsi untuk korban perkosaan? Menurut penelitian Yayasan IPAS Indonesia dan Konde.com (2022) terhadap enam media populer yang disertai *focus group discussion* dengan delapan jurnalis, ternyata sikap ruang redaksi di Indonesia belum merata. Semua narasumber mengungkapkan bahwa belum ada aturan khusus dari redaksi untuk menulis topik ini dengan memadai, apalagi dengan perspektif yang mendukung korban.

Sebagian ruang redaksi cukup memberikan panduan yang meminta jurnalis mengacu total pada Kode Etik Jurnalistik, sedangkan redaksi lainnya memilih menghindari istilah halus seperti “merenggut kehormatan” dan memakai istilah yang lebih akurat seperti “perkosaan.” Di media lain, isu aborsi tidak apa-apa diliput, asal menggunakan kata-kata kunci yang mudah ditemukan di laman pencarian – sehingga rentan menggunakan istilah yang sekadar untuk cari sensasi.

Persoalan lain yang kerap muncul ketika mengumpulkan data dan informasi adalah keterbatasan waktu dan tuntutan jumlah

berita yang harus dipenuhi jurnalis setiap harinya. Laporan penelitian yang dilakukan Konde.co dan Yayasan IPAS Indonesia (2022) menjelaskan bahwa hampir seluruh jurnalis memiliki jumlah minimal berita yang harus disetor setiap harinya. Mereka juga dituntut menghasilkan berita yang menarik banyak minat pembaca, sehingga seringkali hanya mau menulis berita yang memang sudah viral. Dengan begitu, jurnalis relatif lebih mudah mencapai target tulisan ketimbang melakukan liputan yang membutuhkan usaha yang lebih keras dalam mendapatkan narasumber.

Tantangan lainnya adalah minimnya data dan informasi soal isu ini dan isu hak dan kesehatan seksualitas dan reproduksi (HKSR) secara keseluruhan. Kasus perkosaan dan kekerasan seksual masuk kategori sulit dan sensitif. Tak banyak data tersedia, narasumber pun enggan diwawancarai. Walhasil, ruang redaksi media-media kita seringkali tidak punya pemahaman baik tentang isu ini. Secara sengaja atau tidak, mereka malah menjadi corong bagi stigma tambahan terhadap korban.

Sayangnya, tak sedikit jurnalis yang punya niatan baik mengangkat isu aborsi bagi penyintas perkosaan, tapi belum melakukannya dengan baik. Selain kesulitan mengakses data, jurnalis yang didampingi Yayasan IPAS mengaku selalu mentok saat mewawancarai sumber pemerintah dan kepolisian. Mau tidak mau, mereka bergantung pada pengakuan penyintas, dan di situlah persoalan bermula.

Etika liputan isu kekerasan seksual menuntut kehati-hatian dalam mencari informasi kepada korban. Jangan sampai korban mengalami kekerasan

yang berikutnya hanya karena jurnalis tidak mampu menempatkan diri dalam perspektif korban. Namun pada kenyataannya, kadang jurnalis malah mengejar-ngejar korban untuk mau diwawancara dengan iming-iming “ini adalah cerita yang bagus”, atau “kesempatan ini dapat anda gunakan untuk melaporkan pelaku.”

Ada banyak contoh pemberitaan korban yang sangat tidak etis seperti menuliskan detail informasi korban (nama, sekolah, tempat kerja, dll). Begitu juga dengan mendeskripsikan keadaan korban secara berlebihan pada saat kejadian sehingga menimbulkan kesan bahwa peristiwa itu terjadi karena salah korban. Misalnya dengan menjelaskan apa pakaian yang digunakan korban saat itu, keadaan korban sedang sendirian, dan mengapa korban tidak berteriak ketika diserang.

Oleh karena itu, sebelum melakukan tugas liputan isu kekerasan seksual, jurnalis perlu mendapatkan pelatihan khusus. Susi, jurnalis asal Lombok tadi, adalah salah satu dari delapan peserta pelatihan liputan HKSR dari Yayasan IPAS Indonesia pada September–November 2022. Selain mendapat penguatan ilmu tentang kepenulisan dan etika meliput kasus sensitif seperti kekerasan seksual, lokakarya ini jadi ajang para jurnalis serta IPAS untuk berbagi data dan info narasumber yang cocok diwawancarai.

Di luar itu, lokakarya ini jadi ajang mereka saling berbagi pengalaman selama liputan di lapangan. Contohnya Estu,



jurnalis muda dari Jawa Timur, yang merasa kesulitan mendekati narasumber walaupun sudah saling kenal. "Ternyata walau sudah kenal, tidak menjamin mereka terbuka soal informasi," kenang Estu. "Saya harus berkali-kali meluruskan apa maksud dari pertanyaan saya tanpa menyinggung narasumber."

Susi bahkan pernah harus rela menunggu seharian demi berhasil mewawancarai penyintas di panti rehabilitasi. "Tidak mudah bicara dengan mereka, saya sehari *full* observasi mengamati kesehariannya," beber Susi. "Saya bilang saya jurnalis ingin observasi dan dimuat di media, semua data akan aman dijaga. Selain itu di panti ada SOP tidak boleh foto dan rekam, sehingga saya titipkan *handphone* di penjaga karena penyintas memang tidak nyaman jika kita membawa *handphone*."

Seringnya interaksi dengan pendamping kasus juga membantu Susi untuk mendapatkan informasi. Hal ini juga membantu dia untuk mendapatkan banyak perspektif. "Saya datangi semua teman-teman pendamping, apakah sama nih perspektif kita," kisahnya. "Liputan ini tidak akan berhasil tanpa perspektif dari banyak pihak."

Tak bisa dipungkiri bahwa model jurnalisme advokasi, di mana jurnalis menggunakan media sebagai salah satu ruang advokasi isu, mulai tak banyak diminati. Menghasilkan artikel yang dapat membentuk opini publik perlu upaya yang tidak sedikit – termasuk di antaranya,

menarik komitmen dari setiap pihak mulai dari media, masyarakat, hingga pemerintah.

Bagi jurnalis, mereka butuh dukungan lebih untuk meningkatkan kemampuan. Selain lokakarya yang diikuti Susi dan kawan-kawannya, Yayasan IPAS Indonesia memiliki program-program pelatihan jurnalis muda lainnya. "Program *fellowship* sangat membantu aku untuk menulis soal topik aborsi," ungkap Melani, salah satu peserta. "Beberapa narsum dari komunitas dan data pendukung yang disediakan Yayasan IPAS sangat membantu dalam proses penulisan."

Senada dengan Melani, Susi mengatakan bahwa mengikuti pelatihan membantunya menuangkan informasi menjadi tulisan yang aman bagi korban dan dapat diterima publik. "Ini tidak sulit karena kita sudah dapat pendampingan dan pelatihan, Menyusun tulisan yang terstruktur membutuhkan *mentor* yang seirama dan memiliki semangat yang sama," ujarnya.

Jurnalis tidak sekadar liputan tapi juga melakukan advokasi untuk pembelaan HAM. Inilah cara media berperan sebagai *watchdog*, mengawasi dan mendorong negara untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap korban.

"Kita ingin negara berbuat lebih banyak kepada korban. Tidak hanya baik, tapi komprehensif. Sebagai jurnalis, kita juga berperan mendorong lahirnya kebijakan yang pro terhadap publik," pesan Susi. (*)



PERATURAN RUMIT, BEREKSPRESI PUN SULIT

Dede Tata
YIFoS Indonesia



Pada tahun politik 2023, banyak individu dan organisasi politik yang mencari muka dengan menebar kata-kata manis pada masyarakat. Wajar saja bila ucapan klise seperti “kami bersama rakyat” dan “entaskan kemiskinan” merajalela. Namun, ganjilnya, satu narasi baru mulai muncul dan jadi bagian dari keributan massa: kampanye “tolak LGBT.”

Panik moral gaya baru ini menjadi salah satu ciri khas di konstelasi politik Indonesia selama lima tahun terakhir. Penyebabnya adalah politik agama. Studi dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (2023) menunjukkan bahwa Indonesia punya lebih dari 237 juta penduduk beragama Islam, yang rata-rata menganggap keimanannya penting dalam kehidupannya sehari-hari. Maka demi menggaet simpati dan suara mayoritas pemilih Muslim, oknum politik berebut mencari kambing hitam yang dianggap tidak sesuai syariat agama Islam. Salah satu kambing hitamnya adalah LGBT.

Dari yang awalnya hanya kata-kata makian di linimasa atau pemberitaan menyudutkan di media, mulai mengubah sikap masyarakat. Secara langsung maupun tidak, komunitas LGBTQ – termasuk yang melakukan kerja sosial dan penyuluhan – merasa tertekan secara psikologis dan fisik. Kondisi ini ibarat bom waktu, tinggal menunggu saja sampai berubah menjadi kekerasan yang nyata.

Persoalan ini yang baru saja dirasakan oleh jejaring kami di Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) Indonesia.

Sebut saja kota Mawar, salah satu kota yang bersuasana asri di Jawa Barat. Tahun lalu, pemerintah daerah Mawar melegitimasi narasi-narasi kontra-LGBT dengan menetapkan peraturan daerah yang diskriminatif. Menurut aturan baru itu, setiap orang boleh melaporkan orang yang *diduga* bagian dari komunitas LGBT kepada tim khusus yang dibentuk DPRD, dan terdiri dari berbagai dinas terkait, ormas, maupun tokoh agama.

Celaknya, aturan ini tidak hanya berlaku bagi warga kota Mawar, melainkan untuk semua orang yang ada di kota tersebut.

Pada bulan Maret 2023 lalu, dampak dari aturan baru ini mulai nampak. Pada bagian selatan kota itu, kawan-kawan dari jejaring dan LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS mengadakan malam apresiasi bagi tenaga kesehatan yang mendukung penyelesaian kasus HIV/AIDS. Kebetulan, acara itu dibarengi dengan penampilan kreativitas seperti *lip sync*, *fashion show*, dan drama dari komunitas yang di antaranya termasuk teman-teman LGBT. Kegiatan itu tidak tertutup – kawan dari berbagai latar belakang seksualitas, termasuk heteroseksual dan *ally* lainnya, juga datang di sana.

Kegiatan berlangsung pada malam hari dan ada beberapa LSM yang ikut seperti YIFoS Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, Kami Ada, dan masih banyak lagi. Perwakilan dari layanan kesehatan

seperti Puskesmas juga hadir sebagai penerima apresiasi yang akan diberikan.

Pada awalnya, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penyelenggara sudah membuat peraturan seperti tidak mengizinkan mengambil foto/video/ rekaman suara dalam ruangan selama kegiatan berlangsung. Namun, suasana mulai berubah saat segerombolan orang datang berkumpul di samping gedung tempat kegiatan ini berlangsung. Setelah diselidiki, ternyata gerombolan itu terdiri dari aparat pemerintah seperti Camat, Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas dan beberapa orang yang menggunakan pakaian ormas.

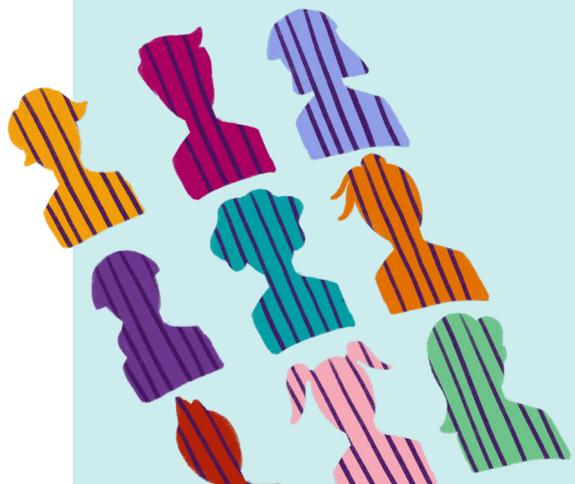
Mereka minta klarifikasi bahkan surat izin untuk kegiatan ini, dan menuding bahwa acara ini adalah pesta seks. Penyelenggara menjelaskan dengan apa adanya, dibantu juga oleh pelayan kesehatan yang hadir. Tapi kelompok orang yang datang ini tidak cukup percaya dari penjelasan satu perwakilan layanan kesehatan saja. Maka mereka meminta mendatangi setiap orang layanan kesehatan yang ditemui di kegiatan tersebut. Hal itu membuat tenaga kesehatan yang hadir tidak nyaman.

Tarik ulur antara penyelenggara dan segerombolan orang tersebut berlangsung 30 menit dan mereka tidak meninggalkan tempat kegiatan. Mereka baru setuju pergi dengan syarat ada 3 orang perwakilan yang masuk melihat kegiatan. Peraturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara mengenai pengambilan gambar ataupun lainnya tidak diindahkan, mereka mengambil foto

dan video selama 5 menit dalam gedung setelah itu keluar dan pergi tanpa meminta syarat lain lagi.

Namun, panitia tetap curiga. Kami menduga, tidak mungkin segerombolan orang itu pergi begitu saja. Ketika perwakilan dari YIFoS Indonesia dan Kami Ada mengecek kondisi di pintu keluar-masuk, awalnya tidak terlihat ada apa-apa. Tapi 15 menit setelah kelompok pertama pulang, tiga orang dengan kaos dan celana jeans memaksa penyelenggara untuk menyudahi kegiatan segera. Bila tidak, mereka mengancam akan mendatangkan wartawan untuk membuka informasi kegiatan ini ke masyarakat luas.

Panitia mencoba bernegosiasi, tapi ketiga orang ini bersikeras. Mereka mengaku bagian dari ormas lain yang tidak setuju dengan hadirnya acara tersebut. Diduga kuat, ada informan atau penyelundup dari mereka yang sempat masuk dan mengambil gambar sebelum kegiatan berlangsung, atau tepatnya saat proses pendaftaran penonton.



Karena kondisi semakin tidak kondusif, YIFoS Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, dan Kami Ada mengambil inisiatif. Penyelenggara pun sudah angkat tangan dan mengaku tidak bisa bernegosiasi lagi. Kami berkoordinasi dengan ketua penyelenggara untuk meminimalisir dampak buruk bagi acara dan peserta. Disepakati bahwa kami akan mempercepat rangkaian kegiatan, dan masing-masing memegang peran untuk manajemen krisis.

Kami membentuk tim dadakan di lapangan yang bertugas memetakan gedung kegiatan dan membuat skema rute kabur – untuk berjaga-jaga bila ormas yang kontra ini ternyata sudah menurunkan massa. Ketika ketiga orang yang mengaku ormas ini beranjak dan berpencar keliling gedung kegiatan, kami langsung meminta penampil, penonton, penerima anugerah, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini untuk keluar dari gedung satu per satu.

Kami minta mereka untuk tetap tenang dan tidak terlihat panik, seolah acaranya memang sudah akan selesai. Sebagian individu pun menggunakan kesempatan ini untuk ganti baju di dalam gedung agar identitas mereka tidak terlalu “menonjol.”

Skema ini berlangsung agak lama, tapi untungnya berjalan secara kondusif. Selama dua jam, tim kami melakukan *sweeping* keliling gedung untuk memastikan semua orang sudah keluar dari tempat kegiatan, naik ke angkutan *online* yang sudah disediakan, dan *tidak* diikuti oleh orang yang tidak dikenal.

Perwakilan dari penyelenggara juga berkeliling lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen atau kertas selebar apapun yang tertinggal.

Dalam perjalanan pulang, seorang perwakilan panitia mengaku ini bukan kejadian pertama. Setiap menjelang tahun politik, akan ada peraturan diskriminatif yang membuat hak kebebasan berekspresi dan berkumpul terkekang. Hanya saja, sekarang komunitas LGBT yang terkena getahnya.

Padahal, seharusnya Indonesia sebagai negara yang punya banyak produk hukum mengerti tugas-tugasnya kepada rakyatnya. Salah satu yang terpenting? Menjaga rasa aman dan nyaman setiap orang. (*)



POTRET PERJALANAN ORANG TUA DENGAN ANAK DISABILITAS

Siti Chofivah
SAPDA



Hidup sebagai orang tua dengan anak disabilitas ibarat berjalan di hutan belantara tanpa ujung – kita tidak tahu apa ancaman baru yang akan datang, dan kapan bahaya ini akan berakhir. Mereka harus berperang dengan dirinya sendiri, menghalau stigma masyarakat terhadap anak mereka, dan kejar-kejaran dengan tumbuh-kembang anak yang tak biasa.

Sebagai bagian dari SAPDA, organisasi yang bergerak di isu disabilitas, saya bekerja sebagai pendamping untuk orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Kami bermitra dengan orang tua dan melibatkan mereka dalam program untuk menopang proses tumbuh-kembang anak. Semua agar anak mendapat apa yang sudah seharusnya menjadi haknya.

Setiap kali ada sesi mendampingi orang tua dengan anak disabilitas, saya selalu bertanya: kapan ibu meluangkan waktu untuk *me time*? Rata-rata menjawab saat mandi, paling lama sepuluh menit saja. Selebihnya waktu dan tenaga dikerahkan untuk anak-anaknya. Biasanya, kalau situasi ini sudah menumpuk, ada satu kalimat mujarab yang mendatangkan energi sangat besar, “Kalau bukan saya, siapa lagi?”

Belum lagi, tidak semua orang tua mendapat akses pada informasi yang akurat dan memadai. Salah seorang Ibu, sebut saja beliau bu Retno, bingung ketika anaknya didiagnosa autisme di tahun 1999. Saat itu, di Indonesia hanya ada lima orang dokter yang spesialis autisme. Sehingga, bu Retno tidak punya banyak orang yang dapat memandunya. Bahkan selama enam bulan pertama diagnosa,



bu Retno rela bolak-balik Jakarta-Balikpapan demi mencari tahu lebih jauh tentang kondisi anaknya.

“Dalam kondisi syok saya hanya bisa berdoa, jika memang ini dikasih sebagai amanah, tolong diberikan kekuatan dan kesabaran,” kisah bu Retno. “Kebanyakan orang tua pasti langsung *down* atau menyalahkan diri sendiri. Saya coba memotivasi diri sendiri dengan berpikir kalau saya ini wanita terpilih.”

Kata-kata terakhir dari bu Retno inilah yang seringkali jadi faktor kunci bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Proses penerimaan diri bu Retno terhadap situasinya membuat perkembangan anaknya cukup signifikan – meski akhirnya melambat secara alamiah, terutama dalam kemampuan berbahasa.

Tanggapan cepat juga ditunjukkan oleh ibu Lina, salah satu orang tua dampingan lainnya yang membesarkan anak dengan *down syndrome*. “Awalnya saya nangis terus dan mikir macam-macam, tapi lama kelamaan bisa menerima,” kenang beliau. “Saya bingung cara mengasuhnya gimana. Tapi dengan

banyak masukan dari dokter dan orang-orang di sekitar yang menguatkan, *bismillah* saya rawat anak saya.”



Bu Lina mengaku sejak awal sudah menduga ada sesuatu yang ganjil pada anaknya. Namun ketika vonis *down syndrome* turun, ia tetap kaget dan bahkan sempat depresi selama beberapa bulan. Kehadiran lingkungan sekitar yang cenderung suportif memudahkan proses penerimaan bu Lina. Beliau pun bersyukur didampingi oleh suami yang suportif, sehingga pasangan itu bisa saling menguatkan.

Lingkungan sekitar juga mendukung insting ibu Nuri, yang merasa curiga ketika anaknya disusui dan diam saja seperti patung. “Pertama kali menyusui, anakku tidak mau menyentuh dan menatap,” kisahnya. “Waktu digendong tangannya juga menjauh dan selalu menghindari kontak mata.”

Proses menyalahkan diri sendiri tidak pernah terjadi, ungkapnya, karena “ada dukungan penuh dari keluarga.” Bahkan setelah diagnosa autisme disampaikan dan keluarganya harus melalui penyesuaian besar, mereka tetap bertahan bersama.

Meski dinamika masing-masing pasti berbeda, kisah ketiga ibu yang turut saya dampingi menunjukkan pentingnya orang tua sadar dengan cepat dan memproses perasaan mereka masing-masing. Mereka segera bergerak untuk mencari alternatif dari sekian banyak pilihan hidup sehingga bisa mendampingi anaknya dengan optimal. Kehadiran *support system* terdekat, yakni keluarga,

juga menopang mereka dalam melewati pergolakan batin.

Ibu dengan anak disabilitas berpacu dengan umur anak yang terus maju. Tidak bisa diputar dan diulang, hanya bisa maju. Saat ibu masih terus tenggelam dengan perasaannya, anaknya terus bertumbuhkembang. Sementara, ritme tumbuhkembang anak berkebutuhan khusus butuh perhatian lebih dan upaya ekstra.

Tak sedikit anak yang sudah berusia 2-5 tahun tapi belum bisa merangkak, bicara, dan berjalan. Bila seorang ibu masih dalam fase penyangkalan atau bahkan menyalahkan diri sendiri, perkembangan anak akan stagnan bahkan menurun.

Celaknya, hanya ada jeda waktu singkat di mana anak berkebutuhan khusus dapat berkembang secara signifikan. Menurut riset dan ilmu psikologi pada umumnya, stimulasi anak dengan disabilitas akan efektif secara maksimal hingga anak berusia 14 tahun saja. Selebihnya, terapi dan stimulasi akan kurang berdampak.

Fase anak adalah fase yang paling penting dalam perkembangan anak dengan disabilitas. Namun sayangnya, berdasarkan pengalaman saya sebagai pendamping, pada fase-fase awal inilah kebanyakan orang tua masih berkuat dengan perasaan marah, penyangkalan, dan menyalahkan diri sendiri. Akhirnya, jendela “emas” untuk mendorong tumbuhkembang anak terlewatkan begitu saja.



Ketiga ibu yang saya temui lekas menemukan cara untuk menerima keadaan mereka yang tak biasa. Lalu, mereka cepat mengidentifikasi keterampilan apa yang bisa menyokong perkembangan anaknya. Ibu Retno, Lina, dan Nuri sama-sama mendapati bahwa anak-anak mereka dapat berkembang bila diasah keterampilan yang terkait dengan kesenian – seperti bermusik, membatik, menari, hingga membuat kreasi unik serta kerajinan tangan.

Mereka meriset dari majalah, buku, konsultasi dengan dokter maupun psikolog, berkumpul dengan komunitas orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas, hingga berdiskusi secara rutin dengan lembaga yang bergerak di isu disabilitas. Dari sinilah orang tua mengembangkan pola asuh yang sesuai – baik mengoptimalkan terapi fisik, hingga memastikan anak mendapatkan nutrisi yang tepat.

Kemudian saat fase anak masuk sekolah, anak dengan disabilitas dihadapkan dengan gejala serta perkembangan emosi yang luar biasa. Penyebabnya, mereka menghadapi stigma negatif dari sekitar, termasuk karena penampilan fisik mereka yang berbeda. Anak-anak mengalami perundungan dari teman, masyarakat, bahkan keluarga terdekat yang belum bisa menerima keberadaan mereka. Walhasil, anak pun mengalami pergulatan dalam menerima jati dirinya sendiri. Seringkali, inilah yang berdampak pada citra diri anak dengan disabilitas dan membuat perkembangan mereka mentok.

Ketika tantangan yang dihadapi semakin kompleks, pola asuh orang tua mulai berubah. Ada dua kecenderungan pola asuh yang kerap kali muncul, yakni gaya protektif dan gaya demokrasi. Yang pertama, gaya protektif, terlalu mengekang anak demi menjaga keamanan atau menghindarkan anak dari celaka dan sesuatu yang buruk. Umumnya, gaya ini dipilih karena orang tua terlalu sayang dengan anak dan tidak mau sang anak mendapat luka setelah terpapar pada stigma negatif terhadap disabilitas.

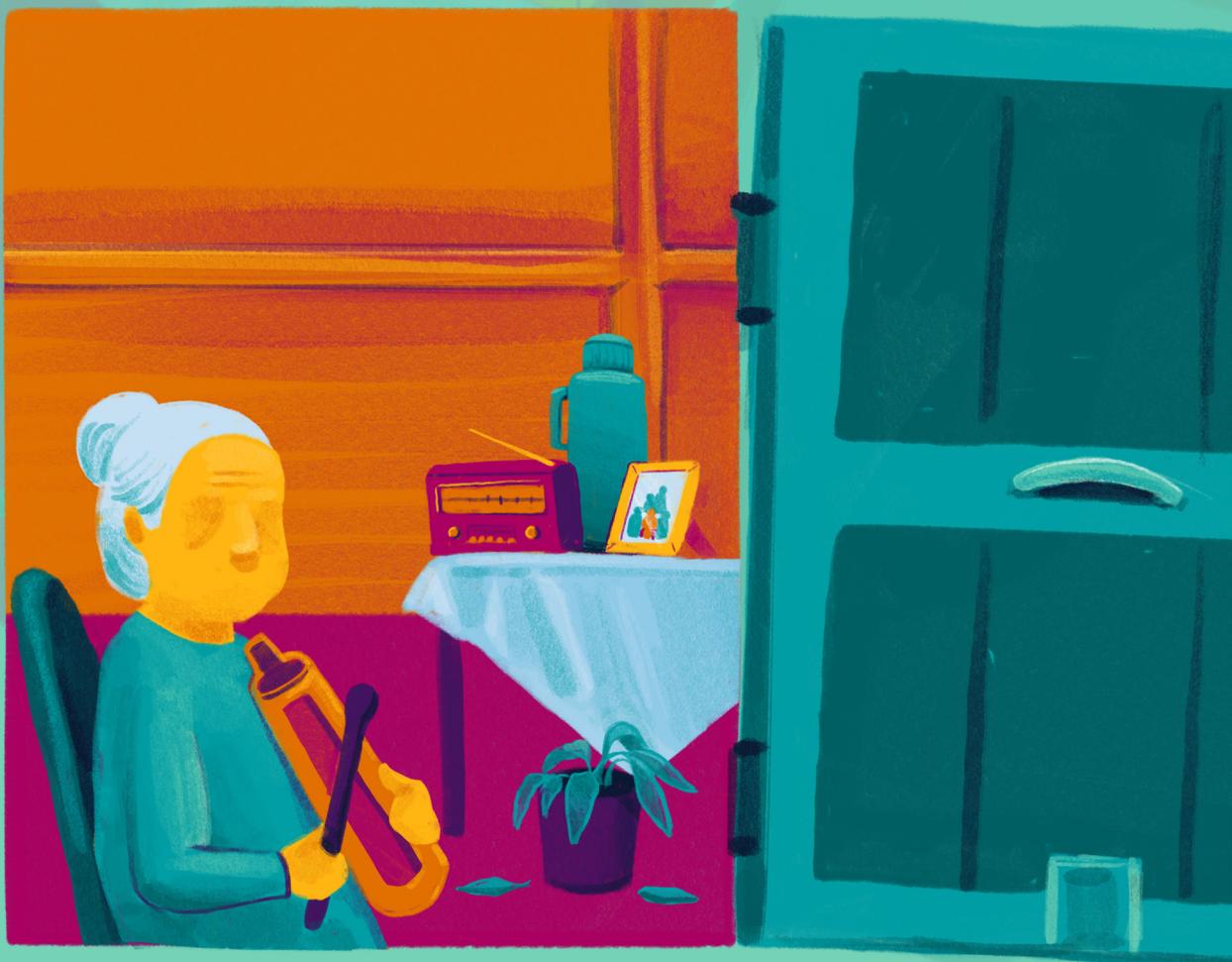
Namun, gaya pengasuhan demokratis yang mengedepankan dialog dan memandang anak sebagai manusia seutuhnya biasanya lebih berhasil. Anak dengan disabilitas cenderung lebih mudah dalam beradaptasi di lingkungan, sehingga proses penerimaan diri tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini dikarenakan orangtua fokus terhadap kelebihan yang dimiliki oleh anak dan menstimulasi perkembangannya.

Perjalanan saya sebagai pendamping untuk orangtua dengan anak disabilitas mengajarkan saya bahwa hidup harus diterima, dimaknai, dan disyukuri apapun ceritanya. Kehidupan mereka tidak mudah, penuh tikungan, tanjakan, bahkan sesekali longsoran. Namun, seperti kata mereka di masa-masa sulit: kalau bukan kami, siapa lagi? (*)



BERSOLIDARITAS DENGAN LANSIA: KISAH DARI GUNUNGGKIDUL

Wiwin Rizky Dwi Saputra
ERAT Indonesia



Kapanewon Wonosari, sebuah kota di kabupaten Gunungkidul, punya kondisi demografis yang unik. Sebanyak 16 persen dari penduduk mereka yang berjumlah 90 ribu jiwa adalah lansia. Namun, kota yang terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta ini belum mampu mensejahterakan mereka.

Banyak lansia di Kapanewon Wonosari adalah lansia soliter – istilah untuk lansia yang hidup sendiri di rumah entah karena tidak menikah, tidak punya anak, atau ditinggal keluarganya yang mungkin bekerja atau bermukim di luar kota.

Kabar buruk tentang kondisi mengenaskan lansia soliter di Kapanewon Wonosari seolah sudah jadi makanan sehari-hari. Konon,

banyak *Simbah* di sana tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jaminan kesehatan seperti KIS. Bahkan seorang pendamping di sana melaporkan bahwa ada seorang *Simbah* yang harus naik becak ke fasilitas kesehatan dan membayar biaya pemeriksaan yang tidak sedikit. Padahal, ia sudah uzur, ekonominya sulit, dan harus merawat anaknya yang tuna netra.

Setelah menerima banyak temuan dari komunitas-komunitas pendukung lansia soliter, beberapa komunitas pendukung lansia yang tergabung dalam GERAK Solidaritas berinisiatif melakukan riset untuk memetakan kondisi nyata lansia soliter di sana dari segi

kondisi sosial, kesehatan, ekonomi, dukungan, dan kerentanan. Sebanyak 151 orang lansia turut serta dalam riset ini, dan hasilnya mengejutkan.

Menurut temuan riset, rata-rata lansia di Kapanewon Wonosari ekonominya menengah ke bawah, hampir tidak dijangkau oleh layanan kesehatan, dan terisolir dari berbagai sumber informasi. Selain itu, lansia soliter di Kapanewon Wonosari banyak yang memiliki kendala fisik seperti tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa mendengar atau susah mendengar.

Kisah inilah yang dialami oleh Mbah Jumiyem dan Mbah Mento Sariyah, dua orang lansia yang menjadi sorotan tim riset kami. Mbah Jumiyem salah satu lansia yang baru ketahuan kalau tidak memiliki KTP ketika mengurus surat kematian suaminya. Ternyata, beliau tidak tahu kalau KTP tersebut hilang dan perlu diurus. Karena identitasnya tidak lengkap, Mbah Jumiyem kesulitan mengakses jaminan kesehatan.

Kondisi Mbah Mento Sariyah lebih mengkhawatirkan lagi. Beliau sudah berusia 102 tahun, dan tinggal sendiri dengan keadaan yang lemah. Bahkan beliau sudah tidak pernah bangun dari tempat tidurnya yang kumal dan bau. Beruntung, terkadang ada tetangga dekat yang muncul dan menunjukkan kepedulian pada beliau.

Dari hasil riset itu, GERAK Solidaritas membentuk *senior support center* bernama Megar Sore pada November 2022. Komunitas itu rutin bertemu di Sanggar Pojo Sumakno. Ibu Sumirah, salah satu tokoh masyarakat yang peduli keadaan lansia, maju dan terpilih sebagai pimpinan Megar Sore. Komunitas ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian



masyarakat kepada lansia soliter yang membutuhkan dukungan khusus.

Dengan kolaborasi langsung dari masyarakat, kerjasama Megar Sore semakin meluas. Kasus serupa seperti Mbah Mento Sariyah dan Mbah Jumiyem terus bermunculan. Bahkan

tantangan yang lebih spesifik mulai muncul: banyak lansia yang tidak bisa membaca, susah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, tidak punya ponsel pintar, dan rumahnya berjarak jauh dari tetangga.

Salah satu lansia yang didampingi Megar Sore bahkan harus menggunakan cara unik untuk meminta pertolongan. Sejak sakit keras, beliau memang tidak bisa berjalan lagi. Sebab rumahnya jauh dari tetangga, ia menggunakan *kentongan* untuk memberi isyarat bagi tetangga bahwa beliau butuh bantuan.

Terkadang, lansia-lansia ini tidak meminta macam-macam. Kadang, saat kami melakukan kunjungan ke rumah mereka, kami hanya saling bertukar cerita. Pendekatan dengan jangkauan ke rumah beliau merupakan salah satu strategi kami untuk lebih memperhatikan para lansia, sebab beliau mengaku hanya ingin bercerita namun tidak ada tempat untuk bercerita.

Hingga kini, Megar Sore mengadakan pertemuan rutin sebagai sarana tukar informasi dan penguatan. Tim Megar Sore juga rutin melakukan jangkauan kepada para soliter untuk memetakan kebutuhan mereka, menjadi teman bercerita mereka,

dan membuka komunikasi kembali dengan keluarga, tetangga terdekat, dan pemerintah setempat. Tak sekali-dua kali, Megar Sore membantu lansia soliter mengurus berkas-berkas administrasi seperti KTP atau jaminan kesehatan.

Beberapa hal lain yang pernah *Senior Support Center (SSC)* Megar Sore lakukan adalah belajar tentang advokasi, dan berkomunikasi dengan Dinas Sosial, Dukcapil atau pemerintah setempat untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan lansia, khususnya lansia soliter.

Senior Support Center (SSC) Megar Sore juga melakukan kegiatan kampanye ajakan untuk peduli terhadap lansia. Di antaranya dengan pembuatan video-video yang berisikan ajakan peduli lansia, dan melakukan *talkshow* di radio untuk mengajak masyarakat lebih banyak untuk memiliki kepedulian terhadap lansia.

Lansia soliter yang saat ini berada di Wonosari, Gunungkidul memang cukup banyak dan kondisinya kerap memprihatinkan. Temuan-temuan di lapangan selalu menjadi bahan diskusi untuk membantu memberikan solusi dan terus belajar untuk memberikan dukungan terhadap para lansia soliter.

Megar Sore bertekad untuk bisa mendukung semampunya serta mengkomunikasikan nasib para lansia kepada Dinas terkait. Hadirnya Megar Sore telah membangunkan semangat warga, dari anak-anak hingga pra-lansia, untuk mendukung kegiatan lansia di desa setempat. Dengan adanya dorongan dan semangat masyarakat setempat, para lansia menjadi termotivasi untuk saling bersosialisasi.

Terpenting, ini berarti mereka dapat menikmati hak dasarnya: bisa menikmati masa tua dengan bahagia. (*)

TERBANG MELAMPAUI MIMPI, ADIT *DRUMMER* SINDROMA DOWN

Artika Kristanti dan Emsyarfi
Yapesdi (Yayasan Peduli Sindroma Down)



Bayi mungil itu lahir dengan hidung pesek, pipi *chubby*, dan rambut yang lurus serta licin.

Terlihat seperti bayi Korea! *Adzan* magrib terdengar sayup-sayup ketika bidan mengantarkan bayi mungil yang masih berwarna merah itu pada ibunya. Bukannya ingin minum susu, ia malah tidur dengan lelapnya. Setiap orang yang melihatnya merasa ia menggemaskan.

Sehari-hari, bayi mungil itu cenderung tenang.

Tapi kalau sudah menangis, susah dihentikan dan sulit sekali untuk mengidentifikasi tangisannya. Tentu saja itu membuat ibunya sangat bingung. Sudah bersih, sudah kenyang, apa lagi yang kurang

Sang Ibu pun selalu berusaha menenangkannya, mengelus-ngelus pelipisnya, atau menepuk-nepuk pahanya dengan penuh kasih sayang. Biasanya, sang ibu juga akan bersenandung. Ajaib – bayi mungil itu akan selalu berhenti menangis

ketika ibunya bernyanyi. Tentu saja itu menjadi ilmu yang akan diingat. Berbekal pemahaman bahwa sang buah hati bereaksi pada senandung, bunda mulai menyapa bayi itu dengan senandung atau ketukan berirama, seperti tepuk tangan, ketukan kecil di boks bayi, dan lainnya.

Seketika, bayi pendiam itu menoleh dan memberikan sedikit reaksi positif. Reaksi yang sangat ditunggu-tunggu. Betapa

bahagia dan terharu sekali bundanya. Bayangkan, karena sampai usia lima bulan, dia belum pernah tersenyum apalagi tertawa sama sekali.

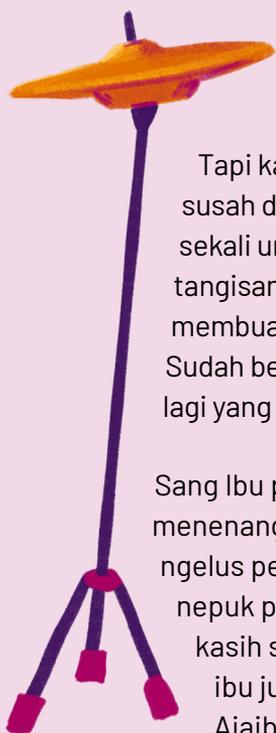
“Ya Allah, apa yang terjadi pada bayiku?” tanya sang bunda. “Mengapa reaksinya benar-benar lambat seperti ini?”

Bayi itu bernama Adit. Ia lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai pekerja pemerintah dan petani di Payakumbuh, Sumatera Barat. Setelah orang tuanya jengah dengan reaksi Adit kecil yang sangat lambat, mereka memeriksakan Adit ke dokter. Setelah sekian kali diperiksa, vonis turun: Adit penyandang Sindroma Down.

Menurut dokter, kemampuan intelektual dan menganalisa materi Adit sangat rendah, sehingga tidak banyak pelajaran yang bisa diberikan pada Adit. Tapi keistimewaan anak dengan Sindroma Down adalah, mereka peniru ulung. Mereka memperhatikan diam-diam hal yang mereka suka, kemudian mencobanya dengan versi, penjabaran dan pemahaman mereka sendiri. Cara sederhana yang mengharukan tapi juga membanggakan.

Termasuk juga ketika melihat pemusik di televisi. Adit bereaksi positif dengan mengikuti gerakan para gitaris dan drummer grup band di televisi.

Terlahir di pedesaan yang jauh dari fasilitas dan sarana lengkap, Adit sepertinya paham dan memiliki



toleransi sangat baik pada lingkungan dan keluarga. Adit tidak meminta dibelikan alat-alat mahal. Tapi memilih rak piring sebagai "toko musik" untuk barang-barang yang bisa dipukulnya. Panci, loyang kue, gelas blender, baskom, galon air mineral, ember, sendok dan yang lainnya menjadi sasaran pukulan Adit.

Ibunya senang melihat Adit gembira, tapi sekaligus berdebar-debar, karena setiap hari ada saja barang yang hancur sesuai Adit bermain.

Lama bereksperimen dengan alat dapur, bunda mulai memikirkan untuk membelikan alat musik sungguhan untuk latihan agar mimpi Adit menjadi drummer di televisi tercapai. Mulai dari gendang kecil, gendang besar, tipung, hingga cymbal satuan. Nenek dan Kakeknya akhirnya mendukung dengan menghadiahkan Adit satu drum set lengkap.

Namun kenyataan di luar masih tak mudah. Sebagai anak orang tua yang sama-sama bekerja dan tinggal di desa, keseharian Adit tidak mulus. Tidak

banyak sekolah yang menoleransi kehadiran anak berkebutuhan khusus di sana. Sejak balita, Adit mondar-mandir berganti sekolah. Ia kerap keluar-masuk sekolah juga karena menjadi sasaran perundungan dari teman, orang tua murid, bahkan guru.

Setelah berkelana ke sana kemari, Adit diterima di Sekolah Bermain Mutiara

Karina. Di sekolah ini, Adit menemui guru dan teman-teman yang menyayanginya dan mengerti kondisinya.

Teman-teman Adit lebih kecil darinya, tapi guru-guru tetap menerima kehadirannya. Teman-teman diajari untuk menghormati Adit yang gerakannya lambat dan sering tidak mengerti instruksi guru. Lambat laun Adit mulai membangun rasa percaya dirinya.

Selain belajar dan bersosialisasi di sekolah, Adit melanjutkan berlatih bakat seninya di rumah. Adit belajar bernyanyi, menari, dan memainkan aneka alat musik seperti harmonika, gitar, keyboard, kolintang, tamborin dan gendang. Dari semua alat musik itu, yang paling ia kuasai adalah gendang atau perkusi.

Saat Adit berlatih di rumah mencontoh drummer di televisi atau YouTube, Ibu akan menemani berlatih. Sepanjang musik berjalan, Ibu akan bertepuk tangan sesuai nada, ikut menari, atau bernyanyi. Itu juga upaya menyemangati Adit. Kalau ada ketukan yang salah, Ibu akan mengangkat tangan dan Adit harus memperbaiki ketukannya. Pada awalnya Adit sering tidak terima jika dikatakan ketukannya salah. Tapi lama kelamaan, Adit memahami kode ini.

Berbekal kemampuan bermain drum, ibu Adit memberanikan diri bergabung dengan komunitas anak-anak dengan Sindroma Down dan difabel lainnya.





Harapannya, akan lebih banyak pentas pertunjukan, yang mengapresiasi kemampuan Adit bermusik. Tidak banyak anak Sindroma Down yang mampu menguasai alat musik drum dengan baik. Kehadiran Adit yang menguasai alat musik drum membuatnya dilirik awak media dan instansi pemerintahan maupun swasta. Adit seringkali diundang untuk tampil di acara-acara mereka.

Satu per satu kota mulai melirik Adit untuk pentas. Mulai dari kota Bukittinggi dan Padang di Sumatera Barat, kemudian meluas ke Jakarta, Depok, Malang hingga Yogyakarta. Kota-kota tersebut menyediakan panggung dan mengajak Adit untuk unjuk gigi. Mulai dari acara komunitas, institusi sampai televisi nasional. Perjuangan drummer muda ini menembus batas meraih mimpi, mulai dituliskan dan dikisahkan berbagai media cetak, *online* dan televisi.

Meski kiprah Adit semakin berkibar, Ibu Adit masih rajin mencari tahu soal sepak terjang anak-anak dengan Sindroma Down lain di Indonesia. Beliau seolah masih *ngebet* ingin anaknya punya rekan sejawat, punya lingkungan yang memberikannya dukungan positif untuk

jadi lebih baik lagi. Salah satu sosok yang menarik perhatian Ibu Adit adalah Ibu Dewi Tjakrawinata dan putranya, Morgan. Ibu Adit terpujau melihat dedikasi Ibu Dewi pada anaknya, dan kemampuan Morgan yang menguasai tiga bahasa dan dapat hidup mandiri.

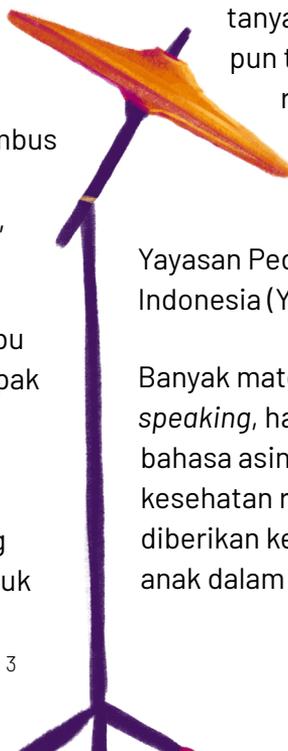
Setelah lama kepo dan berteman di media sosial, pada 2018 mereka bertemu langsung di Jakarta pada sebuah acara. Di sana, Ibu Dewi pertama berkenalan dengan sosok orang tua dan drummer spesial dari Payakumbuh ini. Sepulangnya ke Sumatera, komunikasi Ibu Adit dan Ibu Dewi terus berlanjut. Ibu Adit sering meminta aneka saran untuk kemajuan dan perkembangan anaknya.

Setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, Ibu Dewi yang biasanya memberi pelajaran pada kelompok anak dengan Sindroma Down di Jakarta akhirnya membuka pelajaran *online* lewat Zoom. "Apakah Adit mau bergabung?"

tanyanya. Pucuk dicita, ulam pun tiba. Pada 2020, Adit resmi bergabung sebagai murid kelas *online* dari organisasi yang diprakarsai Ibu Dewi,

Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi).

Banyak materi mulai dari *public speaking*, hak sebagai warga negara, bahasa asing, hingga pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja diberikan kepada para murid. Anak-anak dalam Yapesdi juga diajarkan cara



mengungkapkan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua, menyalurkan ekspresi emosional mereka secara sehat, dan mengasah bakatnya.



Ketika Adit pertama bergabung dengan kelas Yapesdi, tentu ia masih malu-malu. Teman-teman lain adalah anggota lama sejak kelas *offline*, sementara Adit satu-satunya siswa yang dari luar kota. Kegiatannya juga banyak yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Namun, dengan kesabaran dan pengertian gurunya, Adit perlahan-lahan bisa menyesuaikan diri.

Tidak sekali-dua kali, ibu Dewi meminta Adit bermain saat kelas atau saat ada seminar. Sadar bahwa Adit memiliki kesulitan dalam berbicara, para guru selalu memberikan pujian dan dukungan moral bagi Adit. Setiap Adit memakai ikat kepala daerah yang menjadi ciri khasnya sebagai drummer, ibu Dewi menanyakan dari mana ikat kepala itu berasal dan apa cerita di baliknya. Perhatian-perhatian kecil ini perlahan membangkitkan kepercayaan diri Adit.

Perjalanan Adit memang masih panjang. Namun, dengan hadirnya ruang-ruang yang aman dan mendukung, tidak mustahil bagi kawan-kawan Sindroma Down untuk memupuk dan mewujudkan mimpinya. (*)



MENDAMPINGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL SETELAH UU TPKS

Witi Muntari, Citra Ayu Kurniawati, Panjul,
Yusnidar, Eliyati, Syifaiah

LRC-KJHAM



Hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tentu menjadi harapan baru untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Setelah satu tahun disahkan, apakah UU itu mampu membawa perubahan terhadap akses keadilan bagi korban kekerasan seksual?

Sayangnya belum. Sepanjang 2022, organisasi LRC-KJHAM mencatat 92 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada jejaring kami di wilayah Jawa Tengah. Sebanyak 57 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, dan dari semua itu, hanya satu kasus yang diproses menggunakan UU TPKS.

Pendamping kami sudah mendorong kepolisian untuk menggunakan UU TPKS pada kasus kekerasan seksual, tapi implementasinya masih sulit. Persoalan seperti stigma sosial, konteks budaya dan adat, hingga tekanan pada korban perempuan masih menghantui penanganan kasus tersebut.

Salah satu contoh kasusnya terjadi di Jawa Tengah, saat seorang perempuan berusia 22 tahun melaporkan kepada pendamping kami bahwa ia mengalami kekerasan seksual di kosnya. Pelaku menyelip masuk kamar kos ketika korban sedang tidur, dan setelah korban terbangun, warga sekitar baru datang memberi pertolongan. Akibat kekerasan tersebut korban mengalami trauma, selalu menangis, tidak ingin makan, tidak bisa tidur, hingga ingin bunuh diri.

Atas keinginannya, korban melapor ke Polsek. Laporan korban diterima menggunakan KUHP pasal 281 dan 290. Tapi karena bapak pelaku memohon-mohon kepada korban, akhirnya korban mencabut laporannya kepada polisi. Penyebabnya bukan rasa iba atau kebaikan hati sesaat. Korban sadar bahwa di masyarakat, kekerasan seksual merupakan aib. Ia tahu ia akan menghadapi banyak tekanan dan keluarga pelaku dan orang-orang di sekitar pelaku. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kasusnya.

Salah satu jejaring kami di Jawa Tengah, organisasi Talita Kum, bahkan melaporkan bahwa tidak ada satupun kasus kekerasan seksual yang mereka tangani yang diproses hukum. Peranan mereka terbatas pada proses pemulihan psikologis. Karena tidak ada keadilan ini, Talita Kum berkisah pada kami bahwa dampingannya cenderung sangat tertutup, tidak mudah percaya pada orang lain, dan sulit mengisahkan pengalamannya. Bahkan setelah 3-4 kali pertemuan intens, baru mereka bisa bercerita.

Mengapa mereka semua tidak ada yang melanjutkan kasus? Karena khawatir terkena stigma dan diskriminasi.

Di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), stigma ini bahkan terpatritasi dalam hukum. Menurut jejaring kami di LBH APIK Aceh, pada 2022 mereka menangani 18 laporan kasus kekerasan seksual. Namun UU TPKS seolah kehilangan gigi di sana, karena aparat penegak hukum cenderung lebih menaati kode hukum lokal atau Qanun Jinayat.

Contoh kasus yang naas muncul saat mereka menerima laporan seorang perempuan muda disabilitas mental yang diperkosa oleh tetangganya. Kejadian pemerkosaan ini berulang berkali-kali, dan baru ketahuan ketika korban sudah hamil tua. Pada saat dilaporkan pertama ke aparat desa maupun kepolisian, kasus ini tidak dianggap serius karena dianggap korban sudah dewasa dan melakukan hubungan seksual atas keinginannya sendiri.

Saat keluarga korban mau melangkah lebih jauh, hukum menghentikan mereka. Dalam penerapan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, korban dewasa berpotensi dianggap pelaku dan mendapat hukuman juga bila dia tidak dapat membuktikan tindakan kekerasan tersebut dan bila kekerasan seksual terjadi lebih dari satu kali. Maka secara hukum, korban dianggap sebagai pelaku juga, dan akan ikut dihukum bersandingan dengan pelaku.

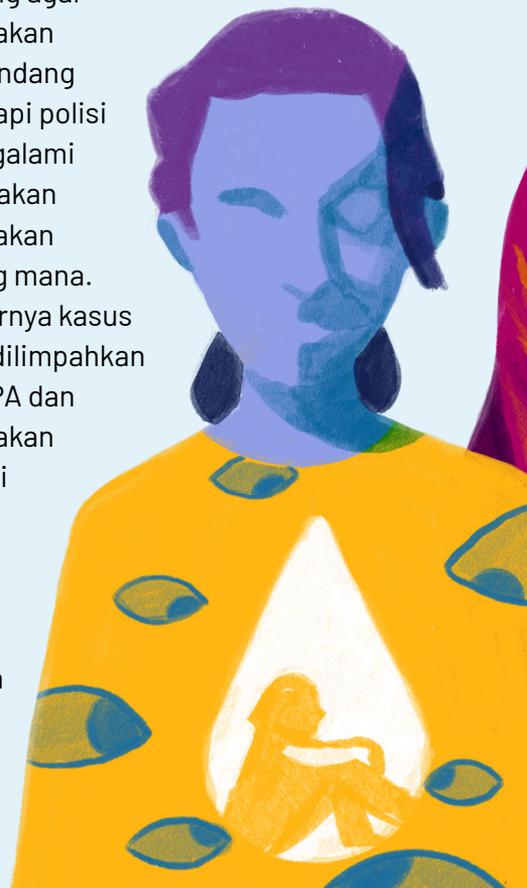
Aturan Qanun Jinayat Pasal 77 juga membatasi adanya aturan lain yang dilaksanakan di Aceh, termasuk UU TPKS. Walhasil, semakin sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Di lapangan, keluarga-keluarga korban menanggapi hal ini dengan mengambil langkah drastis. Apabila korbannya dewasa dan kekerasan terjadi saat berpacaran, misalnya, biasanya korban akan didamaikan lalu dinikahkan.

Situasi itu tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi TRUK-F, jejaring kami di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka paling tidak punya preseden langka: satu-satunya kasus kekerasan seksual yang diproses dengan UU TPKS terjadi di Maumere.

Pada laporan yang mereka terima, korban sedang sakit dan minta diobati oleh bapak mertuanya yang berprofesi sebagai dukun. Saat sedang melakukan ritual, pelaku melakukan kekerasan seksual. Awalnya, korban berpikir akan memaafkan dan tidak melaporkan mengingat pelaku adalah mertua sendiri, apalagi suami korban pun meminta agar mereka berdamai. Tapi karena pelaku tidak ada itikad baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, bahkan mengancam akan melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik, korban akhirnya melapor ke polisi.

Pada kasus tersebut pendamping mendorong agar menggunakan undang-undang TPKS, tetapi polisi juga mengalami kesulitan akan menggunakan pasal yang mana. Pada akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Unit PPA dan menggunakan pasal 6a di Undang-undang TPKS. Tetapi masih ada keraguan



dari penyidik kalau berkasnya akan dikembalikan. Saat ini, belum ada tindak lanjut atas kasus tersebut, meski terduga pelaku masih wajib lapor.

Setelah kasus ini dilaporkan, terdapat tiga kasus kekerasan seksual dewasa yang dilaporkan ke TRUK-F dan diproses dengan UU TPKS. Namun penyidik menjawab bahwa kasus pertama akan dicoba dulu dengan UU TPKS. Bila naik berkas jadi status P21, maka kasus kekerasan seksual lainnya baru akan diproses menggunakan UU TPKS.

Penanganan kasus mungkin mangkrak, tapi stigma terhadap korban jalan terus. Secara adat, korban dianggap telah melanggar tata krama. Korban pun diasingkan dari kampung karena dianggap membawa malapetaka dan aib. Dalam kepercayaan lokal, kehadiran orang seperti ini akan mendatangkan banjir dan hujan angin, sehingga kampung harus dibersihkan.



Lembaga adat setempat melakukan ritual pembersihan dengan membakar semua pakaian korban dan menebang semua pohon yang ada di sekitar rumah korban. Ritual ini dikenal sebagai Demu Lero Wulan. Tak henti di sana, korban disuruh keluar dari kampung dan dilarang untuk kembali lagi.

Korban pun didampingi TRUK-F yang memberikan penguatan

psikologis, diberikan akses ke rumah aman, dan mendapat layanan kesehatan serta pendampingan hukum. Lebih pelik lagi, korban rupanya sedang dalam kondisi hamil. Saat ini, korban sudah melahirkan, sudah mulai kembali pulih, dan akan melanjutkan pendidikannya. Kasus ini adalah kasus dengan korban anak yang otomatis menggunakan UU Perlindungan anak sehingga dianggap “lebih mudah” ditangani.

Ternyata, walau UU TPKS telah disahkan selama setahun, nasib perempuan korban tidak jauh berubah. Mulai dari Aceh, Jawa Tengah, hingga NTT, korban tetap sulit mendapatkan keadilan. Sudah seharusnya pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga penyedia layanan bersinergi untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan UU TPKS.

Kasus di Aceh dan NTT membuktikan bahwa hadirnya hukum formal di tataran pemerintah pusat saja tidak cukup. Dalam kasus Aceh, pemerintah harusnya mengkaji ulang beberapa aturan khususnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pada pasal 77, agar UU TPKS dapat diterapkan secara maksimal. Sedangkan di NTT, harus ada upaya kolaborasi dengan lembaga adat untuk mendukung penanganan kasus, perlindungan, dan pemulihan korban.

Di negara yang sekompleks Indonesia, satu UU saja tidak cukup. Untuk benar-benar melindungi korban, setiap elemen harus bergerak bersama. (*)

I PENUTUP REDAKSI

Buletin edisi kali ini berisi banyak cerita dan pengalaman menarik dari ragam sudut pandang. Mulai dari cerita personal hingga kolektif. Mulai dari yang ingin mengenali, memperjuangkan dan mendapatkan haknya di dunia yang tidak ideal ini.

Pendekatan tulisan dari ragam subjek sangatlah reflektif. Kita dapat menyadari bahwa untuk bisa hidup aman dan nyaman pun butuh proses dan waktu yang sangat lama serta tantangan yang berlapis. Perjalanan dan perjuangan kita mungkin masih panjang, apalagi untuk dunia yang ramah bagi setiap orang. Harapannya melalui cerita di buletin ini bisa menjadi inspirasi penyemangat dan menambah narasi cerita terkait inklusivitas dan interseksionalitas di ruang diskusi kita.

Terima kasih telah membaca, semoga buletin Indonesia Inklusi edisi 3 ini tidak hanya berhenti di kamu. Semoga bisa bertemu di edisi lainnya. Jangan lupa ikuti kami di instagram [@indonesiainklusi.id](https://www.instagram.com/indonesiainklusi.id) dan website indonesiainklusi.id untuk kenalan lebih jauh!

Salam Indonesia Inklusi!



Tentang Linking and Learning: Semangat Kolaborasi yang Inklusif

Indonesia Inklusi adalah sebuah komunitas yang mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk saling belajar dan terhubung. Jaringan yang terbentuk datang dari namun tidak terbatas pada para penerima hibah Voice dalam program Voice Linking and Learning. Prinsip utama dalam komunitas ini adalah menempatkan penerima hibah sebagai pusat dari seluruh kegiatan Linking and Learning. Setiap inisiatif dan keputusan yang diambil di dalam komunitas ini dilakukan oleh penerima hibah dan untuk penerima hibah.

Komunitas ini mendorong terciptanya kolaborasi, pertukaran dan pembelajaran, inovasi, serta penerapan pengetahuan baru antar organisasi yang ada di dalamnya. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menciptakan sebuah agenda dan mimpi bersama yang perlu dicapai dengan kerjasama dan partisipasi dari semua organisasi yang terlibat.

Selain itu, Indonesia Inklusi juga diharapkan bisa menjadi komunitas yang terus berkembang dan meluas tidak terbatas pada kerangka kerja Voice saja. Setidaknya, saat ini ada lima kelompok yang menjadi pemangku hak yang didukung oleh

organisasi-organisasi ini antara lain: penyandang disabilitas; perempuan yang menghadapi eksploitasi; pelecehan dan/ atau kekerasan, kelompok rentan yang terdiskriminasi usia; terutama anak muda dan lanjut usia, kelompok adat dan etnis minoritas, serta kelompok minoritas gender dan seksualitas.

Keberagaman isu dan identitas yang ada di dalam Indonesia Inklusi menjadi sebuah peluang besar yang bisa mendorong kolaborasi yang inovatif dan bermakna. Semangat yang mendasari setiap interaksi di dalam komunitas ini adalah inklusi. Setiap orang dan organisasi memiliki hak berpartisipasi secara penuh dengan pembagian tanggung jawab yang adil.

Semangat untuk saling terhubung dan belajar mengedepankan prinsip *to leave no one behind* atau tak meninggalkan siapapun. Setiap orang memiliki kesempatan dan potensi untuk menentukan tujuan komunitas dan mencapainya melalui kolaborasi yang inklusif.



Kolaborasi antara:



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

minikino

Diterbitkan oleh:



PAMFLET



Atas Dukungan:

